

**PROGRAM DASAR PEMBANGUNAN PARTISIPATIF  
(PDPP)**

**DOKUMEN  
STRATEGI PROGRAM (SP)  
TAHUN 2005 – 2009**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)  
Jl. DI Panjaitan NO. 17 Madiun**

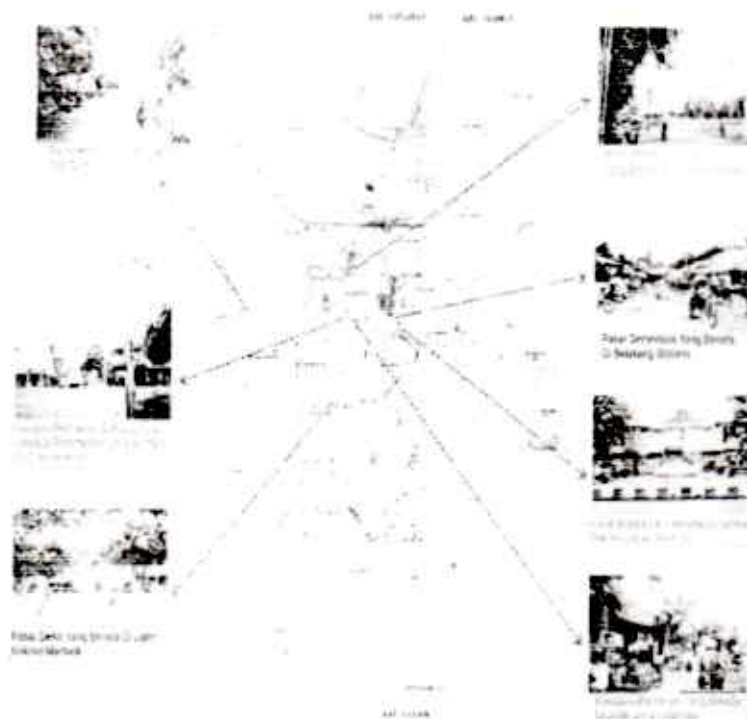
**2004**



# PEMERINTAH KOTA MADIUN

## PROGRAM DASAR PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (PDPP)

### DOKUMEN STRATEGI PROGRAM (SP) 2005 - 2009



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**2004**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh

Era otonomi Daerah, sebagai implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, memberikan peluang bagi Pemerintah Kota Madiun untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya, berdasarkan potensi dan masalah yang ada.

Namun demikian dengan era baru ini juga membawa tuntutan akan pengelolaan pembangunan yang lebih demokratis dan terbuka, serta tuntutan bagi penyertaan masyarakat dalam proses pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pemantauannya.

Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) ini disusun agar tercipta keserasian dan keterpaduan dalam proses perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, tercipta proses pembangunan yang sesuai dengan aspirasi kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Tujuan PDPP terutama menyediakan instrumen bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah yang partisipatif, berorientasi pada pencapaian hasil (Kinerja), berjangka menengah, dan mencakup investasi pembangunan multi sektoral.

Salah satu aspek utama yang tercakup dalam PDPP adalah Strategi Program (SP), yang merupakan payung atau acuan bagi aspek-aspek lainnya yaitu Program Investasi, Program Pembiayaan, Program Pengembangan Institusional dan Rencana Jangka menengah Kelurahan. Strategi Program (SP) berisi statement kebijakan strategik dan mendasar, hakekatnya adalah merupakan komitmen politik dalam pembangunan dari para pelaku (Stakeholders) yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah (5 tahun).

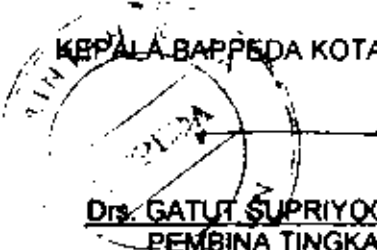
Penyusunan Dokumen Strategi Program (SP) Kota Madiun Tahun 2004 - 2009 ini merupakan masukan dari semua pihak terutama Stakeholders yang tergabung dalam tim teknis PDPP, dan difasilitasi oleh Mitra Lokal LKP2U Madiun dan PERFORM Regional Jawa Timur.


Kami menghargai sumbang saran dan masukan dari semua pihak yang telah diberikan, sehingga dapat tersusun dokumen Strategi Program Tahun 2004-2009 Kota Madiun, kami menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan Dokumen Strategi Program ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan sangat kami harapkan.

Akhinya kepada para Stakeholders yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh,

Madiun, Nopember 2004

  
KEPALA BAPPEDA KOTA MADIUN  
  
Drs. GATUT SUPRIYOGA, MM  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 510 052 166

  
DIREKTUR LKP2U MADIUN  
  
KUNTO SETYONO, SE



## WALIKOTA MADIUN

### KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh

Saya panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan ridhoNYa bahwa Dokumen Strategi Program dalam kegiatan Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) di Kota Madiun telah dapat disusun bersama para Stakeholders dengan Pemerintah.

Dokumen Strategi Program yang kita susun ini berisikan statement kebijakan **strategic** yang mendasar dan hakekatnya merupakan komitmen politik dalam pembangunan dari para pelaku utama ( Stakeholders ) yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu menengah 5 tahun ( Tahun 2005 – tahun 2009 )

Dalam mewujudkan hal tersebut, melalui PDPP serangkaian aktivitas perencanaan bersama masyarakat berusaha menguatkan kapasitas masyarakat, sekaligus mengupayakan kerjasama / kemitraan yang lebih erat antar pelaku pembangunan (Pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat) dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang benar-benar partisipatif dibutuhkan masyarakat.

Akhirnya saya mengharapkan agar Dokumen Strategi Program ini dapat bermanfaat untuk membuat perencanaan dan arah kebijakan umum daerah. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh.

Madiun, Nopember 2004

WALIKOTA MADIUN

-  -

KOKOK RAYA, SH

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I – 1
1.2. Proses dan Output PDPP .....	I – 3
1.3. Landasan Perundangan SP .....	I – 7
1.4. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup SP .....	I – 9
1.5. Proses dan Prosedur Penyusunan SP .....	I – 10
1.6. Pendekatan Penyusunan dan Sistematika Penulisan SP .....	I – 13
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM KOTA MADIUN</b>	
2.1. Letak Geografis, Peran dan Fungsi Kota Madiun	II – 1
2.2. Rencana Tata Ruang Wilayah .....	II – 5
2.3. Gambaran Umum Potensi Daerah .....	II – 21
2.4. Permasalahan Umum Pembangunan Kota Madiun	II – 57

	Halaman
<b>BAB III VISI DAN MISI KOTA MADIUN</b>	
3.1. Visi dan Misi Kota Madiun .....	III – 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Pembangunan Kota Madiun .....	III – 3
3.3. Kebijakan Strategis Kota Madiun .....	III – 11
<b>BAB IV ISU – ISU STRATEGIS KOTA MADIUN</b>	
4.1. Proses dan Mekanisme Penetapan Isu Strategis Kota Madiun .....	IV – 1
4.2. Hasil Jaring Aspirasi GS – NGS .....	IV – 2
4.3. Tahapan Penetapan Isu Strategis .....	IV – 4
4.4. Kesepakatan Isu Strategis .....	IV – 5
<b>BAB V AGENDA DAN PENTAHAPAN JANGKA MENENGAH</b>	
5.1. Analisa SWOT .....	V – 1
5.2. Agenda Kebijakan Strategi Pemkot Madiun Jangka Menengah .....	V – 5
5.3. Pentahapan Agenda Kebijakan Strategi Pemkot Madiun jangka Menengah .....	V – 5
<b>BAB VI PROGRAM STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN ARAHAN LOKASI PROGRAM</b>	
6.1. Program Strategis .....	VI – 1
6.2. Indikator Kinerja .....	VI – 1
6.3. Arahkan Lokasi Program .....	VI - 2
<b>BAB VII PENUTUP</b>	

## DAFTAR TABEL

NO	JUDUL	HALAMAN
2.1.	Rencana Distribusi dan Kepadatan Penduduk Tiap BWK Tahun 2007 dan 2012 .....	II – 20
2.2	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Madiun .....	II – 51
4.1.	Jaring Aspirasi GS – NGS untuk Menentukan Isu Strategis sebagai Bahan Penyusunan Dokumen SP PDPP Kota Madiun 2003 – 2004 .....	IV – 2
4.2.	Formula Pembobotan dan Scoring Isu Strategis .....	IV – 7
4.3.	Hasil Jaring Aspirasi GS – NGS untuk Penyusunan Dokumen SP PDPP Kota Madiun 2003 – 2004 .....	IV – 8
4.4.	Isu Strategis GS – NGS yang Telah Disempurnakan Redaksinya .....	IV – 15
4.5.	Scoring Isu Strategis Kota Madiun .....	IV – 18
4.6.	Scoring Isu Strategis Kota Madiun Berdasarkan Ranking .....	IV – 21
4.7.	Prioritas Isu Strategis Kota Madiun (Berdasarkan Ranking) .....	IV – 24
4.8.	Isu Strategis Kota Madiun .....	IV – 25
4.9.	Isu Strategis Kota Madiun Berdasarkan Prioritas .....	IV – 25
4.10.	Pendekatan Prioritas Isu Strategis .....	IV – 25
4.11.	Isu Strategis Kota Madiun Prioritas Berdasarkan Ranking .....	IV – 26
4.12.	Isu Strategis Kota Madiun Final .....	IV – 26
5.1.a.	Analisa SWOT : PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL	V – 6
5.1.b.	Analisa SWOT : PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	V – 7
5.1.c.	Analisa SWOT : PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	V – 8

NO.	JUDUL	HALAMAN
5.2.a.	Agenda Jangka Menengah : PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL .....	V - 9
5.2.b.	Agenda Jangka Menengah : PENGEMBANGAN PENDIDIKAN .....	V - 9
5.2.b.	Agenda Jangka Menengah : PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT .....	V - 11
5.3.a.	Pentahapan Pelaksanaan Agenda Jangka Menengah : PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL .....	V - 12
5.3.b.	Pentahapan Pelaksanaan Agenda Jangka Menengah : PENGEMBANGAN PENDIDIKAN .....	V - 13
5.3.c.	Pentahapan Pelaksanaan Agenda Jangka Menengah : PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT .....	V - 14
6.1.a.	Program Strategis dan Indikator Kinerja : PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL .....	VI - 3
6.1.b.	Program Strategis dan Indikator Kinerja : PENGEMBANGAN PENDIDIKAN .....	VI - 5
6.1.c.	Program Strategis dan Indikator Kinerja : PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT .....	VI - 8
6.2.a.	Program Strategis dan Arahannya : PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL .....	VI - 12
6.2.b.	Program Strategis dan Arahannya : PENGEMBANGAN PENDIDIKAN .....	VI - 13
6.2.c.	Program Strategis dan Arahannya : PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT .....	VI - 16



## DAFTAR GAMBAR

NO.	JUDUL	HALAMAN
1.1.	Proses Perencanaan Partisipatif PDPP .....	I – 5
1.2.	Strategi Program .....	I – 8
1.3.	Proses SP dan Contohnya .....	I – 11
1.4.	Pendekatan Penyusunan strategi Program .....	I – 15
2.1.	Posisi Kota Madiun sebagai Pusat SWP Madiun dan Sekitarnya .....	II – 3
2.2.	Pusat Kota dan Bagian Wilayah Kota .....	II – 7
2.3.	Arahan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa .....	II – 9
2.4.	Lokasi Industri dan Pergudangan .....	II – 11
2.5.	Pengembangan Fasilitas Pendidikan .....	II – 13
2.6.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan .....	II - 15

## DAFTAR GRAFIK

NO.	JUDUL	HALAMAN
2.1.	Jumlah Produksi Industri Kecil dan Menengah .....	II – 22
2.2.	Perkembangan Jumlah industri Kecil dan Menengah .....	II – 23
2.3.	Perkembangan Produksi Produk Unggulan Daerah .....	II – 24
2.4.	Perkembangan Unit Usaha pada Sentra Industri Kecil ....	II – 25
2.5.	Perkembangan Penerbitan Ijin Perdagangan .....	II – 26
2.6.	Perkembangan Jumlah Pasar .....	II – 27
2.7.	Perkembangan Pedagang Pasar .....	II – 27
2.8.	Perkembangan Lembaga Koperasi .....	II – 29
2.9.	Perkembangan Usaha Koperasi .....	II – 31
2.10.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi .....	II – 34
2.11.	Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dengan Daerah Sekitar .....	II – 35
2.12.	Perkembangan Pendapatan Per Kapita Dibandingkan dengan Daerah Sekitar .....	II – 35
2.13.	Perkembangan PDRB Per Kapita .....	II – 36
2.14.	Realisasi PAD .....	II – 37
2.15.	Realisasi Penerimaan dari Pemerintah Pusat Dana Perimbangan .....	II – 40
2.16.	Penerimaan dari Propinsi .....	II – 40
2.17.	Perkembangan Jalan Menurut Kondisinya .....	II – 45
2.18.	Perkembangan Sarana Jembatan .....	II – 46

NO.	JUDUL	HALAMAN
2.1	Perkembangan Tenaga medis Dibanding Jumlah Penduduk .....	II – 49
2.20.	Perkembangan Tingkat Pendidikan PNS .....	II – 53
2.21.	Perkembangan Ormas/Orpol/Kaukus/LSM .....	II – 55

#### DAFTAR LAMPIRAN

NO.	JUDUL	HALAMAN
1.	Rencana dan Realisasi Pendapatan Per Pos Dalam 5 ( lima ) tahun .....	I – 5
2.	Belanja Rutin dalam 5 (lima ) tahun .....	6 – 8
3.	Grafik Penerimaan dari Propinsi Jawa Timur .....	9
4.	Belanja Pembangunan dalam 5 (lima ) tahun .....	10

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pembangunan lima tahunan Kota Madiun, yaitu periode 2004 – 2009 berbeda dengan periode – periode sebelumnya. Sebab, dengan diberlakukannya Undang – Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka sistem Pemerintahan kita berubah dari sentralistis menjadi desentralistis.

Begitu juga, akan terjadi perubahan paradigma pembangunan yang menyangkut Konsep Pembangunan, yaitu apabila paradigma lama penekanannya pada PERCEPATAN pertumbuhan ekonomi, sehingga perencanaannya dengan pola *top – down*, fokus pengembangan perekonomian berskala besar dan fokus pembangunan pada perkotaan. Sedangkan dalam paradigma baru penekanannya pada PEMERATAAN pertumbuhan ekonomi, sehingga perencanaan dengan pola *bottom – up*, fokus pengembangan perekonomian kerakyatan dan fokus pembangunannya keseimbangan perkotaan dan perdesaan.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan apabila dalam paradigma lama berlandaskan pada sektor-sektor kegiatan, maka dalam paradigma baru berubah menjadi berdasarkan isu – isu strategis daerah. Sehingga, dalam

Perencanaan Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab penuh dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pembiayaannya. Disamping itu, proses demokratisasi tidak boleh ditinggalkan, yaitu pelibatan masyarakat untuk ikut menentukan Kebijakan dan Strategi Pembangunan untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauannya.

Bertitik tolak dari perubahan – perubahan di atas, dimana peran daerah dan masyarakat semakin besar, maka ada tiga isu penting yang terkait dengan kegiatan perencanaan kota dan wilayah, yaitu perlunya peningkatan kualitas proses perencanaan, pengembangan kapasitas kelembagaan dan optimalisasi sumber keuangan daerah.

Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), merupakan instrumen politik Pembangunan Daerah yang mempunyai ikatan hukum yang bersifat politis dan substansinya yang cenderung berciri "pernyataan politik pembangunan" dan tidak merupakan justifikasi teknis, pembiayaan maupun aspek institusional.

"Pernyataan politik pembangunan" yang tertuang dalam kedua dokumen perlu dituangkan dalam suatu "sistem perencanaan operasional" jangka menengah, sehingga disamping akan mengefektifkan penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) juga akan menjamin terselenggaranya POLDAS DAN PROPEDA dalam proses operasionalnya secara berakuntabilitas.

Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam kedua dokumen di atas. Jadi, PDPP itu menyediakan instrumen bagi Pemerintah Kabupaten / Kota dalam merencanakan dan mengelola Pembangunan Daerah yang partisipatif, berorientasi pada pencapaian hasil (kinerja), berjangka menengah dan mencakup investasi Pembangunan multisektoral.

PDPP disusun agar keserasian dan keterpaduan dalam proses perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah, tercipta proses pembangunan yang sesuai dengan aspirasi kebutuhan dan kemampuan masyarakatnya.

## **1.2. Proses dan Output PDPP**

### **1.2.1. Proses PDPP**

PDPP itu mencakup lima aspek utama, yaitu :

- Strategi Program (SP),
- Program Investasi (PI),
- Program Pembiayaan (PP),
- Program Pengembangan Institusional (PZI),
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK).

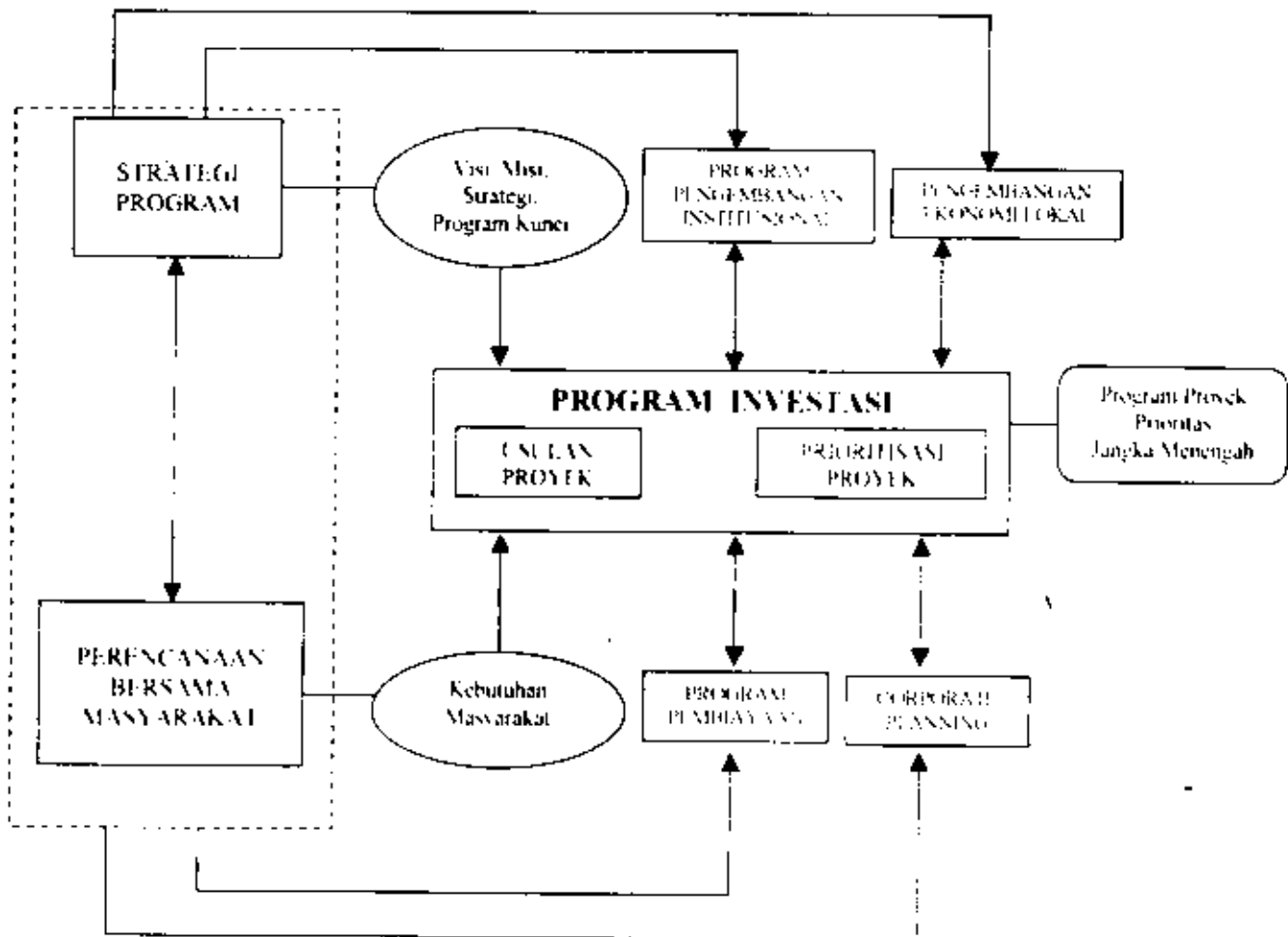
Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai kebutuhan dikembangkan dua aspek berikutnya, yaitu :

- ◊ *Corporate Planning* untuk Perusahaan Daerah (BUMD).
- ◊ Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Partisipatif.

Sedangkan Proses penyusunan PDPP sebagai berikut :

1. SP disusun terlebih dahulu, diawali dengan pembentukan tim inti dan *analisis stakeholders*.
2. Walaupun SP penyusunannya lebih dahulu, bukan berarti aspek lainnya (PI, PP, P2I, PEL) tidak dikerjakan / tim tidak bekerja. Tim aspek – aspek itu mulai bekerja, yaitu memberikan kontribusi kepada penyusunan SP, terutama pada Bab Ringkasan Tinjauan Kondisi, Situasi dan Proyeksi Perkembangan Kota Madiun yang bahan bakunya Profil Kota Madiun.
3. Bersamaan dengan hal-hal di atas, penyusunan RPJMK seharusnya juga mulai dikerjakan. Karena, juga dapat memberikan kontribusi kepada penyusunan SP, terutama saat penjaringan aspirasi masyarakat guna menemukan isu – isu strategis kota.
4. SP yang didalamnya memuat visi, misi, strategi dan program kunci itu sudah tersusun sempurna, baru dijabarkan oleh aspek-aspek lainnya, seperti PI, PP, P2I dan PEL Partisipatif.

Sedangkan proses dan hubungan antar aspek-aspek tersebut di atas dapat dilihat pada bagan 1.1. di bawah ini :



Bagan 1.1.

Proses Perencanaan Partisipatif PDP



**1.2.2. Output PDPP**

Hasil yang diharapkan dari penerapan pendekatan PDPP terutama adalah :

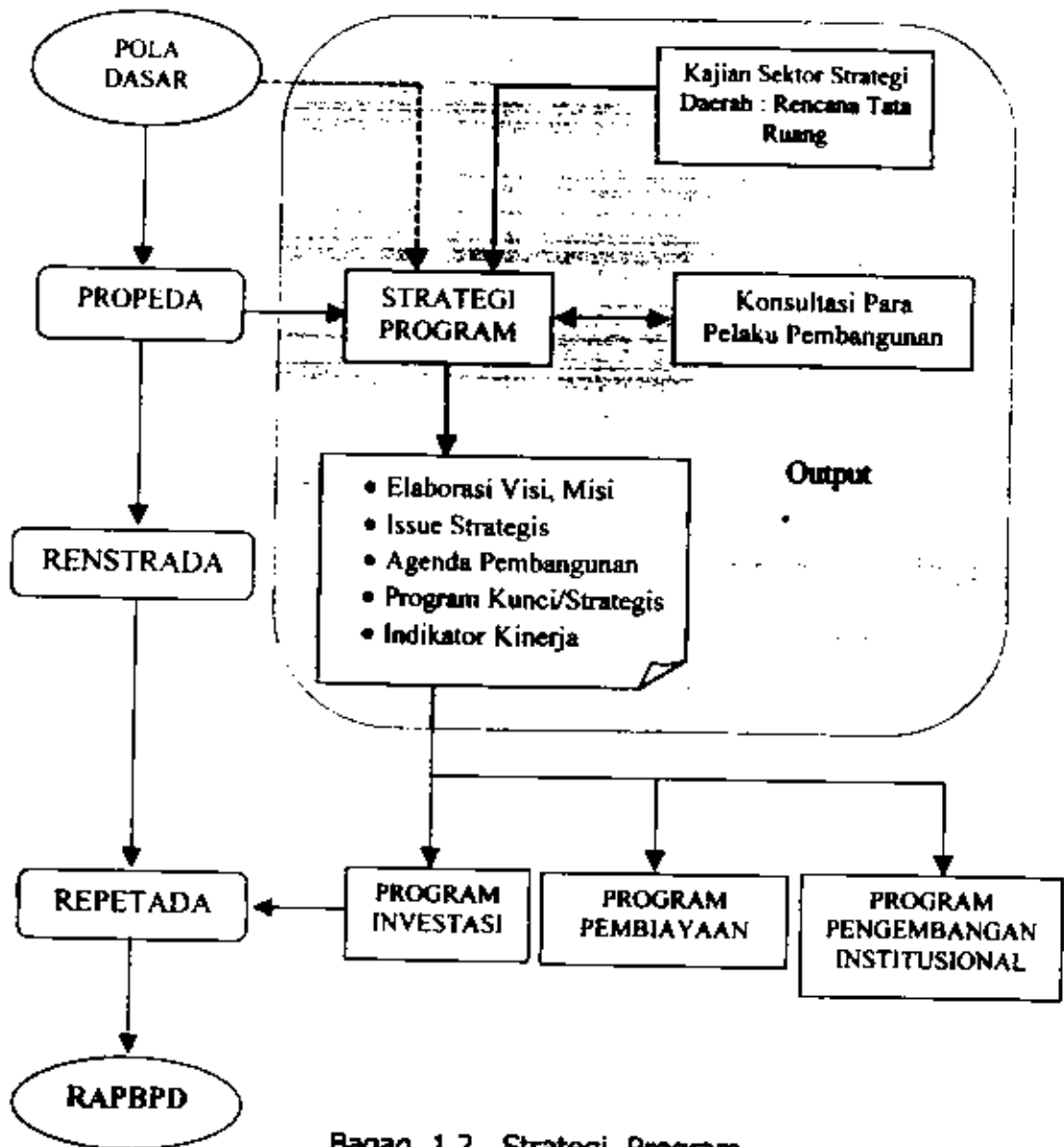
- Diterapkannya proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif,
- Kebijaksanaan, strategi dan program pembangunan jangka menengah yang sesuai dengan visi dan misi serta aspirasi kebutuhan dan kemampuan masyarakat,
- Rencana tindak (*action plan*) pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan, serta peningkatan kemampuan keuangan daerah,
- Rencana tindak pengembangan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perangkat perundangan yang menunjang proses pembangunan daerah,
- Rencana tindak dalam pemberdayaan masyarakat dari aspek kemampuan institusi (*civil society*) maupun aspek perekonomiannya (pengembangan ekonomi lokal).

**1.3. Landasan Perundangan Strategi Program (SP)**

SP merupakan salah satu aspek dari PDPP dan menjadi alat manajemen bagi Daerah dalam merumuskan maksud dan tujuan perencanaan strategis. SP menjadi payung atau acuan bagi aspek-aspek lainnya (PI, PP, PZI, RPJMD/K, Corporate Planning, PEL Partisipatif). Strategi Program berisi statement kebijakan strategik dan mendasar. Pada hakekatnya strategi Program merupakan komitmen politik dalam pembangunan dari para pelaku utama (*stakeholders*) yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah (5 tahun).

Landasan Perundangan SP :

- a. UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan daerah
- b. UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. SE No. 650/984/Bangda dari Dirjen Bangda Depdagri tanggal 5 Juni 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan PDPP.



#### **1.4. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup SP**

##### **1.4.1. Tujuan SP**

Secara umum tujuan yang diharapkan dengan proses penyusunan Strategi Program antara lain :

- Daerah memahami dan dapat menerapkan pendekatan partisipatif untuk menyusun program-program strategis daerah.
- Terbangun sistem yang baik dalam menunjang berlangsungnya mekanisme perencanaan partisipatif,
- Terciptanya pemerintahan daerah yang baik, terbuka dan bertanggung jawab.

##### **1.4.2. Sasaran SP**

Terkait dengan tujuan di atas, sasaran disusunnya Strategi Program dalam PDPP antara lain :

- Tersedianya kerangka dan instrumen bagi implementasi dan operasionalisasi kebijakan pembangunan daerah untuk dapat melaksanakan desentralisasi pembangunan daerah secara efektif.
- Tersedianya instrumen untuk mendekatkan visi, misi pembangunan daerah kepada manajemen dan operasional perencanaan, implementasi dan penganggaran.
- Tersedianya kerangka untuk pengambilan keputusan pembangunan jangka menengah.

- Adanya fokus bagi strategi dan program bersifat multisektoral.

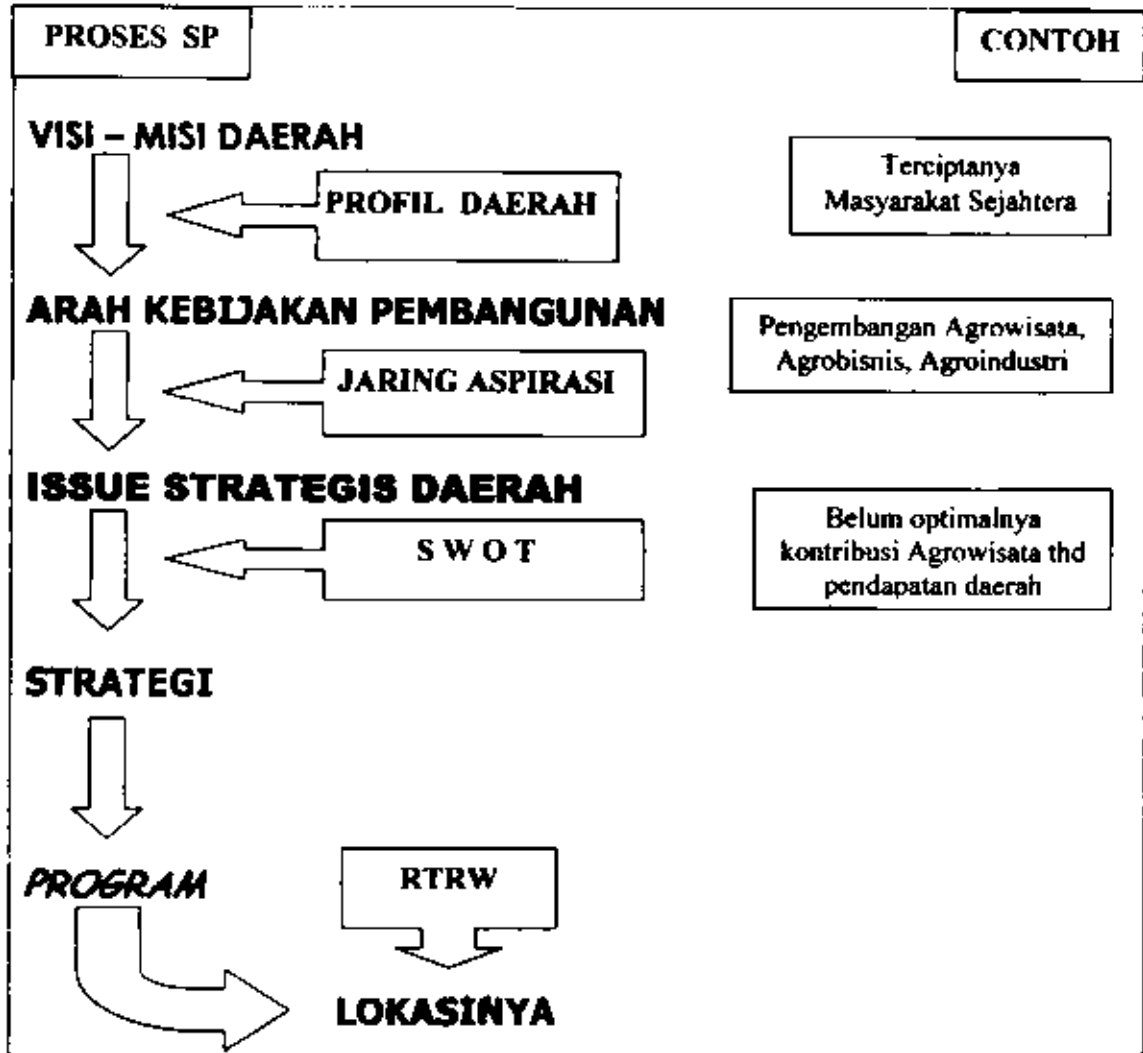
### **1.4.3. Ruang Lingkup SP**

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan peranan yang diharapkan dari Strategi Program, maka substansi utama Strategi Program akan meliputi :

- Penjabaran atau elaborasi visi dan misi pembangunan daerah,
- Isu-isu strategis dan multi sektoral pembangunan daerah,
- Arah kebijakan pembangunan : klarifikasi peranan dan fungsi spesifik daerah, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah,
- Agenda kebijakan dan strategi penanganan,
- Program-program investasi strategis dan kunci jangka menengah,
- Indikator kinerja pencapaian program.

### **1.5. Proses dan Prosedur Penyusunan SP**

Untuk mencapai tujuan dan cakupan substansi di atas, proses penyusunan Strategi Program dilakukan secara partisipatif seperti yang ditunjukkan pada Bagan 1.3. di bawah ini :



Bagan 1.3.  
Proses SP dan Contohnya

Adapun penyusunan SP melalui tahap-tahap sebagai berikut :

**Tahap 1 : Pengkajian tujuan dan arah kebijakan**

- Melakukan *check-list* terhadap kekuatan dan kelemahan dari dokumen rencana yang ada, sehingga dapat disepakati tentang

macam bantuan teknis PDPP yang tepat bagi Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

**Tahap 2 : Pengkajian Tujuan dan arah kebijakan**

- Mempelajari visi – misi daerah dan profil daerah
- Sesuaikan dengan kebijakan daerah

**Tahap 3 : Klarifikasi Visi – Misi**

- Melakukan kajian kejelasan pernyataan pada visi dan misi daerah. Pernyataan visi hendaknya bisa ditafsirkan secara obyektif (satu penafsiran) agar mudah diterjemahkan kedalam kebutuhan tindakan nyata.

**Tahap 4 : Profil daerah dan skenario pengembangan jangka menengah**

- Profil daerah akan memberikan gambaran atau potret tentang karakteristik fisik, sosial dan ekonomi daerah serta fungsi dan peranannya dalam lingkup yang lebih luas. Hingga diketahui potensi dan kendalanya.

**Tahap 5 : Identifikasi isu strategis daerah**

- Diawali dengan penjarangan isu – isu daerah yang diangkat dari permasalahan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat, baik yang berskala kota/kabupaten, propinsi atau nasional.
- Metode penjarangan isu, dengan studi dokumen, wawancara, kusioner dan lain – lain.

**Tahap 6 : Perumusan alternatif strategi**

- Perumusan strategi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya dengan menggunakan analisis SWOT.

**Tahap 7 : Perumusan program kunci**

- Alternatif Strategi di dalam implementasinya akan dirumuskan ke dalam program – program kunci. Untuk merealisasi satu strategi bisa dipertukan beberapa program
- Program hendaknya sudah bisa memberikan koridor bagi pihak – pihak yang akan menindaklanjuti , seperti penyusunan Program Investasi, Program Pembiayaan dan Program Pengembangan Institusional.

**Tahap 8 : Penetapan lokasi program**

- Program dapat dikatakan nyata apabila lokasinya jelas. Lokasi program diidentifikasi berdasarkan skenario pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota.

**1.6. Pendekatan Penyusunan dan Sistematika Penulisan SP**

**1.6.1. Prinsip Pendekatan SP**

Sesuai dengan tuntutan otonomi daerah dan demokratisasi proses pembangunan, maka dalam penyusunan Strategi Program digunakan pendekatan :



- **Proses perencanaan dan pembangunan yang partisipatif.**  
Proses ini menempatkan pihak pemerintah sebagai fasilitator dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan bersama masyarakat,
- **Kepemerintahan yang baik.** Pembangunan daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan praktek-praktek pengelolaan daerah yang efektif. Hal ini mencakup antara lain transparansi, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, kepekaan (*responsiveness*), partisipasi, visi kedepan yang strategis, penegakan hukum, akuntabilitas, keadilan dan profesionalisme,
- **Pembangunan secara berkelanjutan.** Mendudukkan pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk dapat mengarahkan proses pembangunan daerah dalam menuju tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

**1.6.2. Sistematika Penulisan SP**

Berdasarkan pendekatan penyusunan di atas, maka Strategi Program (SP) Kota Madiun, dituangkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : RINGKASAN TINJAUAN KONDISI, SITUASI DAN PROYEKSI PERKEMBANGAN KOTA MADIUN
- BAB III : VISI DAN MISI KOTA MADIUN, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA, KEBIJAKAN STRATEGIS KOTA
- BAB IV : ISU – ISU STRATEGIS KOTA
- BAB V : AGENDA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA
- BAB VI : PROGRAM STRATEGIS KOTA, INDIKATOR KINERJA DAN ARAHAN LOKASI
- BAB VII : PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KOTA MADIUN

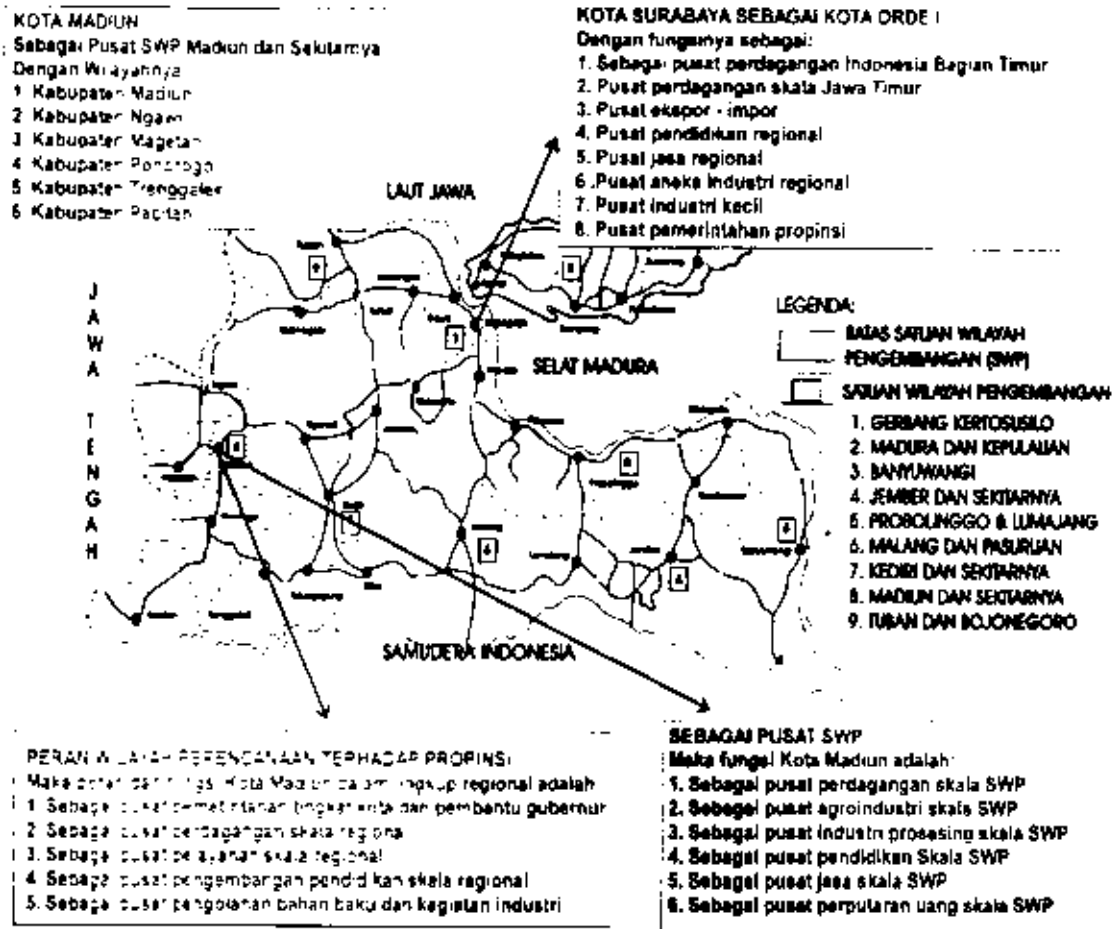
#### 2.1. Letak Geografis, Peran dan Fungsi Kota Madiun

Kota Madiun merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Timur yang berada di bagian Barat, terletak di dataran rendah antara  $7^{\circ}$  sampai dengan  $8^{\circ}$  Lintang Selatan atau sepanjang 7,5 km bentang arah selatan, antara  $111^{\circ}$  sampai  $112^{\circ}$  Bentang Timur atau sepanjang 6 km bentang arah timur. Kota Madiun terletak pada simpul jaringan jalan raya regional yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa Timur dengan daerah Jawa Tengah, khususnya Surakarta dan Yogyakarta. Kedudukan Kota Madiun yang merupakan pusat pengembangan wilayah Jawa Timur bagian Barat memiliki kedudukan strategis baik di bidang sosial, ekonomi maupun pendidikan. Kota Madiun memiliki luas 33,23 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km<sup>2</sup>, Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2002, jumlah penduduk Kota Madiun berjumlah 190.823 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 5.742 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan pada tahun 2003, jumlah penduduk sebesar 192.807 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 5.802 jiwa/km<sup>2</sup>, yang tersebar di 3 kecamatan.

- a. Kecamatan Manguharjo, jumlah penduduknya sebanyak 60.224 jiwa dengan kepadatan penduduk 5.998 jiwa/km<sup>2</sup>.
- b. Kecamatan Taman, jumlah penduduknya sebanyak 81.215 jiwa dengan kepadatan penduduk 6.518 jiwa/km<sup>2</sup>.
- c. Kecamatan Kartoharjo, jumlah penduduknya sebanyak 51.368 jiwa dengan kepadatan 4.787 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara administratif wilayah Kota Madiun berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun



Gambar 2.1.  
 Posisi Kota Madiun Sebagai Pusat SWP Madiun dan sekitarnya

Pembangunan penataan ruang dilaksanakan melalui program penataan ruang dan pertanahan. Selain itu, pembangunan penataan ruang juga terkait dengan program pembangunan kawasan khusus dan program pembangunan prasarana perkotaan. Tujuan program ini adalah mendorong pengembangan wilayah dan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan ruang serta mendukung kelestarian lingkungan hidup.

Pokok – pokok kebijakan pembangunan Jawa Timur yang memiliki kaitan secara langsung dengan Kota Madiun adalah dijadikannya Kota Madiun sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SPW) Jawa Timur bagian Barat dengan wilayah : Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek. Sesuai dengan lokasi, orientasi dan perannya dalam lingkup regional maupun internal Kota Madiun, maka fungsi dan peran Kota Madiun adalah :

- a. Sebagian pusat pemerintahan tingkat kota dan wilayah karesidenan
- b. Sebagai pusat perdagangan skala regional
- c. Sebagai pusat pelayanan umum skala regional
- d. Sebagai pusat pengembangan pendidikan skala regional
- e. Sebagai pusat pengolahan bahan baku dan kegiatan industri.

Arah kebijakannya adalah :

- a. Menyediakan data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi pemanfaatan ruang
- b. Terselenggaranya penataan ruang dengan mekanisme dan prosedur yang standar dan dipedomani secara konsisten oleh semua pihak dan didukung oleh legalitas hukum
- c. Tercapainya peningkatan pemahaman dalam bidang penataan ruang bagi aparat dan masyarakat.

## **2.2. Rencana Tata Ruang Wilayah**

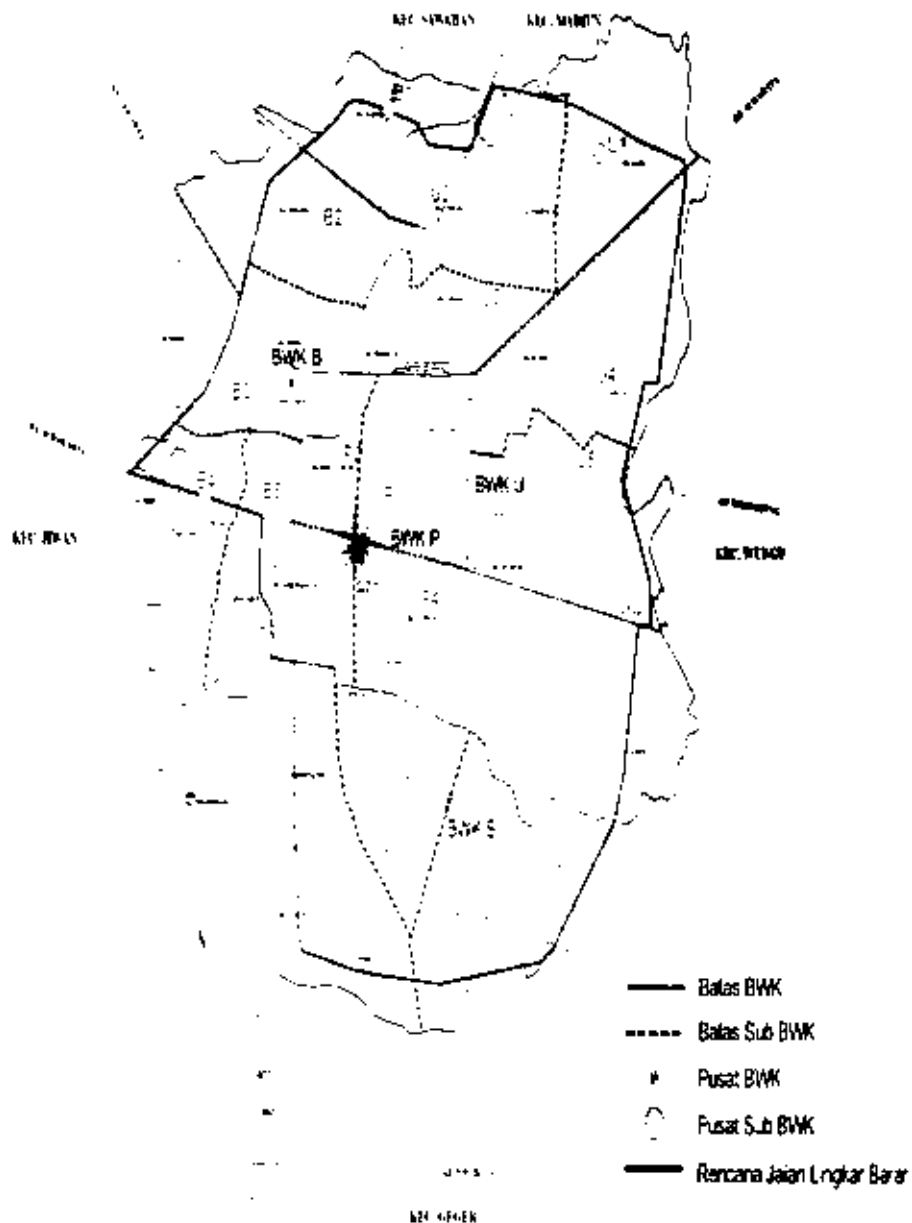
Berdasarkan peran dan fungsi Kota Madiun sebagai pusat SWP Jawa Timur bagian Barat, maka telah ditetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digunakan sebagian dasar dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Madiun. Melalui Perda ini diharapkan :

- a. Adanya konsisten dan kesinambungan program – program pembangunan di Wilayah Kota Madiun.
- b. Agar RTRW tetap berfungsi sebagai pedoman dan arahan pembangunan di daerah, khususnya dalam hal penetapan lokasi – lokasi proyek pembangunan.
- c. Mempertahankan fleksibilitas dan kedinamisan rencana tata ruang kota sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perkembangan kota.
- d. Mendayagunakan RTRW sebagai alat untuk menyusun program – program pembangunan secara optimal dalam jangka waktu 10 tahun dan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang kota secara tepat.
- e. Mefungsikan RTRW agar dapat menampung perkembangan dan dinamika kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota.

Struktur pusat pelayanan Kota Madiun direncanakan dengan menetapkan pusat kota dan bagian wilayah kota, sebagai berikut :

- a. Pusat Kota Madiun diarahkan disekitar Bagian Wilayah Kota *Pusat*, dengan pusat kegiatan di sekitar alun-alun, Jl. Pahlawan, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Agus Salim atau wilayah yang berada di pusat Bagian Wilayah Kota *Pusat*. Bagian Wilayah Kota Madiun *Pusat*, dibagi menjadi 4 (empat) Sub Bagian Wilayah Kota yaitu Sub BWK P1, Sub BWK P2, Sub BWK P3 dan Sub BWK P4. BWK *Pusat* ini diarahkan sebagai pusat pelayanan sekitar wilayah Kota Madiun / skala regional.
- b. Bagian Wilayah Kota *Selatan*, dibagi lagi menjadi 4 (empat) Sub BWK S1, Sub BWK S2, Sub BWK S3 dan Sub BWK S4. Pusat BWK diarahkan sebagai pusat pelayanan skala BWK dan skala regional
- c. Bagian Wilayah Kota *Utara* dibagi menjadi 5 (lima) sub BWK, yaitu Sub BWK U1, Sub BWK U2, Sub BWK U3, Sub BWK U4 dan Sub BWK U5. Pusat BWK *Utara* diarahkan sebagai pusat pelayanan skala BWK dan regional
- d. Bagian Wilayah Kota *Barat* dibagi menjadi 5 (lima) sub BWK, yaitu Sub BWK B1, Sub BWK B2, Sub BWK B3, Sub BWK B4 dan Sub BWK B5. Pusat BWK *Barat* diarahkan sebagai pusat pelayanan skala BWK (Sumber : Revisi RTRW, 2002)





Gambar 2.2.

Pusat kota dan Bagian Wilayah Kota

Adapun lokasi pusat perdagangan, jasa dan pendidikan yang merupakan fungsi dan peran Kota Madiun sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2002 – 2012 sebagai berikut :

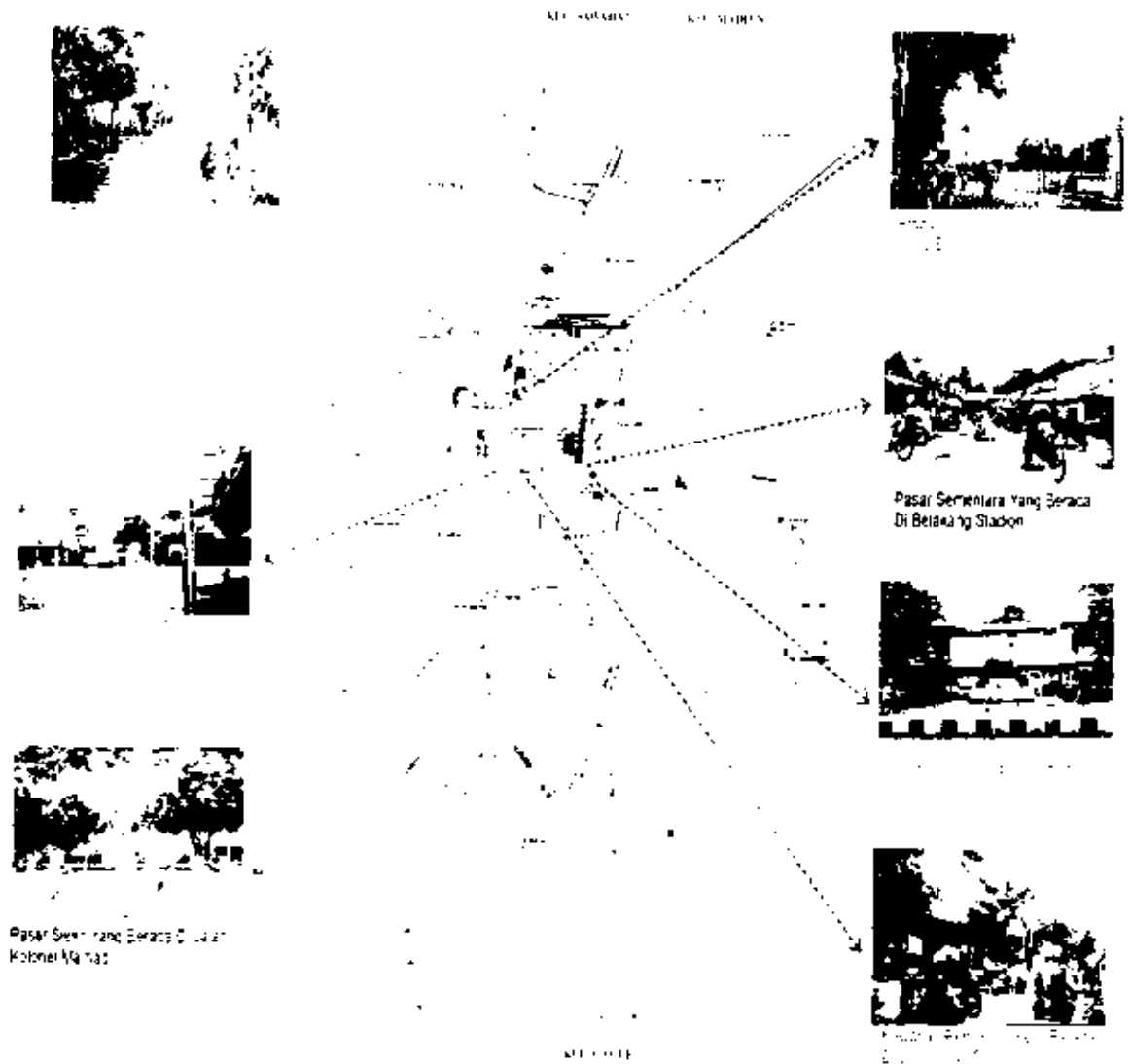
**Kota Madiun**

**2.2.1. Pusat Perdagangan**

Fungsi kegiatan yang menonjol dan mempengaruhi struktur ruang Kota Madiun adalah kegiatan Perdagangan, dimana jenis perdagangan yang ada yaitu :

- 1) Kegiatan perdagangan campuran yang berupa pertokoan (seperti gamen, elektronik, showroom, bank dan jasa lainnya)
- 2) Kegiatan perdagangan skala besar
- 3) Kegiatan perdagangan berupa pusat perbelanjaan, seperti : Plasa Matahari dan Plasa Sri Ratu di Jl. Pahlawan, Presiden Plasa di sekitar alun-alun kota dan Pasar Besar di Jl. Jendral Sudirman.

Dengan melihat jenis kegiatan perdagangan tersebut, tampaknya dapat dikembangkan menjadi kegiatan perdagangan dengan skala pelayanan regional sesuai dengan fungsi dan peranan Kota Madiun sebagai pusat perdagangan SWP Madiun dan sekitarnya.



Sumber: Revisi RTRW, 2002

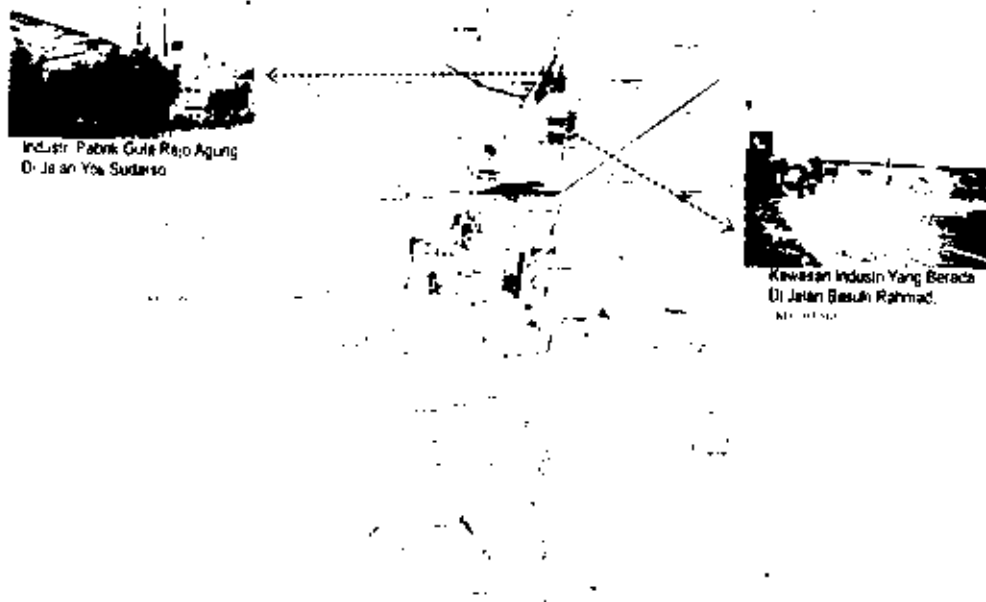
Gambar 2.3.  
Arahan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

2.2.2. Pusat Industri

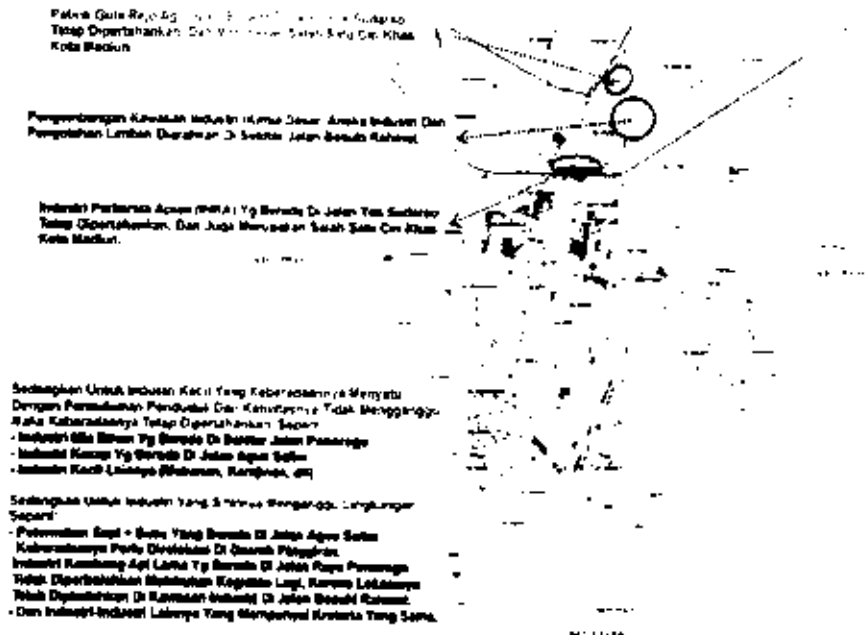
Kegiatan industri, dimana berdasarkan kondisi eksisting di Kota Madiun saat ini sudah terdapat lokasi industri, baik industri besar, sedang dan industri kecil, yaitu sebagai berikut :

- a. Industri besar di Jl. Yos Sudarso (Industri Gula Rejo Agung Baru, Industri Kereta Api / PT. INKA) dan kawasan industri di Jl. Basuki Rahmad,
- b. Industri sedang dan industri kecil yang keberadaannya cenderung menyebar bercampur dengan pemukiman penduduk.

Keberadaan industri besar tersebut sampai saat ini mampu mengangkat perekonomian wilayah. Apabila kegiatan industri lainnya dapat berkembang, maka tentunya kegiatan industri ini dapat menimbulkan kegiatan lainnya yang dapat memacu perkembangan wilayah Kota Madiun. Adanya kawasan industri akan dapat mendukung pengembangan kegiatan industri di wilayah ini, disertai pemberian kemudahan oleh pemerintah untuk menarik investor.



- Kembangkan Industri Kecil yang Berada di Dalam Kawasan yang Belum Terselesaikan Mengembangkan Kawasan Terpadu dan Terselesaikan Industri yang Mengganggu Lingkungan Di Kawasan Industri yang Berada Di Jalan Bekasi Rahmad Husni
- Industri Kandang Ayam yang Berada Di Jalan Pahlawan dan Jalan Buar Rumpeng serta Industri Kembang Kertas Industri Tahan Di Retokas Di Kawasan Industri Di Jalan Bekasi Rahmad Husni
- Pemukiman Sapi yang Ada Di Nambangan dan Di Jalan Agung dan Di sekitarnya untuk Dindahkan Di Program Kota Yang Baru Perumahan
- Perlu Adanya Usaha-usaha Untuk Menarik Modal Ke Kota Madiun dan Mengembangkan Modal ke Kota Madiun yang Disediakan Dengan Kemudahan Masalah Kemudahan Dalam Perumahan Perumahan dan lain-lain Sehingga Akan Menambah Peluang Investasi Bagi Masyarakat Dan Membantu Komposisi Pada Pemerintah di dalam hal ini Dengan Pendekatan Pendekatan Aspek Daerah P40



**Pabrik Gula Rayo Agung Di Jalan Yos Sudarso di Kawasan Terpadu**  
 Tetap Diperhatikan dan Walaupun Tidak Khusus Kota Madiun

**Pengembangan Kawasan Industri di Kawasan Industri dan Pengolahan Limbah Diarahkan ke Kawasan Bekasi Rahmad Husni**

**Industri Perikanan Air Laut (IPAL) Yang Berada Di Jalan Yos Sudarso**  
 Tetap Diperhatikan dan Juga Harus ada Sisi Lain Kota Madiun

**Sedangkan Untuk Industri Kecil yang Keberadaannya Menyatu dengan Pemukiman Penduduk dan Keberadaannya Tidak Mengganggu Jika Keberadaannya Tetap Diperhatikan Seperti**

- Industri Gula Batu yang Berada Di Jalan Pasareng
- Industri Kandang Ayam yang Berada Di Jalan Agus Seto
- Industri Kecil Lainnya (Bubun, Kerupuk, dll)

**Sedangkan Untuk Industri yang Sudah Mengganggu Lingkungan Seperti**

- Pemukiman Sapi - Sapi yang Berada Di Jalan Agus Seto
- Keberadaannya Perlu Dihilangkan Di Daerah Pinggiran
- Industri Kandang Ayam Laut yang Berada Di Jalan Agus Seto
- Tetap Diperhatikan kebutuhan Kandang Layar, Kawasan Lainnya
- Tetap Diperhatikan Di Kawasan Industri Di Jalan Bekasi Rahmad Husni
- Dan Industri Industri Lainnya yang Mempunyai Karakter yang Sama

Sumber : Revisi RTRW, 2002.

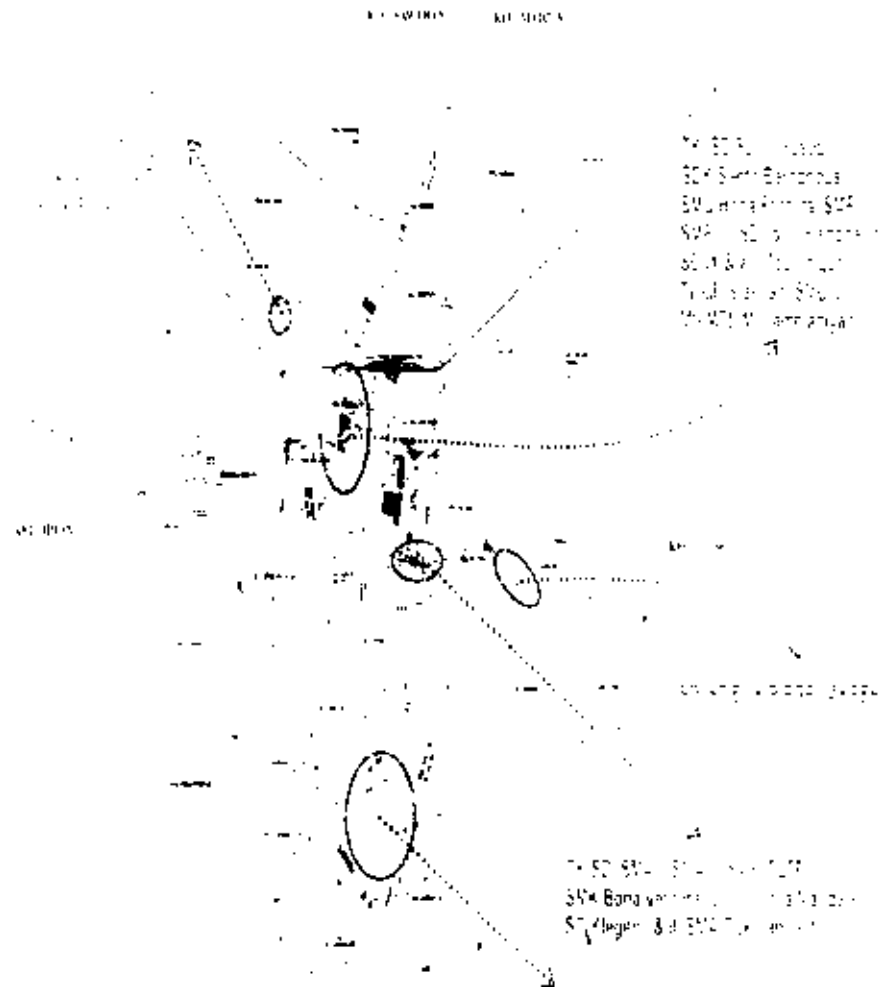
Gambar 2.4. Lokasi Industri dan Pergudangan

### 2.2.3. Pusat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan dalam kualitas manusia. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang maka dapat dipastikan akan semakin tinggi juga kualitas orang tersebut. Melalui pendidikan, maka pengetahuan, kecerdasan dan ketrampilan seseorang akan berkembang.

Pengembangan pendidikan di Kota Madiun saat ini diperlukan termasuk Pengembangan Pendidikan Tinggi, Sekolah Menengah Unggulan agar dapat melayani penduduk Madiun dan sekitarnya dalam hal kegiatan pendidikan.

Pengembangan Pendidikan Unggulan SMU yang diarahkan di sekitar Ring Road barat dan Kelun yang nantinya diharapkan akan mampu merangsang perkembangan Wilayah Utara dan Barat



Salah satu upaya untuk merangsang perkembangan Kota Madiun dengan cara mengembangkan pendidikan

- a. Pengembangan Perguruan Tinggi Di BWR Barat
- b. Pengembangan Pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK Sebagai Pendidikan unggulan

Dengan Demikian maka Kota Madiun mampu menarik minat masyarakat untuk belajar di Kota Madiun.

UNIVERSITAS Muhammadiyah (UMH) di Kota Madiun SMU

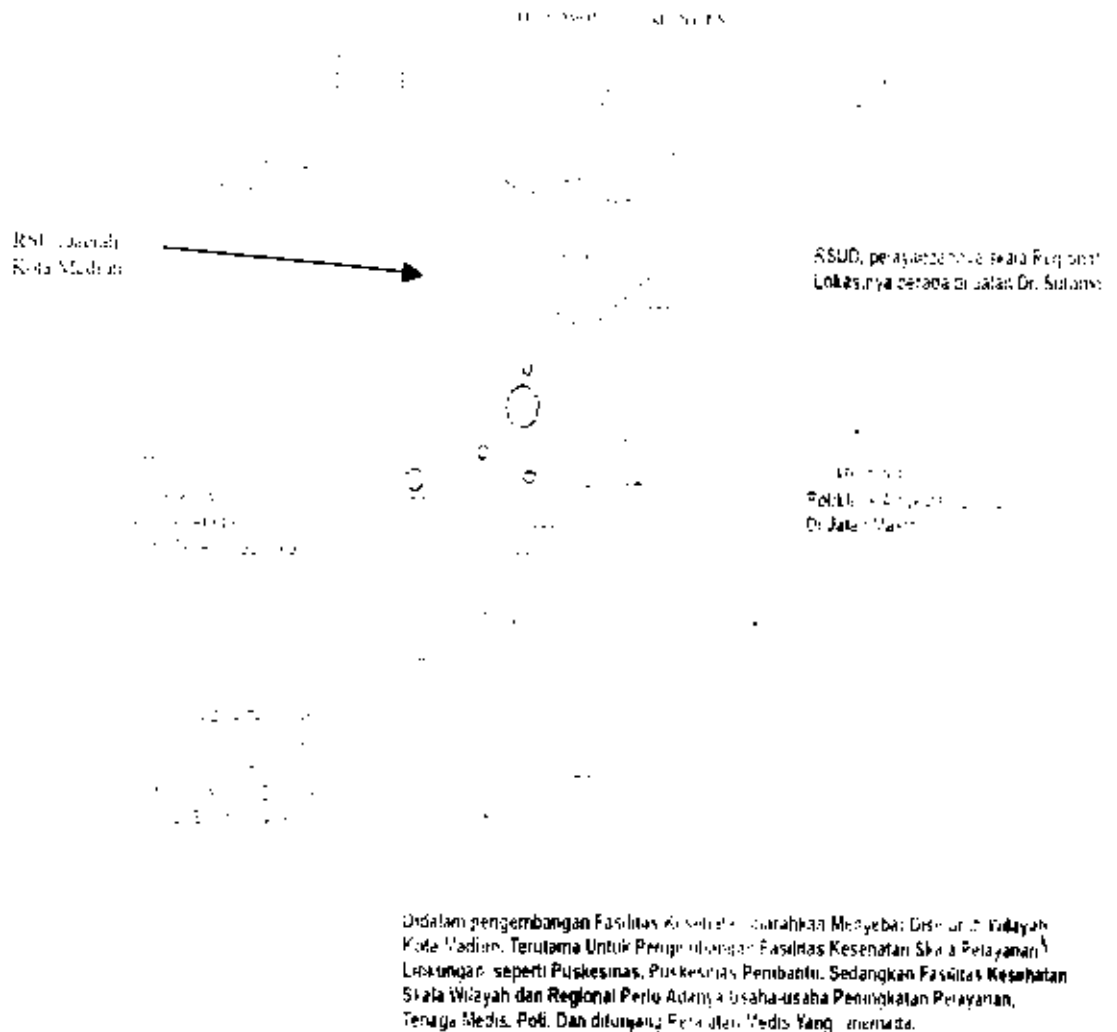
Gambar 2.5. Pengembangan Fasilitas Pendidikan

#### 2.2.4. Pusat Pelayanan Kesehatan

Sebagai pusat pelayanan umum skala regional, Kota Madiun perlu juga mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat melayani daerah hinterland Madiun.

Pelayanan kesehatan ini diperlukan, khususnya terhadap penyakit yang memerlukan penanganan dokter spesialis, semisal rumah sakit orthopedi (tulang) Solo, sehingga masyarakat yang selama ini berobat ke Solo dan Surabaya dapat dilayani di wilayah Kota Madiun. Adapun lokasi yang direncanakan untuk pusat pelayanan kesehatan sebagai berikut :





**Gambar 2.6. Pengembangan Fasilitas Kesehatan**

### 2.2.5. Rencana Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Kebijaksanaan kependudukan merupakan faktor yang penting dalam proses Rencana Tata Ruang Wilayah karena semua kebijaksanaan yang lain harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan penduduk Kota Madiun.

Untuk rencana distribusi dan kepadatan penduduk di Kota Madiun akan dibagi dalam lingkup Bagian Wilayah Kota (BWK), yang disesuaikan dengan urban skenario dalam pengembangan wilayah Kota Madiun. Skenario distribusi penduduk Jadi, rencana distribusi dan kepadatan penduduk tidak hanya berdasarkan perkiraan dengan menggunakan pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Madiun, tetapi juga disesuaikan dengan rencana pemanfaatan ruang yang ada di tiap wilayah dan mempertimbangkan kemungkinan adanya penambahan penduduk akibat adanya rencana pengembangan wilayah kota berupa pengadaan fasilitas-fasilitas khusus yang diasumsikan dapat mendorong laju pertumbuhan wilayah.

Dalam pendistribusian penduduk di masa mendatang sangat dipengaruhi adanya skenario pengembangan wilayah kota, dimana untuk Kota Madiun skenario tersebut meliputi :

a. Pengembangan wilayah pusat kota (BWK P) :

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa khususnya yang berupa perdagangan grosir dan perdagangan skala besar dengan skala pelayanan regional (Madiun dan sekitarnya). Sehingga selain mampu melayani wilayah skala kota juga akan mampu melayani wilayah skala SWP Madiun dan Sekitarnya.

b. Pengembangan wilayah Utara (BWK U) :

- 1) Pengembangan kawasan industri di sekitar Jalan Basuki Rahmad.
- 2) Pengembangan fasilitas pendidikan unggulan (SMU unggulan yang berbasis pada keagamaan yang mengarah ke pesantren).
- 3) Pengembangan kawasan permukiman berupa perumahan yang dibangun oleh developer dan juga oleh masyarakat sendiri/secara individu.
- 4) Adanya arahan pengembangan sirkuit di sekitar Kelurahan Kelun.
- 5) Pengembangan jalan lingkar utara-timur, sehingga aksesibilitas ke wilayah utara akan menjadi lebih strategis.

c. Pengembangan wilayah Selatan (BWK S) :

- 1) Pengembangan kawasan perkantoran di sekitar Jalan Mayjen. Panjaitan, sehingga akan mempermudah koordinasi antar instansi/dinas.
- 2) Adanya kawasan pendidikan Perguruan Tinggi yang lokasinya berada di sekitar Jalan Serayu dan Jalan Mayjend. Panjaitan.
- 3) Pengembangan permukiman yang mengarah ke bentuk perumahan yang dikembangkan oleh pengembangan/developer.

4) Pengembangan jalan lingkar timur-selatan, dan diharapkan akan mampu pemeratakan perkembangan fisik kota arah timur pusat kota.

d. Pengembangan wilayah Barat (BWK B) :

1) Pembangunan jalan lingkar Utara-Barat, yang merupakan akses utama (jalan arteri primer), sehingga arus kendaraan dari arah barat/jawa tengah tidak melalui pusat kota. Selain itu dengan adanya pengembangan jalan lingkar utara-barat diharapkan akan mampu merangsang perkembangan wilayah barat pusat kota.

2) Pembangunan perguruan tinggi negeri.

3) Pembangunan Puskesmas Plus.

4) Pengembangan permukiman, baik perumahan yang dikembangkan oleh developer maupun yang dikembangkan secara individu/pribadi.

Dengan adanya skenario pengembangan wilayah diatas, maka untuk pendistribusian penduduk ke Bagian Wilayah Kota didasarkan pada skenario distribusi penduduk sebagai berikut :

1) Distribusi penduduk diarahkan ke BWK Barat, Utara dan Selatan, sedangkan untuk BWK Pusat tidak dilakukan penambahan mengingat BWK Pusat di masa mendatang diarahkan untuk kawasan perdagangan dan jasa sehingga

pertumbuhan penduduknya cenderung menurun. Pendistribusian tersebut juga untuk mencegah terjadinya kepadatan penduduk yang berlebihan di BWK Pusat yang akan menimbulkan dampak penurunan kualitas lingkungan.

- 2) Distribusi penduduk di tiap BWK sesuai skenario pengembangan wilayah dipengaruhi oleh ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk kawasan terbangun khususnya permukiman dan arahan jenis kegiatan yang akan dikembangkan di tiap BWK.

Dengan demikian maka direncanakan jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2007 mencapai 218.512 jiwa dan pada tahun 2012 mencapai 237.296 jiwa, sedangkan untuk distribusi penduduk yang direncanakan di tiap BWK dapat dilihat di **Rencana Distribusi dan Kepadatan Penduduk Tiap BWK** di bawah ini.

Tabel 2.1. Rencana Distribusi dan Kepadatan Penduduk Tiap BWK Tahun 2007 dan 2012

BWK	Jumlah Penduduk (jws)			Kepadatan Penduduk (jws/ha)		
	Thn 2000	Thn 2007	Thn 2012	Thn 2002	Thn 2007	Thn 2012
<b>1. BWK P</b>						
Sub BWK P1	16705	16821	16738	103	104	104
Sub BWK P2	5802	5842	5814	106	106	106
Sub BWK P3	12883	12972	12908	146	147	146
Sub BWK P4	22628	22785	22674	157	158	157
Jumlah	58018	58420	58134	129	130	129
<b>2. BWK B</b>						
Sub BWK B1	3268	4604	5414	32	45	53
Sub BWK B2	5500	9455	11885	29	49	62
Sub BWK B3	7630	14204	18255	35	65	84
Sub BWK B4	3867	4561	4966	28	33	35
Sub BWK B5	4621	5324	5729	34	39	42
Jumlah	24886	38148	46249	32	48	59
<b>3. BWK U</b>						
Sub BWK U1	4388	7878	10233	24	42	55
Sub BWK U2	5960	6890	7479	28	32	35
Sub BWK U3	6055	6557	6851	46	50	52
Sub BWK U4	12445	15815	18023	51	64	73
Sub BWK U5	14817	15638	16079	59	62	64
Jumlah	43665	52778	58665	42	51	57
<b>4. BWK S</b>						
Sub BWK S1	18624	20176	21192	65	70	74
Sub BWK S2	7124	10537	13078	34	50	63
Sub BWK S3	13086	14573	15589	83	93	99
Sub BWK S4	22941	23880	24389	94	98	100
Jumlah	61775	69166	74248	69	77	83
<b>Total</b>	<b>188344</b>	<b>218512</b>	<b>237298</b>	<b>59</b>	<b>69</b>	<b>75</b>

Sumber : Rencana RTRW

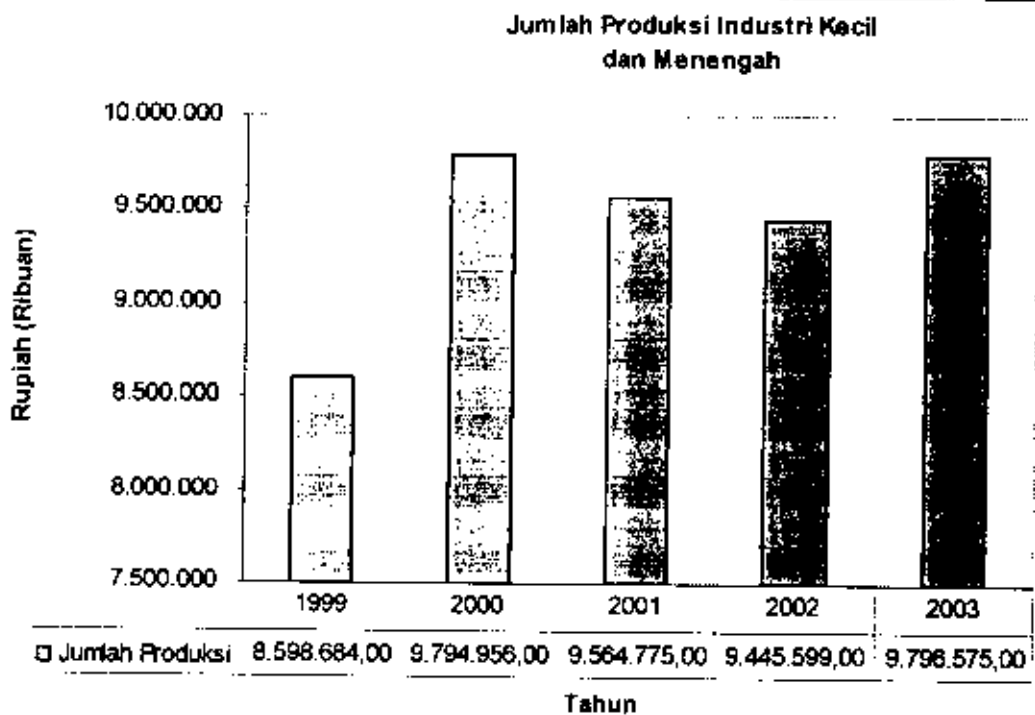
### **2.3. Gambaran Umum Potensi Daerah**

Sesuai dengan core area Kota Madiun yang merupakan Satuan Wilayah Pengembangan Jawa Timur bagian Barat, Bidang industri dan perdagangan dan jasa, sangat potensial dikembangkan khususnya dalam mengantisipasi meningkatnya kebutuhan barang-barang dan jasa daerah hinterland. Berbagai program pembangunan diprioritaskan pada pembangunan infra struktur yang dapat menimbulkan multiplier effect terhadap pendapatan masyarakat Kota. Arah kebijakan umum lebih menekankan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kota yang berbasis pada kekuatan pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi serta adanya kemitraan dengan pengusaha besar yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja.

#### **2.3.1. Pertumbuhan Usaha Industri Kecil dan Menengah**

Produksi pada industri kecil dan menengah didominasi oleh Industri pengolahan makanan. Beberapa program pemerintah kota memberikan dampak sangat penting pada peningkatan produksi pada industri ini, diantaranya program pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah dan program peningkatan kemampuan teknologi industri. Adapun perkembangan produk dari tahun ketahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.1. :

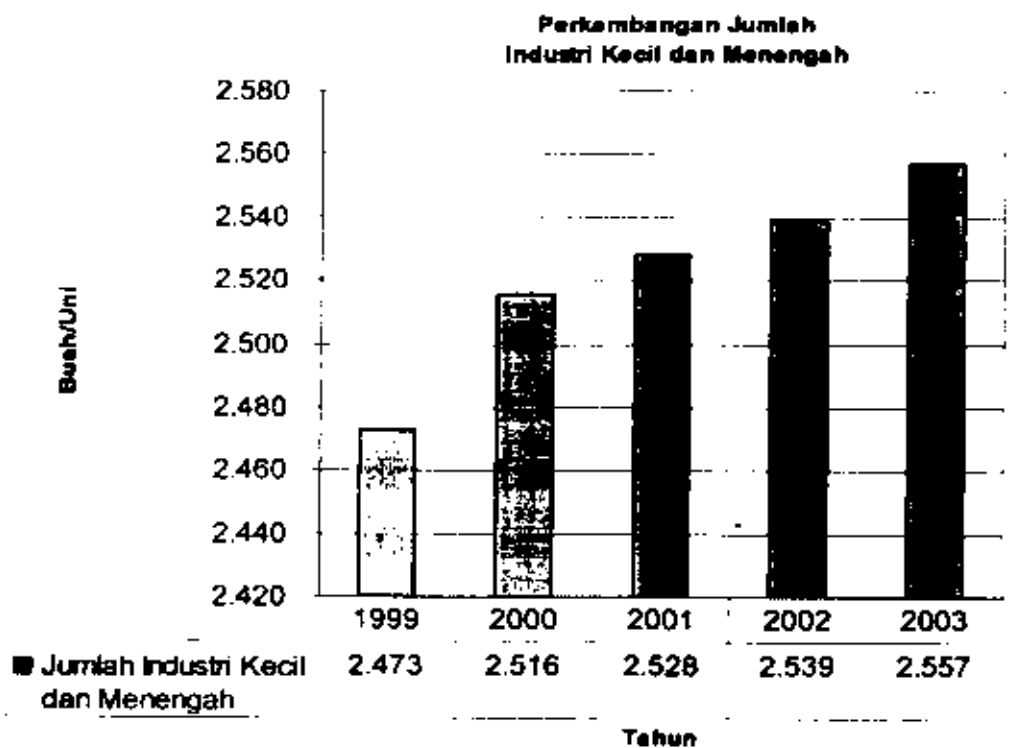


*Sumber data : Disperindata*

Variabel lain yang tidak kalah pentingnya untuk mengukur efektivitas program pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah dan program peningkatan kemampuan teknologi industri adalah indikator perkembangan jumlah industri kecil dan menengah di kota Madiun, meskipun sangat disadari bahwa perkembangan jumlah industri ini lebih banyak didominasi oleh sektor informal, namun sektor ini memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi, oleh karena itu pemerintah kota menaruh perhatian yang sangat serius terhadap sektor ini karena laju pertumbuhannya dari tahun ketahun makin tinggi.



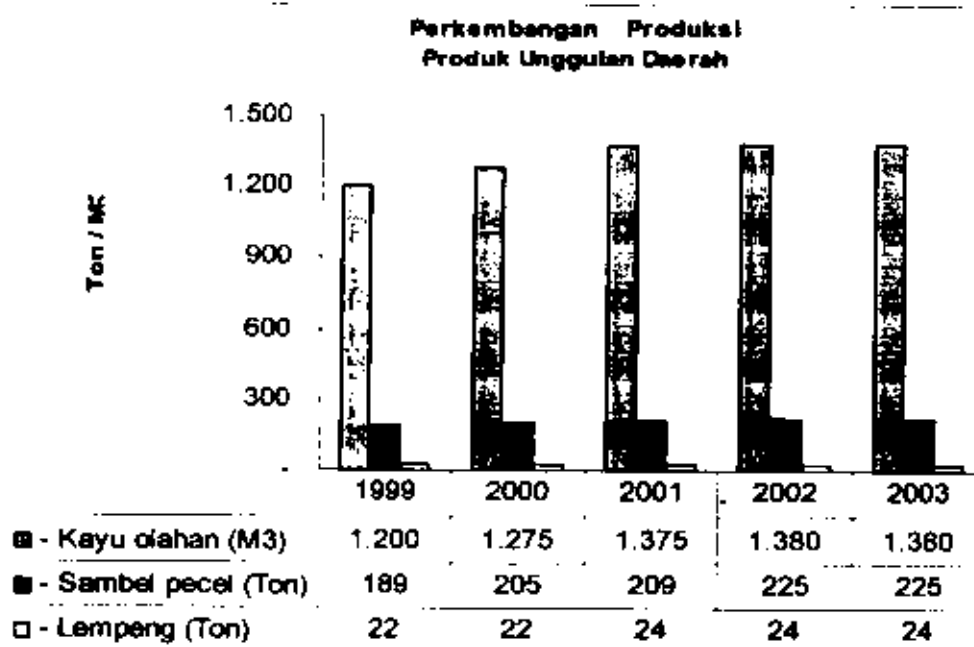
Grafik 2.2. :



Sumber data : Disperindata

Komoditas unggulan daerah masih didominasi oleh industri pengolahan kayu, sambel pecel dan lempeng. Komoditas kayu ada relevansinya dengan daerah hinterland khususnya Kabupaten Madiun yang memiliki potensi produksi hasil budidaya hutan dengan perkembangan produksi kayu olahan dari tahun-ketahun relatif stabil berkisar rata-rata 1.300 m<sup>3</sup> per tahun. Selanjutnya produksi pengolahan makanan rata-rata untuk sambel pecel 210 ton per tahun dan lempeng 23 ton per tahun.

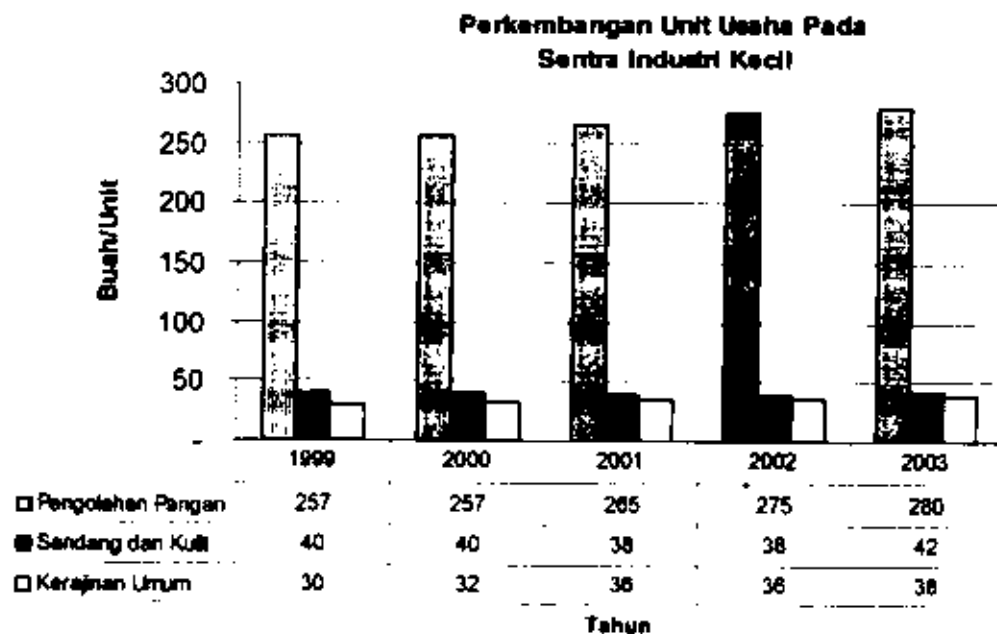
Grafik 2.3. :



*Sumber data : Disperindata*

Jenis sentra industri kecil merupakan indikator hasil dari upaya defersifikasi usaha. Dari sisi jumlah komposisi jenis sentra industri, maka industri pengolahan makanan dari tahu-ketahu menempati posisi tertinggi dibanding industri kecil lainnya. Defersifikasi usaha tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan terhadap perubahan pasar.

Grafik 2.4. :

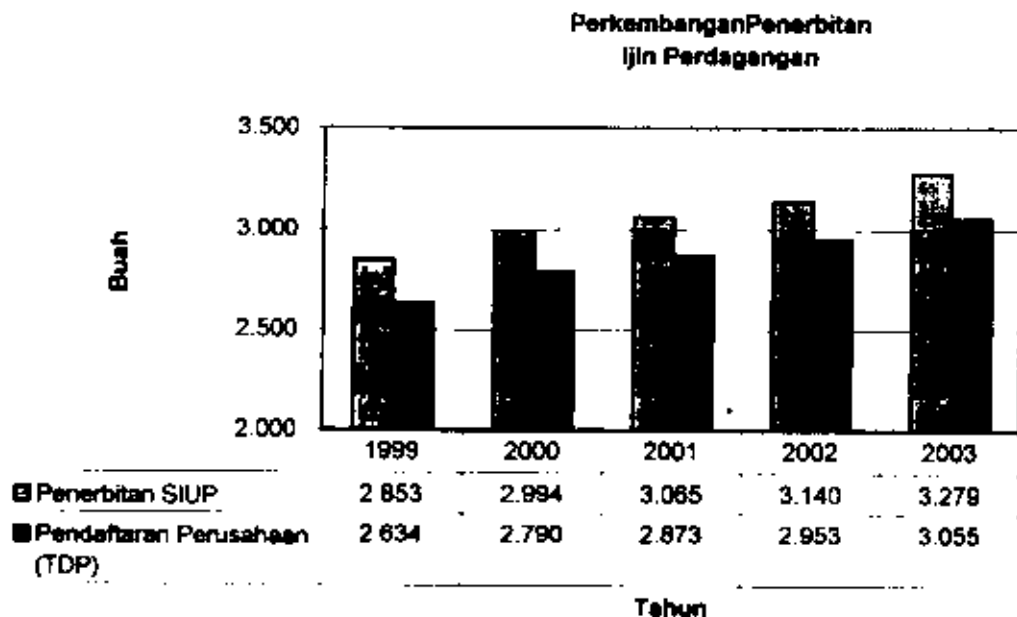


*Sumber data : Disperindata*

### 2.3.2. Perkembangan Sektor Perdagangan

Pembangunan sektor perdagangan yang dilaksanakan selama ini diarahkan pada penyederhanaan prosedur dan sistem perijinan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memacu peningkatan perdagangan di tingkat lokal. Kinerja pembangunan perdagangan secara mikro dapat dilihat dari perkembangan penerbitan ijin perdagangan yang dari tahun-ketahun menunjukkan peningkatan. Indikator kinerja perkembangan penerbitan ijin dapat dilihat dari pengeluaran ijin perdagangan dari penerbitan SIUP dan Pendaftaran Perusahaan sebagai berikut :

Grafik 2.5. :



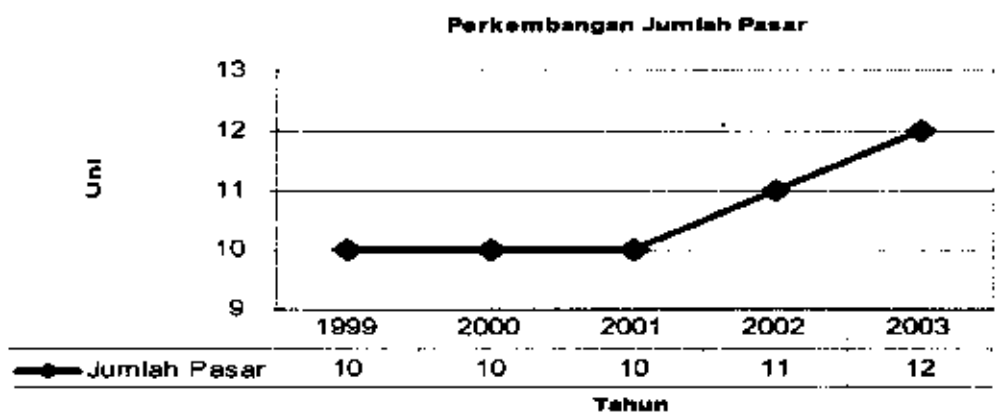
*Sumber data : Disperindata*

Pengelolaan fasilitas perdagangan diantaranya adalah pengelolaan pasar. Pasar diartikan sebagai pusat transaksi usaha dalam hal ini adalah pasar tradisional yaitu transaksi usaha untuk golongan usaha kecil dan menengah. Berdasarkan data dari Dinas Pasar kota Madiun jumlah pasar yang ada di Madiun selama 5 (lima) tahun bertambah dari 10 (sepuluh) unit pasar menjadi 12 unit pasar. Seiring dengan penambahan pasar tersebut daya tampung pasar juga mengalami peningkatan dari tahun 1999 yaitu sebanyak 3.119 pedagang menjadi 4.515 pedagang pada tahun 2003, atau naik sebesar 44,76 %.

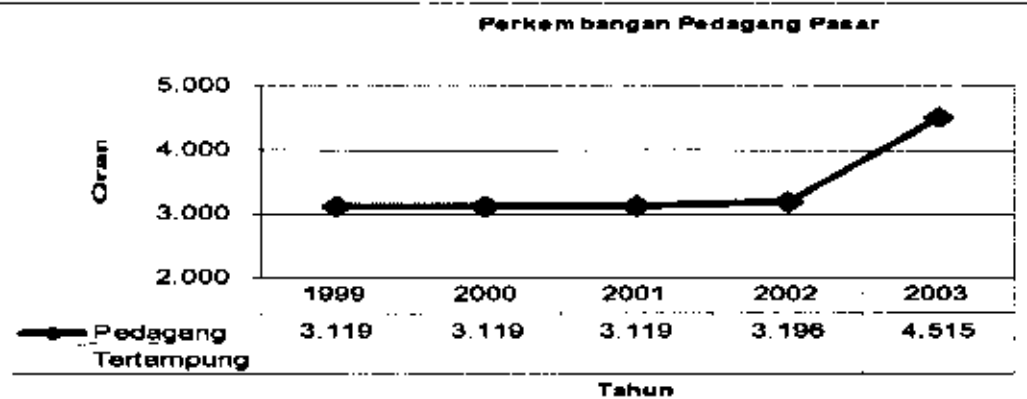
**Strategi Program (SP)**

Dampak dari kenaikan tersebut adalah menaikkan jumlah pendapatan Retribusi Pasar sebesar 55,23 % sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 2.6. :



Grafik 2.7. :



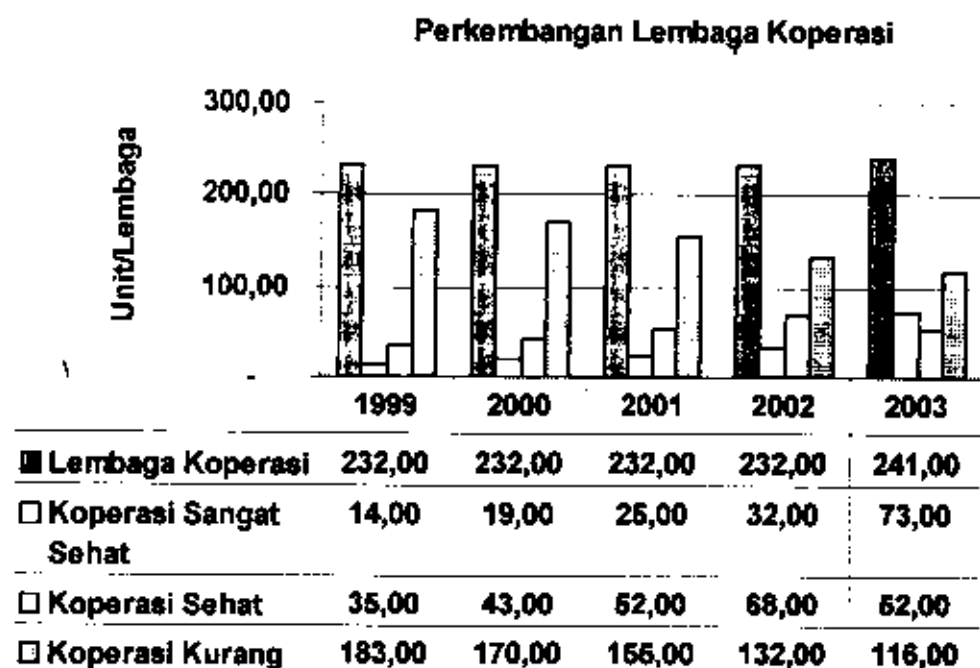
*Sumber Data: Dinas Pasar*

### **2.3.3. Perkembangan Perkoperasian**

Pembangunan bidang kopersal dan pengusaha kecil lebih diarahkan peningkatan kualitas koperasi dari pada kuantitas. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan Koperasi dan PKM sebagai lembaga usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri, produktif, maju, profesional berwawasan lingkungan sesuai jati dirinya dan berperan dalam perekonomian rakyat. Sehubungan dengan itu, maka kegiatan pembangunan diprioritaskan pada penciptaan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja melalui kegiatan pembinaan usaha kecil formal dan informal yang dilakukan dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, peningkatan permodalan dan kelembagaan serta pelatihan manajemen. Semangat koperasi telah dicanangkan sejak tahun 1985 dengan semboyan " Madiun Sebagai Kota Koperasi". Perkembangan jumlah koperasi dari tahun ke tahun tidak menunjukkan pertambahan. Berdasarkan klasifikasi fungsional jumlah koperasi tersebut masih didominasi oleh koperasi yang dibangun dari birokrasi baik dari kalangan pegawai negeri maupun TNI. Meskipun dari segi jumlah tidak menunjukkan pertambahan namun dari omset penjualan, dana cadangan dan sisa hasil usaha menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun tingkat ketergantungan dari dana pemerintah masih cukup tinggi.

Jumlah kelembagaan koperasi dari tahun ketahun menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Namun apabila dilihat dari kualitas struktur kelembagaanya mengalami peningkatan dengan ditunjukkan dari makin menurunnya Koperasi dalam kategori kurang sehat dan naiknya Koperasi dengan kategori sehat dan sangat sehat.

Grafik 2.8. :



Sumber Data: Kantor Koperasi dan PKM

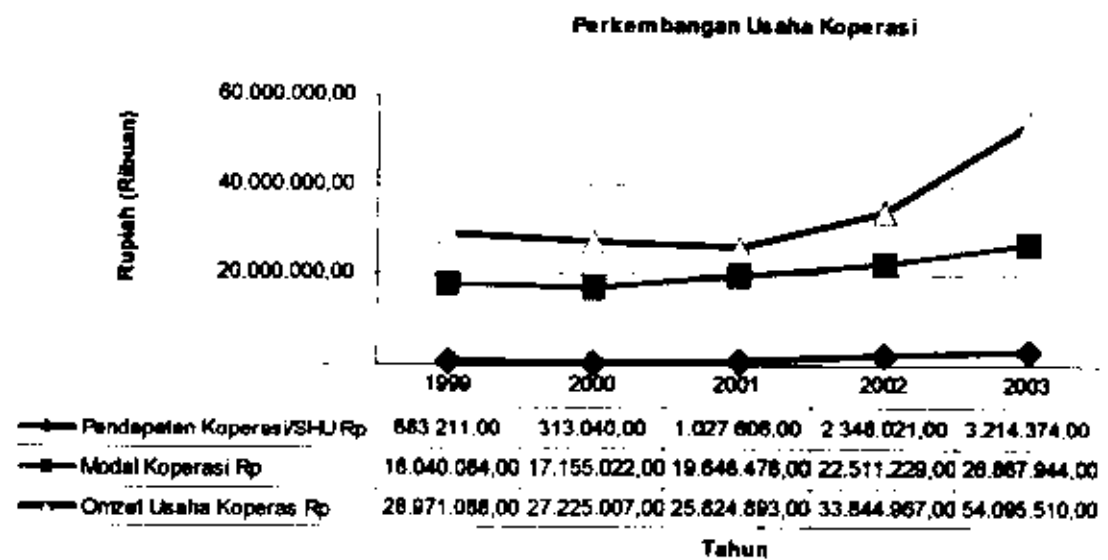
Dampak krisis ekonomi yang berawal sejak tahun 1997 juga berpengaruh terhadap kinerja koperasi. Walaupun koperasi masih mampu bertahan, namun karena ketatnya persaingan usaha ketika itu secara berangsur-angsur omset usaha koperasi menurun juga. Segala

upaya pembinaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan sampai dengan pertengahan tahun 2001 hanya mampu untuk mempertahankan eksistensi koperasi (survival). Baru mulai akhir tahun 2001 dengan pembinaan yang intensif mulai menampakkan kondisi yang menggembirakan. Secara umum usaha koperasi sudah mulai berkembang kembali. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan omset usaha koperasi yang cukup signifikan pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2002 dan 2003. Dengan meningkatnya omset usaha koperasi ini berarti pelayanan dan kesejahteraan anggota meningkat pula.

Perkembangan koperasi tersebut tidak lepas dengan peranan Pemerintah melalui Pinjaman Dana Bergulir yang dari tahun ketahun terus meningkat baik dari segi jumlah penerima pinjaman maupun dari jumlah koperasi penerima bantuan, seperti yang terlihat dalam grafik sebagai berikut :



Grafik 2.9. :



*Sumber Data: Kantor Koperasi dan PKM*

#### 2.3.4. Pertumbuhan ekonomi

Pergerakan indikator bidang ekonomi tidak hanya berkorelasi langsung dengan kepentingan Pemerintah Kota selaku eksekutor kebijakan publik, namun juga seiring dengan peran dan kondisi faktor-faktor produksi sektor swasta dan masyarakat selaku pelaku usaha. Berbagai peran pemerintah kota memacu pergerakan laju pertumbuhan meliputi penyediaan barang dan jasa publik telah diuraikan pada masing-masing Bidang Kewenangan, diantaranya indikator pelayanan ijin usaha dan indikator penyediaan barang-barang di sektor distribusi : terminal, jalan dan tempat-tempat usaha (pasar) dan dalam bentuk regulasi. Adapun peran sektor swasta

dapat terlihat dari kemampuan pengelolaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Tidak kalah pentingnya pergerakan indikator bidang ekonomi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan data dari BPS kota Madiun tahun 2002 dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik dan BBM mempengaruhi laju inflasi di sektor Listrik dan gas dan Air Bersih sebesar 21,39 %, disusul pengangkutan dan komunikasi sampai dengan 14,93 %.

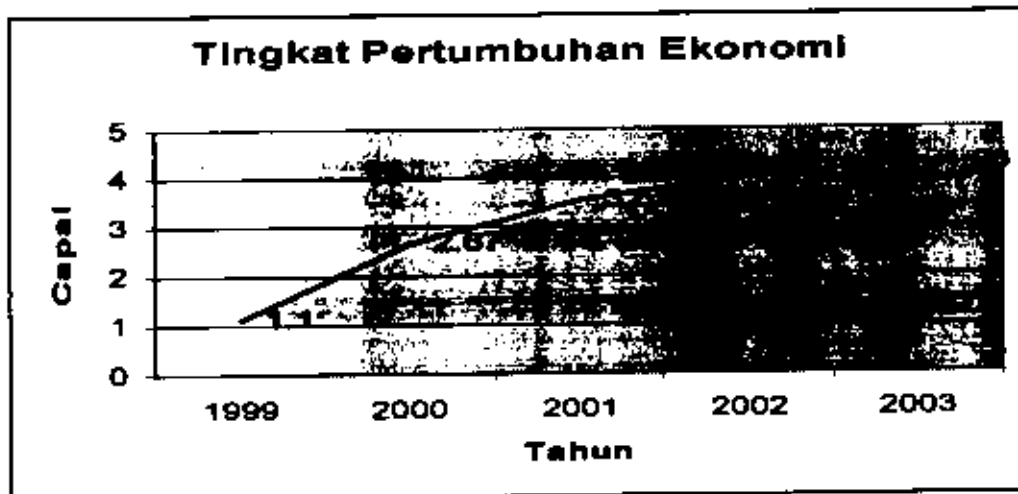
Arah Kebijakan Umum jangka panjang Pemerintah Kota adalah meletakkan pondasi dasar pada pertumbuhan ekonomi kota. Kita bisa berbangga hati, bahwa secara keseluruhan perekonomian Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dimulai dari tahun 1999 pertumbuhan ekonomi kota hanya mencapai 1,1 % bergerak naik 2,67 % pada tahun 2000, yang pada akhirnya pada tahun 2003 mencapai 4,26 %.

Demikian juga dengan PDRB perkapita dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 1999 PDRB perkapita mencapai Rp. 3.564.650,00 dan pada tahun 2003 naik menjadi Rp. 5.944.425. Kontribusi PDRB terbesar berada pada sektor Pengolahan Makanan yang rata-rata tiap tahunnya sebesar Rp. 210 Milyard atau sebesar 27 % dari total PDRB. Sektor ini banyak menampung faktor produksi tenaga kerja yang besar dan menyangkut golongan ekonomi lemah. Sasaran-sasaran stratejik yang menjadi

dasar arah kebijakan umum APBD lebih menekankan pada pemberdayaan kemampuan pelaku usaha kecil dan menengah dengan penyediaan barang dan jasa publik berupa jalan dan jembatan serta sarana perdagangan untuk meningkatkan mobilisasi dan akses pasar. Ini membuktikan bahwa penekanan kebijakan pemerintah kota yang menekankan pada golongan pengusaha kecil dan menengah menunjukkan keberhasilan. Kondisi obyektif lainnya yang perlu disampaikan dalam bab ini adalah perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Income Perkapita daerah hinterland. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2002 di Kabupaten Madiun adalah sebesar 3,47, Kabupaten Magetan 3,44, Kabupaten Ponorogo 3,94, Kabupaten Ngawi 2,98, Kabupaten Pacitan 2,72. Dari seluruh Kabupaten yang menjadi daerah hinterland Kota Madiun relatif masih lebih tinggi dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,26 pada tahun 2003. Demikian juga untuk Income Perkapita (Pendapatan Perkapita) pada tahun 2003 di Kabupaten Madiun adalah masing-masing sebesar Rp 3.295.345,02, Kabupaten Magetan sebesar Rp 3.035.270,26, Kabupaten Ngawi sebesar Rp 2.835.877,63 Kabupaten Pacitan sebesar Rp 1.928.334,39,91, Kota Madiun juga relatif lebih tinggi yaitu sebesar Rp 5.288.459 pada tahun 2002, sedangkan pada tahun 2003 juga mengalami kenaikan sebesar 11,03 % atau menjadi Rp 5.944.425 (Madiun Dalam Angka, 2003).

Dapat disimpulkan perkembangan positif tersebut tidak lepas dari upaya-upaya kita bersama yang secara bahu membahu peduli terhadap peningkatan nilai tambah distribusi barang dan jasa. Seperti kita ketahui seluruh program pembangunan yang telah dilaksanakan dari proses perencanaan dan pelaksanaannya terkonsentrasi pada upaya pengembangan sarana dan prasarana distribusi yang menimbulkan multiplier effect terhadap peningkatan distribusi barang dan jasa, pemberdayaan pelaku usaha, dan peningkatan aktivitas usaha masyarakat secara keseluruhan.

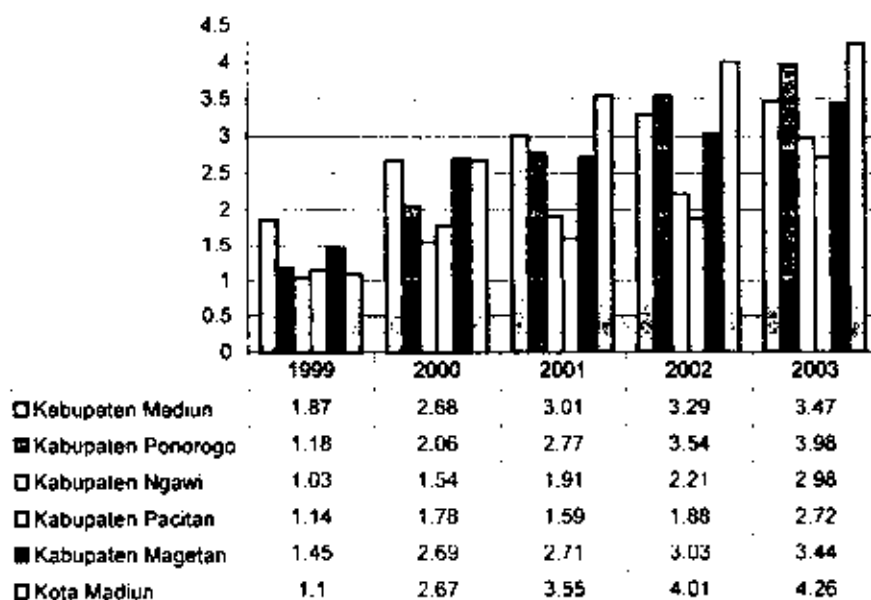
Grafik 2.10. :



Sumber data: BPS kota Madiun

Grafik 2.11. :

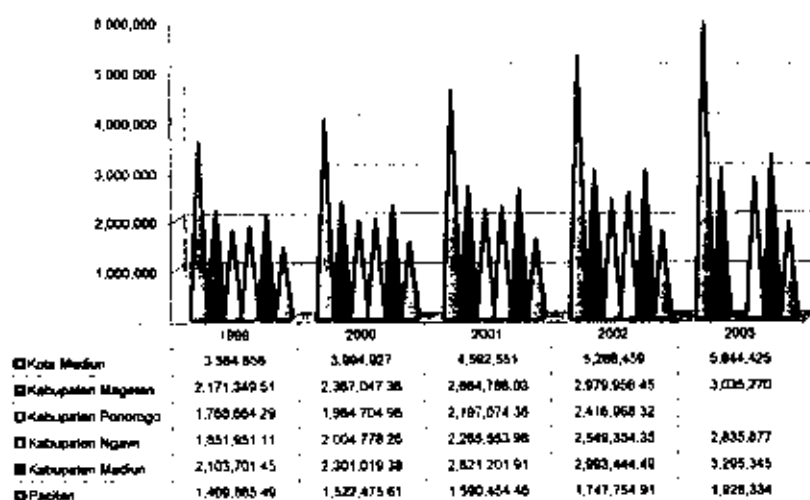
Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dengan Daerah Sekitar



Sumber data: BPS Se Bakorwil Madiun

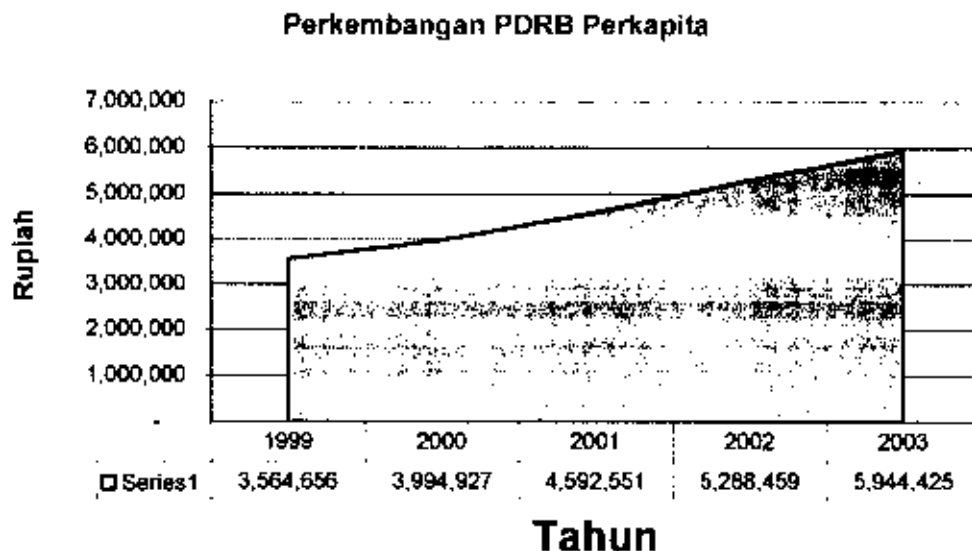
Grafik 2.12.

Perkembangan Pendapatan Perkapita Dibandingkan Dengan Daerah Sekitar



Sumber data: BPS Se Bakorwil Madiun

Grafik 2.13. :



*Sumber data: BPS kota Madiun*

Seperti yang diuraikan dalam UU nomor 22 tahun 1999 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari

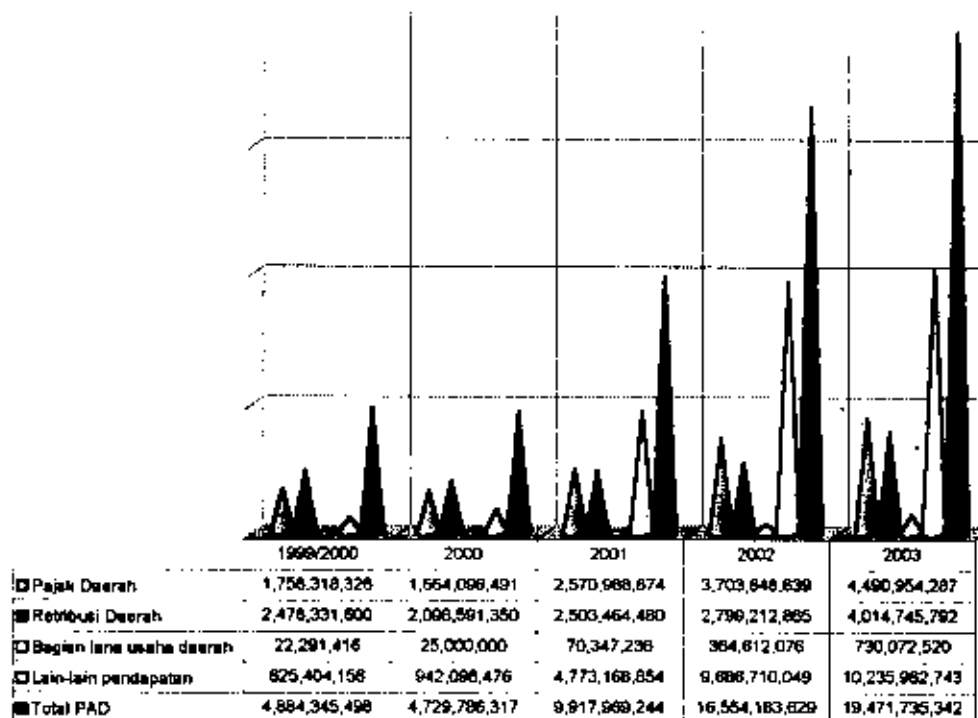
- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah kota didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Perkembangan

kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun atas Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak daerah dan Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebagai berikut :

Grafik 2.14. :

**Pendapatan Asli Daerah Dalam Kurun Waktu 5 Tahun**



*Sumber data : Bagian Keuangan*

Bila dilihat dari grafik di atas perkembangan absolut Pendapatan Asli Daerah dari tahun-ketahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun sangat disadari bahwa secara relatif kontribusi PAD dari lain-lain pendapatan berupa bunga giro dan deposito masih cukup

besar yakni sebesar 50 % dari PAD pada tahun 2001, 2002 dan 2003. Hal tersebut disebabkan kebijakan di sektor keuangan yang berkaitan dengan peningkatan PAD yang sementara ini masih dalam proses pengintegrasian penerapan UU No 22 tahun 1999 secara penuh, yang mana masih ada tarik menarik kepentingan pusat daerah mengenai penggalian potensi daerah. Meskipun begitu secara absolut kontribusi Pajak, Retribusi daerah dan laba perusahaan daerah perkembangannya dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan secara terus menerus akan diupayakan kontribusinya makin meningkat.

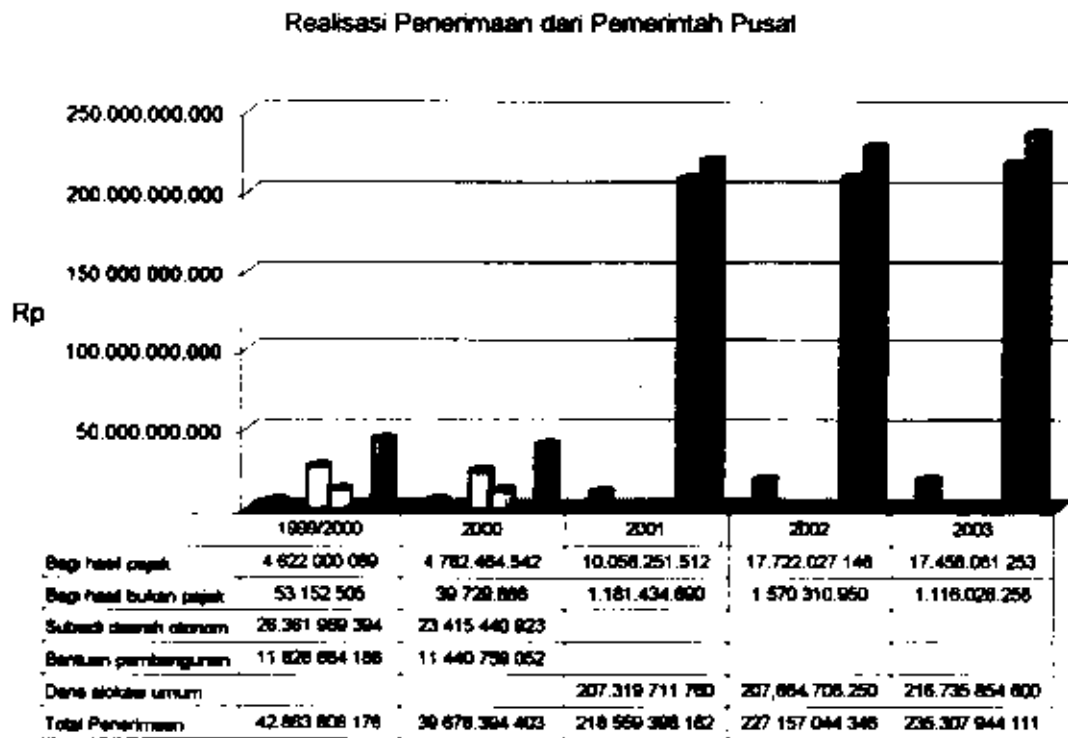
Sasaran arah kebijakan pemerintah kota ditekankan melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang disesuaikan dengan sumber-sumber potensi daerah dari pajak dan retribusi daerah. Fakta riil berdasarkan kondisi strategik Kota Madiun yaitu pengembangan pajak dan retribusi daerah ditekankan pada peningkatan infrastruktur distribusi dan perdagangan yang dapat menimbulkan multiplier effect terhadap peningkatan PAD tanpa harus membebani kemampuan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut sangat berkaitan dengan upaya memperkuat basis ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan daerah hinterland sebagai pemasok bahan-bahan kebutuhan pokok Kota Madiun, sehingga dengan kata lain Pemerintah Kota sangat memperhatikan efek kepentingan, khususnya masyarakat



kota secara luas yang didominasi oleh perdagangan dan industri kecil dan menengah.

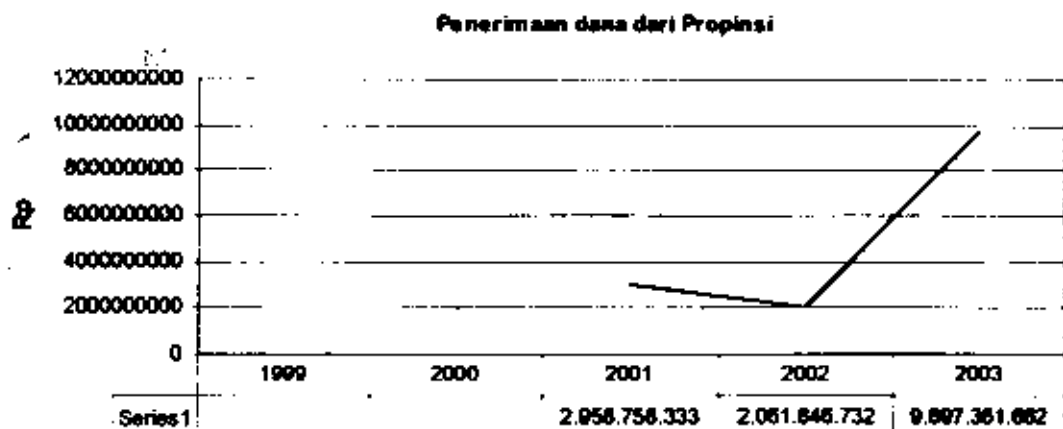
Kemampuan pemerintah kota dalam mengimplementasikan kebijakan publik sangat tergantung dukungan kebijakan-kebijakan Nasional. Persoalan keuangan daerah tak dapat dipisahkan dari implementasi dari Kebijakan Nasional yang lebih jauh diartikan proporsi ketergantungan kepada pemerintah pusat belum dapat ditempatkan sebagai dasar kriteria ketidakmandirian pemerintah kota. Tak dapat dipungkiri Kota Madiun sebagai sebuah kota yang memiliki letak strategik mengandung potensi kuat untuk dikembangkan sebagai wilayah yang dapat memacu perkembangan di daerah sekitarnya, hal tersebut menjadi tolok ukur kontribusi dana perimbangan sebagai entry point pertimbangan alokasi dari pemerintah pusat. Sementara itu pengeluaran rutin dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada lampiran 1.

Grafik 2.15. :



*Sumber data : Bagian Keuangan*

Grafik 2.16. :



*Sumber data : Bagian Keuangan*

**2.3.5. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian**

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari dukungan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan dan perkembangannya sangat menentukan pencapaian tujuan dari program pembangunan yang ditetapkan. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan fasilitas, sarana dan prasarana pembangunan sebagai bentuk layanan terhadap masyarakat serta peran aktif masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkannya seoptimal mungkin merupakan suatu kebutuhan yang vital. Fasilitas, sarana dan prasarana yang dinilai cukup berperan dalam pembangunan di Kota Madiun yaitu listrik dan air bersih, pasar dan toko, koperasi, hotel dan penginapan, kantor pos, bank, sarana dan prasarana telekomunikasi, transportasi dan pompa bahan bakar.

**a. Pasar, Toko dan Kios**

Kelancaran kegiatan perdagangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung, khususnya pasar secara fisik dan toko sebagai tempat efektif bagi penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi. Jumlah pasar yang ada di Kota Madiun sampai tahun 2003 berjumlah 12 buah yang tersebar di seluruh Kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo sebanyak 4 buah, Kecamatan Taman sebanyak 4 buah dan Kecamatan Kartoharjo

sebanyak 4 buah. Untuk toko, baik kategori besar maupun kecil berjumlah 2.847 buah, dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Kartoharjo sebesar 1.452 buah. (Dinas Pasar, 2003).

b. Hotel dan Losmen

Keberadaan suatu hotel dan penginapan sebagai salah satu wujud pelayanan kota sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran berbagai aktivitas masyarakat seperti bisnis atau wisata. Sebagai tempat penginapan ataupun tempat diselenggarakannya suatu acara tertentu, suatu hotel atau losmen membutuhkan pengelolaan yang optimal dan efektif guna meningkatkan kepercayaan konsumen dalam memanfaatkannya. Mengacu pada data yang dipaparkan oleh BPS pada tahun 2003, jumlah hotel dan losmen di Kota Madiun cukup banyak, yang tersebar di tiga kecamatan dengan rincian di Kecamatan Manguharjo sebanyak 13 buah, Kecamatan Taman sebanyak 11 buah dan di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 7 buah.

c. Bank dan Lembaga Keuangan

Perbankan sebagai lembaga penyedia jasa di bidang keuangan sangat besar peranannya dalam menunjang kegiatan

perekonomian masyarakat. Data tahun 2001 perbankan yang ada di kota Madiun sebanyak 4 bank Pemerintah yakni: Bank Mandiri, BTN, BNI 1946, BRI, BPD. Sedangkan bank umum swasta Nasional sebanyak 5 bank yakni: BTPN, Bank Lippo, BCA, Bank Danamon, Bank pasar Tunas Artha. Sedangkan bank umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain: BPD (bank Jatim), PD Bank Pasar.

d. **Sistem Jaringan Jalan, Transportasi**

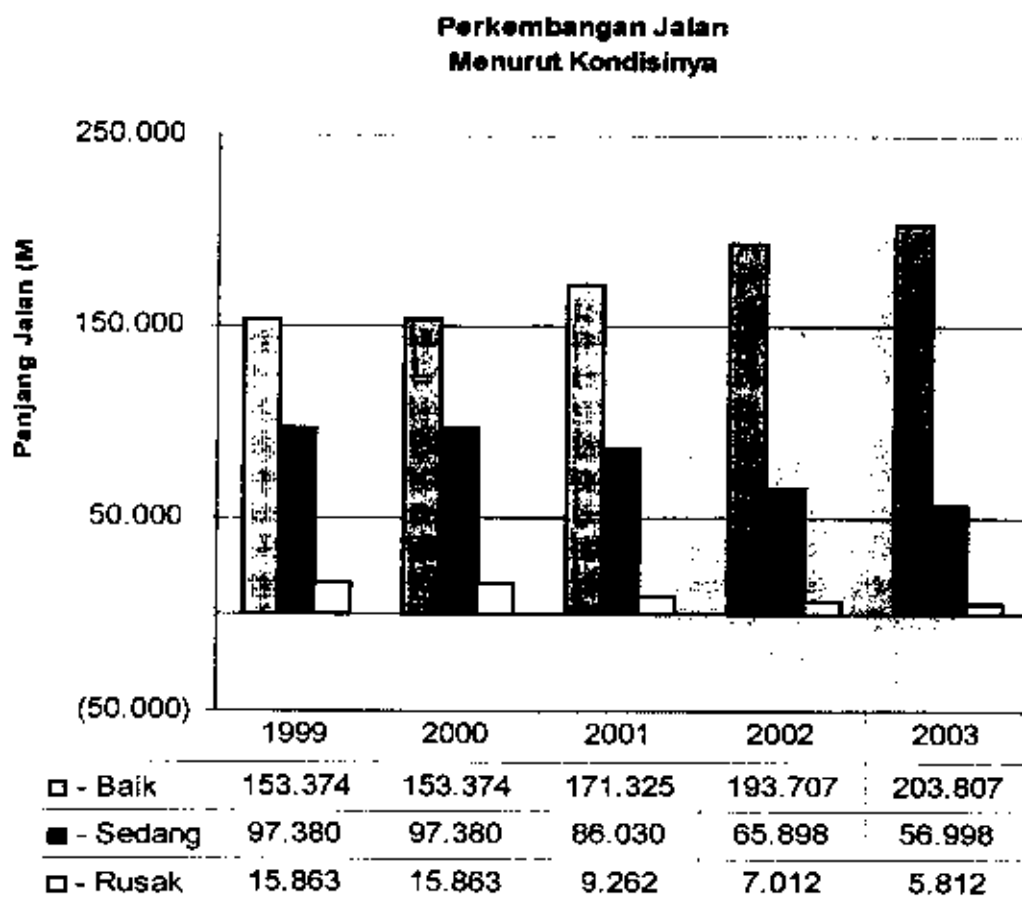
Secara umum kondisi jalan-jalan di kota Madiun baik, demikian pula sarana transportasi lainnya seperti jembatan cukup memadai meski ada beberapa yang perlu ditingkatkan kondisinya karena merupakan akses penghubung. Untuk itu Pemerintah kota Madiun berupaya membangun/ meningkatkan dan memelihara serta merehabilitasi transportasi jalan untuk meningkatkan mutu pelayanan pengguna transportasi jalan sesuai dengan penambahan kebutuhan serta mengembangkan aksesibilitas transportasi jalan guna memperluas dan meningkatkan pelayanan pada kawasan terisolir dan perbatasan termasuk pembuatan *ring road barat yang telah selesai dilaksanakan*.

Sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta analisa yang telah dilakukan mengenai sistem jaringan jalan kota Madiun, maka rencana pengembangan jalan lingkar (ring road) yang terdiri dari jalan lingkar Utara-Barat, jalan lingkar Utara-Timur, jalan lingkar Timur- Selatan dan jalan lingkar Barat- Selatan. Berdasarkan kondisi saat ini di dalam pengembangan jalan lingkar prioritas utama adalah pengembangan jalan arteri primer (jalan lingkar Utara-Barat) mulai jalan Urip Sumoharjo hingga tembus ke jalan Yos Sudarso.. Sedangkan untuk jalan lingkar lainnya (jalan lingkar Utara-Timur, jalan lingkar Utara-Selatan dan jalan lingkar Barat-Selatan) pengembangannya masih membutuhkan waktu, hal ini karena berkaitan dengan pendanaan, pembebasan tanah dan studi kelayakan yang membutuhkan waktu pelaksanaannya.

Penyediaan prasarana mobilitas penduduk dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas penyediaan prasarana jalan dan jembatan yang selama kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kualifikasi baik yang telah dibangun selama kurun waktu tersebut meningkat sepanjang 50,44 km, kualifikasi sedang menurun sepanjang 40,38 Km dan kualifikasi rusak menurun sepanjang 10,05 km. Perubahan komposisi jalan setiap tahun yang menunjukkan perbaikan, membuktikan Pemerintah

Kota telah berhasil memperbaiki jalan untuk meningkatkan mobilitas penduduk.

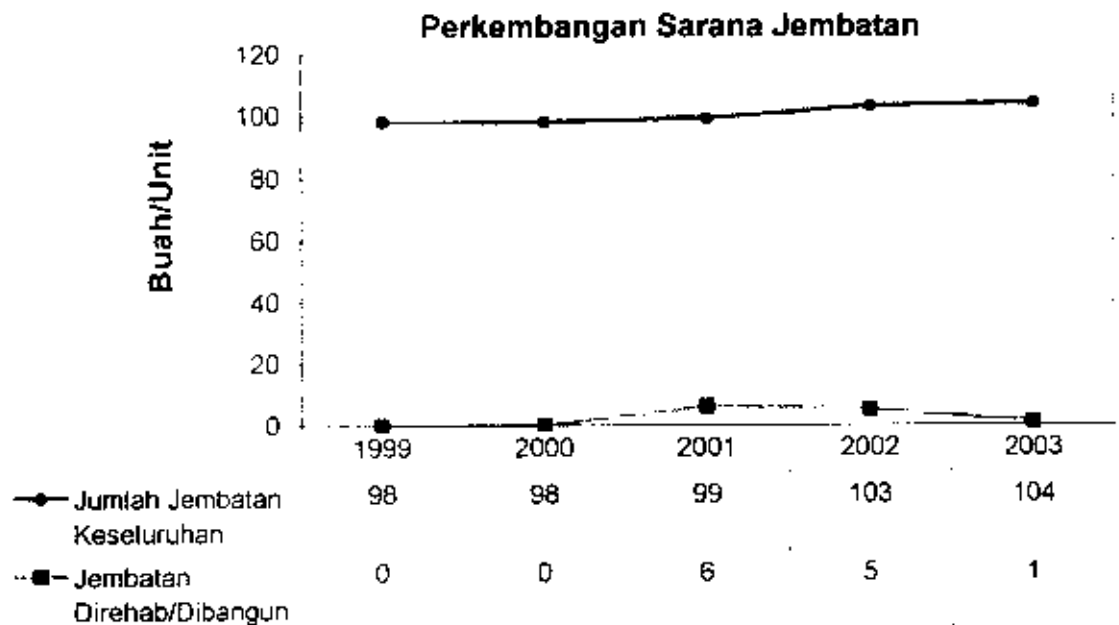
Grafik 2.17. :



*Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum*

Disamping fasilitas jalan, selama 5 tahun juga terjadi peningkatan jumlah jembatan sejalan dengan kondisi geografis Kota Madiun yang dilalui Sungai besar. Jumlah Jembatan mengalami peningkatan sebanyak 6 jembatan.

Grafik 2.18. :



*Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum*

**e. Prasarana dan Sarana Pendidikan dan Olah Raga**

Kota Madiun sebagai pusat SWP Madiun dan sekitarnya mempunyai kemungkinan pengembangan pendidikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah fasilitas pendidikan yang ada terutama Perguruan Tinggi. Jenis pendidikan umum yang ada di Kota Madiun meliputi TK, SD, SLTP, SMU dan Perguruan Tinggi.

Untuk pendidikan SD Negeri sebanyak 88 lembaga, SD Swasta 20 lembaga dengan guru 1.307 orang dan jumlah murid 19.627, sedangkan untuk pendidikan SLTP Negeri sebanyak 15 termasuk



MTS Negeri, SLTP Swasta sebanyak 8 lembaga dengan jumlah guru 750 orang dan jumlah murid 11.285 orang. Pendidikan SMU / MA negeri sebanyak 8 lembaga, SMU / MA swasta sebanyak 9 lembaga dengan jumlah guru 611 orang dan jumlah murid 7.796 orang sedangkan sekolah kejuruan/ SMK Negeri sebanyak 5 lembaga, SMK Swasta sebanyak 21 lembaga dengan jumlah guru 1.028 orang dan jumlah murid sebanyak 12.837 orang. Untuk Perguruan Tinggi yang ada di kota Madiun yaitu sebanyak 11 unit dengan jumlah dosen 364 orang dan mahasiswa sebanyak 6.013 orang (Madiun Dalam Angka, 2003).

Di bidang olahraga saat ini telah terbentuk beberapa klub olahraga pelajar dan kelompok olahraga berlatih di masyarakat. Klub ini secara terus menerus dilakukan pembinaan oleh unit kerja terkait dengan didukung oleh dunia usaha dan industri. Penyelenggaraan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan baik di sekolah maupun di masyarakat setiap tahunnya ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penyelenggaraan ini didukung oleh beberapa sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Adapun jumlah prasarana olahraga antara lain:

- 1) Stadion wilis sebanyak 1 buah
- 2) GOR sebanyak 1 buah

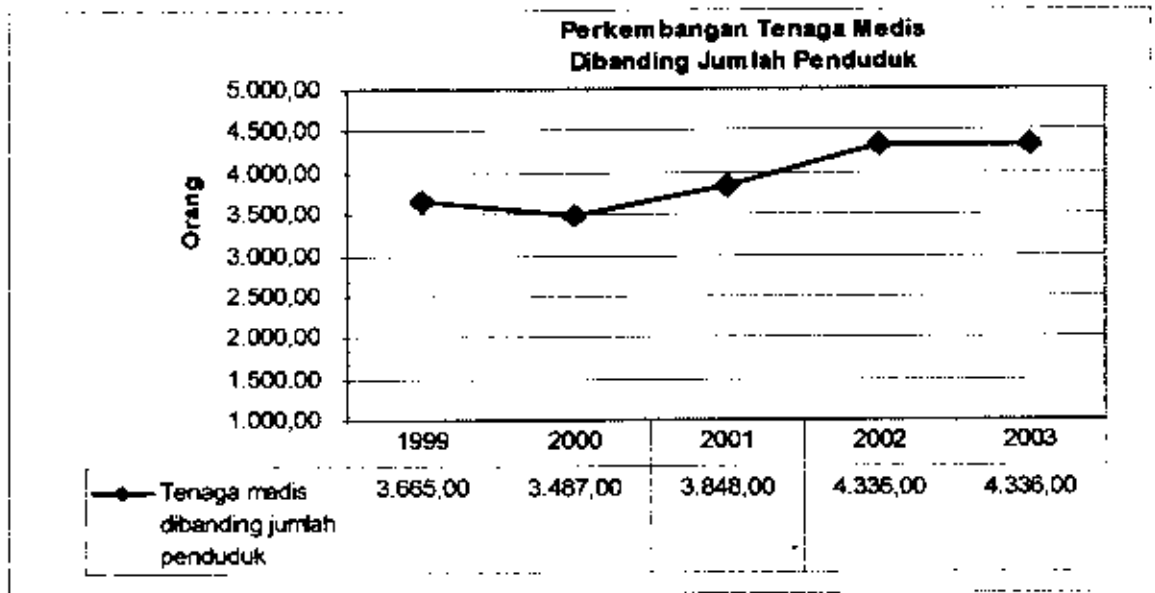
- 3) Lapangan tennis sebanyak 6 buah
- 4) Lapangan sepakbola sebanyak 8 buah, dll.

f. Prasarana dan sarana Kesehatan

Keberadaan fasilitas kesehatan di Kota Madiun cukup memadai dan mempunyai skala pelayanan lingkup regional, terlihat dari 3 (tiga) rumah sakit milik Pemerintah yakni adanya RSUD Propinsi Dr. Sudono, RS Tentara, RS Daerah Kota Madiun, dan 3 (tiga) RS Swasta serta 5 (lima) Puskesmas, 17 (tujuh belas) Puskesmas Pembantu. Jumlah tenaga dokter spesialis sebanyak 25 orang, dokter umum 16 orang dan dokter gigi sebanyak 11 orang.

Standar minimal ketersediaan tenaga medis adalah 1 tenaga medis (dokter umum) melayani 20.000 penduduk. Pada tahun 1999 sampai dengan 2003 untuk kota Madiun rasio ini sudah melebihi standar, hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah.

Grafik 2.19. :



*Sumber data : Dinas Kesehatan*

### 2.3.6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Arah kebijakan pembangunan aparatur pemerintah Kota Madiun adalah:

- a. Mewujudkan aparatur pemerintah yang amanah, profesional dan berdedikasi tinggi dalam berorganisasi yang efektif dan efisien serta mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab;
- b. Mewujudkan aparatur pemerintah yang netral dari politisasi, tanpa mengabaikan hak-hak politiknya dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. mewujudkan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah dan

cepat, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi dengan mendorong dinamika masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka diperlukan budaya aparatur pemerintahan yang hemat, sederhana dan efektif terutama dalam melakukan efisiensi dan meningkatkan kinerja birokrasi untuk mengantisipasi era globalisasi, yang tentunya akan berkaitan erat dengan peran birokrasi sebagai agen pemerintah.

Agenda penyempurnaan birokrasi adalah merubah perilaku yang mengandalkan kekuasaan (*power*) menjadi pengayom, pelayanan dan dituntut untuk mampu menciptakan iklim yang kondusif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah diimplimentasikan lewat berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah.

1) Kelembagaan

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Madiun didukung oleh aparatur pemerintah yang terorganisasi dalam suatu kelembagaan yang merupakan perangkat daerah. Pembentukan kelembagaan ini berdasarkan Peraturan Daerah.

Tabel 2.2. : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Madiun

NO.	NAMA ORGANISASI / KELEMBAGAAN	KETERANGAN
I.	<b>BADAN</b> 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.Badan Pengawas 3.Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. 4.Badan Pemberdayaan Masyarakat	
II.	<b>SEKRETARIS DAERAH &amp; SEKRETARIAT DPRD</b> Sekretaris Daerah 1.Asisten I Bidang Tata Praja dan Administrasi Pembangunan. 2.Asisten II Bidang Administarsi Umum Sekretariat DPRD	
III.	<b>DINAS</b> 1. Dinas Pendapatan 2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan 8. Dinas Kesejahteraan Sosial 9. Dinas Pekerjaan Umum 10. Dinas Informasi dan Komunikasi 11. Dinas Pasar 12. Dinas Pertanahan 13. Dinas Pertanian	
IV.	<b>KANTOR</b> 1. Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah 2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil & Menengah	
V.	<b>KECAMATAN</b> 1. Kecamatan Manguharjo 2. Kecamatan Kartoharjo 3. Kecamatan Taman	
VI.	27 KELURAHAN	

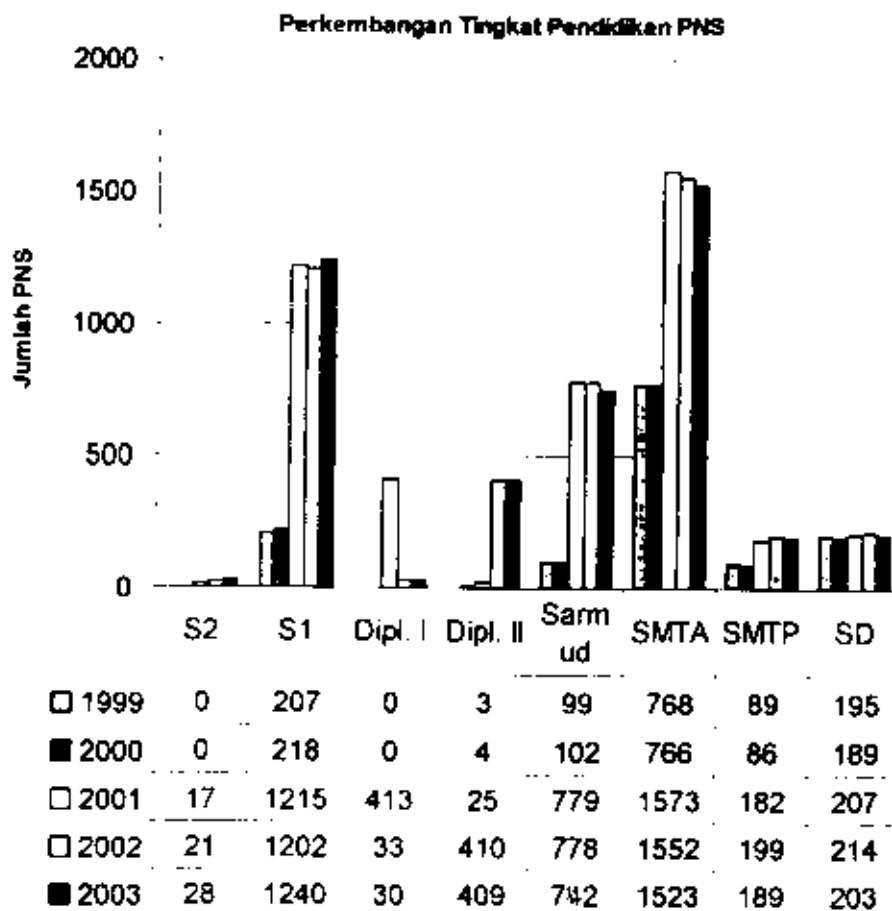
2). Aparatur Pemerintah

Peningkatan kapabilitas, komitmen dan integritas aparatur senantiasa menjadi prioritas Pemerintah Kota Madiun. Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat kota membutuhkan pelayanan yang semakin profesional baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Untuk mewujudkan tersebut di atas, maka aparatur Pemerintah Kota Madiun semakin ditingkatkan kualitasnya, baik melalui pendidikan formal, pendidikan penjenjangan atau pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di tingkat kota maupun tingkat propinsi dan pusat.

Peningkatan jumlah dan komposisi aparatur selama 5 tahun terus meningkat seliring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Secara kuantitas komposisi kualitas aparatur secara signifikan meningkat dari tahun ketahun. Secara kualitas prosentase kenaikan aparatur yang lulus S1 dan S2 naik, yaitu dari tahun 1999 tidak ada yang memiliki kualifikasi S2 namun pada tahun 2003 jumlahnya menjadi 28 orang, meskipun apabila dilihat secara keseluruhan masih didominasi lulusan SMU yaitu sebanyak 1.523 orang.

Grafik 2.20. :



*Sumber data : Bagian Kepegawaian*

### 2.3.7. Pelembagaan Politik Lokal

Kondisi masyarakat kota Madiun dalam ikut berpartisipasi di bidang politik semakin meningkat, termasuk pemahaman tentang kehidupan berpolitik di kalangan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga terlihat dengan semakin banyaknya lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kota Madiun, sebagai lembaga yang ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat sekaligus memberikan sumbangan pemikiran atas penyelenggaraan

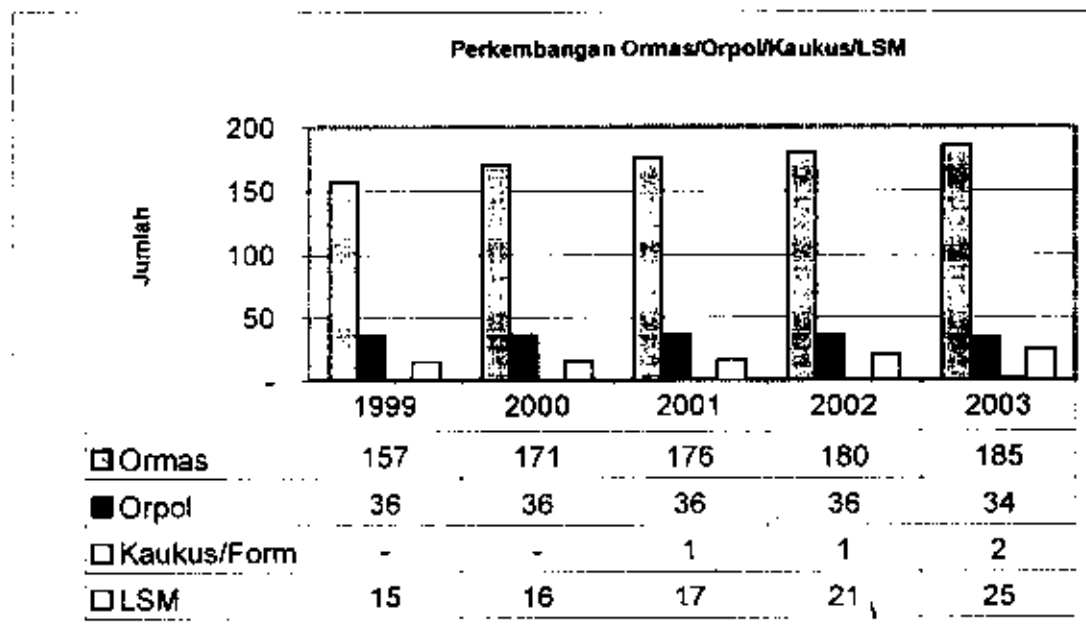
pemerintahan. Lembaga ini dalam setiap tahap pembuatan kebijakan publik selalu diikutsertakan termasuk dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahunan (REPETADA) yang didahului publik hearing tentang arah kebijakan umum pelaksanaan pembangunan pada tahun yang bersangkutan serta mengawal jalannya pelaksanaan program yang sudah tertuang dalam APBD. Dalam proses pembuatan kebijakan publik yang bersifat politis, upaya mendorong keikutsertaan berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda di kota Madiun terus dilakukan. Dalam proses ini terlibat berbagai macam policy stakeholders yaitu mereka-mereka yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu kebijakan publik, sehingga dicapai suatu hasil yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan proses demokratisasi di kota Madiun harus dipandang sebagai kebaikan (virtue) menyertakan unsur-unsur masyarakat untuk ikut memainkan peran dalam proses penetapan kebijakan publik (public policy). Oleh karena peran serta masyarakat tersebut sesungguhnya sebuah "Kontrak Sosial" antara Eksekutif, Legislatif dengan kelompok-kelompok potensial yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran Pemerintah Kota semata-mata lebih banyak memfasilitasi terhadap pertumbuhan



dan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Grafik 2.21. :



*Sumber data : Badan KesbangLinmas*

Adapun program pelembagaan politik lokal antara lain :

- a. Penguatan lembaga masyarakat.

Penguatan lembaga masyarakat diharapkan mampu menyerap aspirasi seluruh lapisan masyarakat didalam proses pengambilan keputusan, sedangkan implementasi kebijakan politik harus mampu menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, partisipatif, teratur dan menghargai prosedur serta aturan yang berlaku.

b. pendidikan dan pemberdayaan politik masyarakat.

Pendidikan dan pemberdayaan politik masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pola pikir, kesadaran, etika dan budaya politik sehingga proses dan pengambilan keputusan politik yang diambil bagi kepentingan bersama menjadi lebih berkualitas.

c. Peningkatan Kerukunan hidup umat beragama.

Kerukunan hidup ummat beragama di Kota Madiun sampai saat ini menunjukkan hubungan yang harmonis baik antar sesama umat beragama maupun antar umat beragama yang satu dengan yang lain, serta antar umat beragama dengan Pemerintah. Kondisi ini ditunjukkan dengan semakin kondusifnya suasana serta adanya toleransi yang tinggi antar umat beragama di Kota Madiun.

**2.4. Permasalahan Umum Pembangunan Kota Madiun**

Beberapa Permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh dan kemungkinan masih akan dihadapi dalam tahun mendatang antara lain :

1. Kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan masih perlu ditingkatkan. Khusus untuk dunia pendidikan, perlu peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Perlu keseimbangan antara biaya pendidikan dengan mutunya.
2. Belum seimbang dan meratanya penyebaran penduduk guna mendukung pembangunan daerah yang bermuansa lingkungan yang baik dan sehat.
3. Pelayanan kesehatan dasar masyarakat baik di RSUD kota maupun Puskesmas belum memadai. Sarana dan prasarana medis, tenaga medis dan paramedis belum memenuhi harapan yang ideal.
4. Penanganan pengangguran belum optimal. Jumlah angkatan kerja tahun 2002 sebanyak 71.982 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja tertampung sebanyak 68.648 orang atau 95,37%.
5. Guna mendukung warga Kota Madiun untuk menikmati suasana yang nyaman, tertib, lancar dan aman. Maka, perlu penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak menempati fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, alun-alun, areal parkir.

6. Dalam upaya mencapai tujuan strategik RENSTRADA, yaitu terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar hidup, maka perlu penanganan yang tuntas terhadap kemiskinan, baik kemiskinan struktural maupun kultural.
7. Penanganan terhadap penyandang masalah sosial seperti kelompok wanita tuna susila, korban pemakaian narkoba, penyandang cacat, tunawisma, anak jalanan dll, masih belum optimal.
8. Semakin terbatasnya / berkurangnya lahan pertanian yang ada di Kota Madiun, karena banyaknya lahan yang beralih fungsi dari lahan pertanian ke perumahan / permukiman. Disamping itu masih belum optimalnya pemanfaatan tanah pekarangan yang kosong untuk kegiatan pertanian.
9. Antisipasi kemacetan lalu lintas karena meningkatnya permintaan perjalanan kendaraan suatu periode tertentu dan jumlah pemakai jalan sudah melebihi dari kapasitas jalan yang ada, harus dilakukan sedini mungkin, terutama pada jam – jam tertentu, seperti di Jl. Diponegoro dan Jl. Mastrip.
10. Masalah industri kecil adalah belum dikembangkannya desain produknya dalam rangka pengembangan pasar. Disamping itu kurang optimalnya perkembangan sentra – sentra industri. Sedangkan masalah perdagangan adalah belum meratanya sarana

dan prasarana perdagangan di wilayah yang kurang berkembang (Kota Madiun bagian Barat).

11. Iklim investasi di Kota Madiun kurang kondusif, sehingga belum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang signifikan.
12. Pengembangan ekonomi lokal yang dimotori oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi kurang digalakkan, sehingga UMKM dan Koperasi itu belum mampu bersinergi dengan usaha skala besar secara optimal.
13. Belum dibentuknya tim kerjasama antara Pemkot dan Pemkab. Madiun untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut kedua Pemda dan pengembangan Pemda masing-masing. Begitu juga belum dibentuk tim kerjasama antara Pemkot Madiun dengan Pemda di Bakorwil I Jawa Timur.

## BAB III

### VISI DAN MISI KOTA MADIUN

#### 3.1. Visi dan Misi Kota Madiun

##### 3.1.1. Visi

***Terwujudnya Kota Madiun sebagai sentra perdagangan, jasa dan pendidikan menuju Masyarakat berdaya dan sejahtera dalam suasana tertib dan aman.***

#### **PENGERTIAN SENTRA PERDAGANGAN, JASA DAN PENDIDIKAN DALAM DEFINISI KERJA PHRASA :**

Kata sentra dalam definisi kerja phrasa disini mempunyai pengertian yang merujuk pada posisi kota Madiun sebagai Core Area bagi wilayah hinterlands yang mengelilinginya. Sebagai sentra berarti menjadi pusat aktivitas yang rentang pelayanannya menjangkau hinterlands mencakup kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Madiun. Untuk menuju sebagai sentra dituntut kemampuan ; *menyediakan infrastruktur yang proporsional dengan rentang pelayanan ; kualitas SDM dan pelayanan yang memenuhi standart kompetensi; upaya-upaya pendekatan yang menempatkan wilayah hinterlands sebagai mitra pertumbuhan dalam bidang perdagangan, jasa dan pendidikan.*

#### **PENGERTIAN MASYARAKAT BERDAYA DALAM DEFINISI KERJA PHRASA :**

Masyarakat Berdaya dalam definisi kerja phrasa ini mengandung pengertian sebuah kondisi dimana masing-masing elemen masyarakat mempunyai kemampuan setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need : sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan) secara mandiri. Kemampuan ini lebih lanjut menjadi penggerak peranserta dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial kemasyarakatan secara umum.

**PENGERTIAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM DEFINISI KERJA PHRASA:**

Masyarakat Sejahtera dalam definisi kerja phrasa ini mengandung pengertian sebuah kondisi dimana masing-masing elemen masyarakat minimal berkategori memenuhi level indikator ilmiah tingkat kesejahteraan yang berlaku universal.

**3.1.2. Misi**

**1. Meningkatkan Kapasitas Kemandirian Ekonomi Masyarakat.**

Meningkatkan Kapasitas Kemandirian Ekonomi Masyarakat memiliki pengertian peningkatan kemampuan yang mencakup aspek ; permodalan, manajerial, keahlian, diversifikasi aktivitas ekonomi dan akses pasar terhadap UMKM , pencari kerja dan keluarga miskin.

**2. Meningkatkan Pelayanan Publik.**

Meningkatkan Pelayanan Publik memiliki pengertian peningkatan pelayanan prima baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang berkaitan dengan kewajiban dan hak masyarakat untuk pengembangan perdagangan, jasa,, pendidikan dan kesejahteraan secara umum, serta secara khusus diorientasikan pada pengembangan kota Madiun dalam konteksnya sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan Jawa Timur bagian barat.

**3. Meningkatkan Pembangunan Partisipatif.**

Meningkatkan Pembangunan Partisipatif memiliki pengertian pengembangan tingkat kompetensi dan keberdayaan seluruh stakeholders pembangunan untuk berperan aktif dalam proses menyusun kesepakatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

4. Mengembangkan Kerjasama Pengelolaan Pembangunan.

Mengembangkan Kerjasama Pengelolaan Pembangunan memiliki pengertian peningkatan kuantitas kualitas kerjasama kemitrasejajaran dalam scope lokal, regional, nasional dan internasional dalam aspek program, pengelolaan dan pembiayaan.

5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki pengertian mencakup SDM secara umum dan SDM Aparatur secara khusus. Meningkatkan kualitas SDM secara umum memiliki pengertian pembentukan sosok SDM yang sehat, menguasai perkembangan IPTEK dan memegang teguh IMTAQ dan apresiatif terhadap budaya nasional. Sedang meningkatkan kualitas SDM Aparatur memiliki pengertian pembentukan sosok sumber daya aparatur yang responsif, antisipatif dan inovatif terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang kontekstual dengan kondisi riil perkembangan jaman.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Pembangunan Kota Madiun**

**3.2.1. Misi ke – 1 : Peningkatan Kapasitas Kemandirian Ekonomi**

***Tujuan :***

Terwujudnya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat yang berbasis pada kekuatan usaha mikro kecil dan menengah serta adanya kemitraan dengan pengusaha besar yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja.

***Sasaran :***

⇨ Peningkatan modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)



- ⇒ Terwujudnya peningkatan ketrampilan teknis dan manajerial UMKM
- ⇒ Meningkatnya penguasaan teknologi terapan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah
- ⇒ Terwujudnya pengembangan usaha berbasis sumberdaya lokal
- ⇒ Terwujudnya diversifikasi pada UMKM
- ⇒ Terwujudnya komoditas produk unggulan yang kuat
- ⇒ Terwujudnya peningkatan akses pasar bagi UMKM
- ⇒ Meningkatkan daya saing produk UMKM
- ⇒ Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha UMKM

**3.2.2. Misi ke – 2 : Peningkatan Pelayanan Publik**

***Tujuan ke – 1 :***

Tewujudnya pelayanan publik yang prima mencakup regulasi, dokumen administratif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan perdagangan, jasa, pendidikan dan kesejahteraan. Kualitas pelayanan publik tersebut sekaligus diorientasikan proposional dengan kedudukan Kota Madiun sebagai Pusat Satuan Wilayah Pengembangan Jawa Timur bagian Barat

***Sasaran :***

- ⇒ Tersedianya jaringan utilitas dan sarana pendukung sesuai kebutuhan kawasan perdagangan, jasa dan industri

- ⇒ Tersedianya sistem / mekanisme jaringan informasi di bidang perijinan
- ⇒ Meningkatnya kualitas dan pemberian kemudahan perijinan di bidang perdagangan, jasa dan pendidikan serta ijin lainnya yang dibutuhkan masyarakat maupun dunia usaha.
- ⇒ Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan.

***Tujuan ke - 2 :***

Terwujudnya fungsi - fungsi infrastruktur serta aktivitas perdagangan, jasa, dan ekonomi sebagai lahan investasi, penyerap tenaga kerja dan penyangga peningkatan pendapatan daerah menuju kemandirian keuangan daerah.

***Sasaran :***

- ⇒ Terwujudnya peningkatan pendayagunaan infrastruktur
- ⇒ Meningkatnya pendapatan masyarakat dan laju pertumbuhan dunia usaha.
- ⇒ Meningkatnya omzet penjualan produk industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.
- ⇒ Terwujudnya komoditas produk unggulan yang kuat.
- ⇒ Meningkatnya kualitas pelayanan pasar.
- ⇒ Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalulintas jalan.

- ⇒ Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja memasuki pasar dalam negeri maupun luar negeri.
- ⇒ Terwujudnya jaringan informasi pasar perdagangan.
- ⇒ Terwujudnya sinergi antar stakeholder perdagangan
- ⇒ Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian
- ⇒ Pendapatan petani peternak meningkat
- ⇒ Terwujudnya peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku hidup sehat masyarakat dan lingkungan sehat

***Tujuan ke - 3 :***

Terwujudnya aktivitas kependidikan yang mampu membentuk SDM dengan standart kompetensi tinggi, menguasai perkembangan IPTEK dan tetap memegang teguh IMTAQ serta apresiasif terhadap budaya nasional.

***Sasaran :***

- ⇒ Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dasar dan prasekolah yang lebih baik
- ⇒ Meningkatnya jumlah media pembelajaran di perpustakaan
- ⇒ Meningkatnya jumlah sekolah swasta yang diberi bantuan
- ⇒ Meningkatnya APK SD dan MI serta APK SLTP dan MTs.
- ⇒ Meningkatnya daya tampung SD dan MI serta SLTP dan MTs.
- ⇒ Meningkatnya jumlah sekolah swasta yang diberi bantuan
- ⇒ Meningkatnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja

- ⇒ Meningkatnya APK untuk SLTA (SMU, SMK dan MA)
- ⇒ Meningkatnya daya tampung SMU, SMK dan MA
- ⇒ Berkurangnya angka putus sekolah siswa SD, SMP, SMU, SMK dan MA
- ⇒ Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan dan makin tingginya proporsi guru SLTA berpendidikan S1
- ⇒ Membaiknya sistem karier dan penggajian bagi guru dan tenaga kependidikan yang isinya pada pendidikan menengah
- ⇒ Terwujudnya kurikulum pendidikan menengah yang lebih baik
- ⇒ Tersusun dan terlaksananya sistem dan standart penilaian nasional dan internasional
- ⇒ Meningkatnya rata - rata NUN SLTA
- ⇒ Meningkatnya relevansi dunia pendidikan dengan dunia kerja
- ⇒ Terbentuknya Komite Sekolah
- ⇒ Meningkatnya peran dan fungsi Komite Sekolah di seluruh SMU, SMK dan MA
- ⇒ Tersempurnakannya produk - produk hukum di bidang pendidikan yang sudah sesuai dengan arah dan tuntutan pembangunan pendidikan menengah
- ⇒ Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar melalui MPMBS dan KBK.

- ⇒ Terlaksananya pengembangan sistem akreditasi secara adil dan merata, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
- ⇒ Meningkatkan kelulusan Kejar Paket B
- ⇒ Meningkatkan kelulusan Kejar Paket C
- ⇒ Meningkatkan Keaksaraan Fungsional
- ⇒ Meningkatkan kualitas warga belajar
- ⇒ Meningkatkan Perkembangan Budaya daerah
- ⇒ Meningkatkan sarana dan prasarana Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga.
- ⇒ Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- ⇒ Terpenuhinya persyaratan pendirian PTN
- ⇒ Meningkatnya kualitas dan kuantitas bahan pustaka
- ⇒ Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Perpustakaan
- ⇒ Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Arsip
- ⇒ Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kearsipan.

**3.2.3. Misi ke – 3 : Peningkatan Pembangunan Partisipatif**

***Tujuan :***

Terwujudnya peningkatan peran serta seluruh stakeholders dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melalui kesepakatan dan komunikasi yang bersifat konstruktif dengan

instansi terkait berdasar pada produk kebijakan publik yang didukung validitas data dan informasi.

**Sasaran :**

- ⇒ Setiap komponen stakeholders mengetahui dan terlibat di dalam proses perumusan kebijakan
- ⇒ Tersedianya media yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Madiun dan masyarakat untuk sharing informasi dalam pengambilan kebijakan.
- ⇒ Meningkatkan fungsi kontrol terhadap eksekutif dan mengefektifkan penyerapan aspirasi masyarakat
- ⇒ Meningkatkan efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan
- ⇒ Akuntabilitas publik dalam proses musbangkei dan Rakorbang
- ⇒ Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**3.2.4. Misi ke – 4 : Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Pembangunan**

**Tujuan :**

Peningkatan kerjasama dengan pihak pihak (perorangan, lembaga, NGO, negara sahabat) yang concern terhadap pengelolaan pembangunan di Kota Madiun

**Sasaran :**

⇒ Terwujudnya kerjasama pengelolaan pembangunan

**3.2.5. Misi ke – 5 : Peningkatan Sumber Daya Manusia**

**Tujuan :**

Penataan kelembagaan dan peningkatan Sumber daya manusia serta fasilitas pendukung kinerja aparatur untuk pengembangan pelaksanaan *Good Governance*.

**Sasaran :**

- ⇒ Terwujudnya sistem manajemen pemerintahan yang profesional
- ⇒ Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah
- ⇒ Terwujudnya penegakkan hukum bagi aparatur pemerintah
- ⇒ Tertatanya kelembagaan Pemerintah Kota yang lebih efisien sebagai penjabaran UU No. 8 tahun 2002
- ⇒ Meningkatnya kualitas RENSTRA Instansi
- ⇒ Meningkatnya prosentase unit – unit kerja pelayanan publik yang menyempurnakan pelaksanaan pelayanan publiknya.
- ⇒ Meningkatnya prosentase unit pelayanan publik yang dinilai baik

- ⇒ Terlaksananya pelimpahan kewenangan dari walikota ke camat
- ⇒ Meningkatnya jumlah rasio PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan dan tupoksi
- ⇒ Meningkatnya jumlah rasio PNS yang tamat diklat jabatan yang telah mengikuti diklat jabatan.
- ⇒ Prosentase tingkat kesesuaian jumlah PNS dalam suatu instansi dengan beban tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan
- ⇒ Meningkatnya pelaksanaan sistem penilaian kinerja PNS sebagai pengganti DP3 yang dapat mendorong peningkatan produktifitas dan kualitas kinerja PNS.

### **3.2.6. Misi yang relevan dengan semua misi**

#### ***Tujuan :***

Terwujudnya hubungan politis yang sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam suasana kemitrasejajaran

#### ***Sasaran :***

- ⇒ Peningkatan proses penyelesaian produk hukum
- ⇒ Peningkatan kuantitas dan kualitas produk hukum dibanding tahun yang lalu
- ⇒ Peningkatan fungsi legistasi.

## **3.3. Kebijakan Strategis Kota Madiun**

### **3.3.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Fisik dan Prasarana**



Kebijakan Pemkot Madiun untuk mengembangkan fisik dan prasarana adalah sebagai bentuk layanan terhadap masyarakat serta mengharap peran aktif masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkannya seoptimal mungkin, merupakan kebutuhan yang vital. Untuk itu, sejak perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi dan pemeliharaan masyarakat harus dilibatkan sebagai bentuk partisipasinya terhadap pembangunan. Harapan masyarakat untuk melaksanakan swakelola pembangunan harus direspon secara positif. Tetapi dengan keterbatasan pemerintah dalam pembiayaan, perlu didorong adanya gerakan swadaya atau inisiasi lokal dalam hal pembiayaan.

### 3.3.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Pembiayaan

Pertumbuhan ekonomi tahun 2002 sekitar 4,01% tidak cukup signifikan untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi tambahan angkatan kerja, permasalahannya adalah belum optimalnya kinerja sektor industri dan perdagangan yang masih membutuhkan penanganan terpadu yang melibatkan berbagai pihak.

Arah kebijakan dalam bidang perekonomian adalah :

- 1) Meningkatkan iklim investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (*sustainable growth*) serta agar dapat menjamin kesinambungan pembangunan

(*sustainable development*). Hal ini penting untuk membantu memecahkan masalah-masalah sosial mendasar seperti penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;

- 2) Memberdayakan fungsi koperasi dan Usaha kecil Menengah agar efisien, produktif dengan menciptakan iklim kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya disertai pengelolaan administrasi yang tertib, partisipasi aktif anggota dan peningkatan SDM pengelola koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 3) Pengembangan sentra-sentra industri kecil;
- 4) Pengembangan perdagangan dan sistem distribusi;
- 5) Peningkatan pengelolaan pasar dan penataan pedagang;
- 6) Meningkatkan pelayanan dunia usaha dan menjamin adanya kepastian berusaha dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.
- 7) Dalam membiayai pembangunan, saat ini mengoptimalkan dana yang tersedia, belum memanfaatkan pinjaman pihak ketiga.
- 8) Adanya kebijakan dana bergulir untuk UMKM secara transparan.

### 3.3.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kelembagaan

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Madiun didukung aparatur yang terorganisasi dalam suatu kelembagaan yang merupakan perangkat Daerah. Pembentukan kelembagaan ini berdasarkan Perda. Sedangkan aparatur yang ideal haruslah amanah, profesional, dedikasi tinggi dalam berorganisasi yang efektif dan efisien. Mereka harus netral dari politisasi tanpa mengabaikan hak-hak politiknya. Untuk itu, peningkatan kapabilitas, komitmen dan integritas aparatur senantiasa menjadi prioritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, aparatur pemerintah harus semakin ditingkatkan kualitasnya, baik melalui pendidikan formal, pendidikan penjenjangan atau pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di Kota, Propinsi maupun pusat.

Adapun Kelembagaan Pemerintah kota Madiun diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggungjawab, mudah dan cepat, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi dengan mendorong dinamika masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, semua kelembagaan daerah haruslah menjalankan budaya aparatur pemerintahan yang hemat, sederhana dan efektif, terutama dalam melakukan efisiensi dan meningkatkan kinerja birokrasi untuk mengantisipasi era globalisasi.

Penyempurnaan budaya birokrasi adalah merubah perilaku yang mengandalkan kekuasaan (power) menjadi pengayom, pelayan dan dituntut untuk mampu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan ini.

#### 3.3.4. Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Kelurahan

Kelurahan sebagai Kelembagaan Daerah di Kota Madiun yang dipimpin seorang Kepala Kelurahan, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kriteria seorang Lurah harus mengutamakan leadership, bukannya seorang manajer Kantor Kelurahan. Sebelum menjalankan tugas sebagai Lurah / Kepala Kelurahan, mereka harus mendapat pembekalan khusus sesuai tugasnya.

Lurah / Kepala Kelurahan sebagai fasilitator pembangunan di tingkat Kelurahan harus dibuktikan bahwa setiap pengambilan kebijakan penting dan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pemeliharaan pembangunan selalu melibatkan stakeholders kelurahan. Keberadaan stakeholders kelurahan ini dikuatkan dengan adanya SK Kepala Kelurahan dan keanggotaannya merupakan representasi dari warga kelurahan. Sedangkan penyaringannya dilakukan dari tingkat RT, sehingga kapasitasnya sebagai perorangan atau wakil kelompok masyarakat di kelurahan. Jumlah stakeholders kelurahan

memperhatikan prosentase antara jumlah penduduk dengan yang berada di stakeholders itu.

Untuk itu, aparat Kelurahan haruslah dapat mengimbangi laju dinamika masyarakatnya. Ukuran keberhasilan Kepala Kelurahan tidak hanya dapat diukur secara fisik saja, tetapi sejauh mana keberhasilan demokratisasi dimasyarakat kelurahan.

Setting Kelurahan kedepan yang merupakan cita-cita bersama masyarakat, harus tergambar dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan yang disusun secara partisipatif dan selalu direvisi setiap tahunnya. Segala kegiatan pembangunan di Kelurahan harus mengacu pada RPJMK.

Mengoptimalkan fungsi LPMK dan pengurus RT / RW dengan memperhatikan – menghargai kinerja / prestasi mereka secara materil dan non materil.

## BAB IV

### ISU – ISU STRATEGIS KOTA MADIUN

#### 4.1. Proses dan Mekanisme Penetapan Isu Strategis Kota

Perencanaan pembangunan di era reformasi ini, keterlibatan semua *stakeholders* sudah tidak dapat ditawar lagi, yaitu unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia swasta dan masyarakat termasuk dunia pendidikan. Dalam perencanaan pembangunan itu, perlu menerapkan paradigma baru yaitu adanya perimbangan antara sistem *bottom-up planning* dan *top-down planning*. Disamping itu, harus memegang prinsip *sustainability*, *transparancy*, dan partisipatif.

Berkaitan dengan hal di atas, diperlukan suatu tahapan penyiapan *stakeholders* yang cukup, agar perencanaan pembangunan dapat mengakomodasi kebutuhan – kebutuhan riil dan strategis masyarakat kota Madiun.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, langkah awalnya adalah menentukan dan menetapkan isu strategis, yaitu suatu permasalahan pokok yang harus ditangani oleh seluruh *stakeholders* di masa 5 – 7 tahun ke depan. Tahap awal dari proses ini, melaksanakan jaring aspirasi yang meliputi semua *stakeholders* Kota Madiun, baik unsur *Government Stakeholders* (GS) maupun *Non Government Stakeholders* (NGS) seperti berikut ini :

TABEL 4.1. JARING ASPIRASI GS – NGS UNTUK MENENTUKAN ISU STRATEGIS SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI PROGRAM (SP) PDPP KOTA MADIUN 2003 DAN 2004

NO	SASARAN	SKALA	TANGGAL
1.	Rapat Kepala Kelurahan & Camat	Kota	9 Sept. 2003
2.	Sosialisasi PDPP	Kota	11 Sept. 2003
3.	Pelatihan Kader Kelurahan	Kota	16-17 Sept. 03
4.	Pra Musbangkel (27 kelurahan)	Kelurahan	25-27 Sept. 03
5.	Pelaksanaan Musbangkel (27 Kelurahan)	Kelurahan	30 Sept–2 Okt 03
6.	Pelaksanaan UDKP (3 Kecamatan)	Kecamatan	9,13,14 Okt.03
7.	Kuisisioner Peserta Dialog Publik	Kota	18-21 Okt. 03
8.	Hasil Dialog Publik	Kota	20 Okt. 2003
9.	Kuisisioner yang dihimpun Forum Masyarakat Kota (FORMAT) Madiun	Kota	22 Okt. 2003
10.	RAKORBANG	Kota	23 Okt. 2003
11.	RENSTRA KOTA MADIUN	Kota	12-19 Nop. 03
12.	Lain – lain (Perorangan, Kelompok, Media Massa)	Kel, Kec, Kota	Sept. – Nop.03

#### 4.2. Hasil Jaring Aspirasi GS – NGS

PDPP di Kota Madiun dilaksanakan saat Pemerintah Kota baru saja menyelesaikan draft Perubahan Rencana Strategis Kota Tahun 2001 – 2005 (sekarang sudah menjadi Perda). Tentu saja hasil jaring aspirasi GS – NGS

yang dilakukan Tim Renstra itu sudah dilakukan pembahasan dan terakomodasi dalam Renstra tersebut. Karena Strategi Program (SP) sifatnya hanya melengkapi (suplemen) Renstra yang sudah ada, maka dokumen resmi itu dijadikan rujukan utamanya setelah ditetapkan bersama DPRD menjadi Perda. Tegasnya, secara prinsip tidak ada pengulangan jaring aspirasi.

Namun demikian, guna mempertajam perumusan isu strategis yang mendasari ditetapkannya Renstra tersebut, perlu dilakukan uji lapangan sebagai klarifikasi terhadap dokumen resmi berupa Renstra di atas. Sehingga jaring aspirasi dari GS secara khusus, sudah tidak dilakukan lagi. Jadi, tim gabungan (GS – NGS) langsung melakukan jaring aspirasi kepada sasaran yang jadwal lengkapnya dimuat dalam tabel 4.1. Tentang hasil jaring aspirasi seperti Tabel 4.1. adalah mendapatkan 9 penilaian dan 35 usulan GS – NGS, yang tertuang pada Tabel 4.2.

Suatu realitas saat ini (2004) dengan dilantiknya Pemimpin baru (Walikota dan wakilnya), visi – misi yang ada di Renstra mengalami revisi lagi. Dalam pembahasan Renstra baru yang didalamnya ada visi – misi itu kenyataannya bersesuaian dengan hasil kerja penyusunan SP (2003). Dengan kata lain Renstra hasil revisi 2004 tidak bertentangan dengan hasil penyusunan SP (2003)



**4.3. Tahapan Penetapan Isu Strategis**

Hasil Jaring aspirasi GS – NGS pada Tabel 4.2. berupa 9 penilaian dan 35 usulan itu (kolom 1 dan 2), belum dapat secara langsung dijadikan isu strategis Kota. Hasil itu dikonfirmasi – klarifikasi dahulu, apakah faktanya benar, jika fakta benar, apakah perlu diangkat, lalu bila perlu diangkat apakah masuk kategori isu strategis kota (kolom 3, 4, 5). Terakhir, apabila disepakati termasuk isu strategis, barulah masuk pada pembahasan rumusan isu strategis (kolom 6). Jadi, pembahasan satu masalah iisu (penilaian usulan) saja memakan waktu yang lama dan alot, agar memperoleh pemahaman dan rumusan yang valid. Untuk selanjutnya, rumusan isu pada kolom 6 itu diformulasikan pada Tabel 4.3. berikut ini :

**4.4. Kesepakatan Isu Strategis**

**A. Kesepakatan I**

Akhirnya, pembahasan pada tanggal 9 Desember 2003 itu dapat merumuskan isu strategis sebanyak 22 isu, dari 9 penilaian dan 35 usulan hasil jaring aspirasi GS – NGS. Hasil lengkapnya pada Tabel 4.2. di atas.

**B. Kesepakatan II**

Rumusan isu strategis pada Kesepakatan I mengalami penyempurnaan perumusan, namun jumlahnya tetap 22 isu strategis. Hasil penyempurnaan itu pada tabel 4.3. yang telah mengalami penyempurnaan kolom, yaitu dengan membagi menjadi 9 isu utama dari 22 sub isu strategis tersebut.

**C. Kesepakatan III**

Dilaksanakan scoring bersama GS dan NGS terhadap 22 isu yang sudah disepakati di atas. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika pada proses penyepakatan untuk mengerucutan isu mengalami kebuntuan. Sedangkan kriteria yang dipakai untuk memverifikasi masing-masing isu pada tabel 4.4. Mengenai hasil skoring terhadap 22 isu di atas terdapat pada tabel 4.5 dan tabel 4.6.

**D. Kesepakatan IV**

Disepakati pengerucutan isu strategis dari 22 isu menjadi 7 isu berdasarkan ranking 1 – 7, hasil selengkapnya pada Tabel 4.7. Kemudian tanggal 11 Desember 2003 dicapai akhir kesepakatan

menjadi 5 isu strategis, karena isu no. 1 dan no. 3 digabung menjadi satu. Sedangkan isu no. 2 dan no. 4 juga digabung menjadi satu isu, hasilnya seperti Tabel 4. 8.

**E. Kesepakatan V**

Isu Strategis Kota Madiun yang berjumlah 5 isu hasil penyusunan SP (2003) seperti Tabel 4.8 itu, tanggal 16 Juni 2004 dikerucutkan lagi menjadi 3 isu,

seperti pada Tabel 4.9. Karena, isu no. 1 dan isu no. 5 digabung menjadi satu isu dengan alasan : dengan berkembangnya ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran dapat ditangani. Disamping itu Pemerintah Kota sekarang sedang gencar menangani masalah kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan isu no. 2 dicoret karena sudah menjadi komitmen pemerintah kota dan melekat dalam pelaksanaan sehari-hari. Untuk isu no. 3 dan no. 4 pada prinsipnya tetap hanya mengalami perubahan perumusan kalimat.

Ketiga Isu Strategis pada Tabel 4.9. setelah dilakukan prioritisasi dengan pendekatan USG (Urgensi, Serious, Growth, lihat Tabel 4.10), maka diperoleh urutan seperti Tabel 4.11.

Akhirnya pada hari Rabu, 4 Agustus 2004 dalam lokakarya PDPP aspek Strategi Program (SP) ditetapkan isu strategis Kota Madiun masih berjumlah 3 isu dengan urutan seperti Tabel 4.11. Tetapi isu no 3 mengalami perubahan rumusan, yaitu kata "dasar" dihilangkan, karena pelayanan kesehatan dasar dimaksud hanya terbatas pada

Puskesmas, padahal maksud kita meliputi juga rumah sakit, maka kata dasar dihilangkan, sehingga rumusan akhirnya seperti Tabel 4.12.

TABEL 4.4. Formula Pembobotan dan Scoring Isu Strategis

KRITERIA	PENILAIAN	BOBOT
I	Tingkat urgensi bagi kebutuhan masyarakat	4
II	Keterkaitan dengan sasaran Renstra Daerah	3
III	Pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat	2
IV	Kontribusi terhadap Penerimaan Daerah	1

KETERKAITAN	SCORE
Sangat terkait	81 - 100
Terkait	61 - 80
Cukup Terkait	41 - 60
Kurang Terkait	21 - 40
Tidak Terkait	1 - 20

**Strategi Program (SP)**

**Tabel 4.2. Hasil Jaring Aspirasi GS – NGS untuk Penyusunan Dokumen Strategi Program (SP) Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) Kota Madiun 2003 dan 2004**

PENILAIAN GS – NGS	USULAN GS – NGS	MENURUT POKJA (G S + N G S) FAKTA	DIANGKAT ?	APAKAH MASUK ISU STRATEGIS ?	RUMUSAN ISU STRATEGIS
1. Pelaksanaan Pembangunan (fisik) kurang koordinasi dengan pihak terkait dan tidak melalui penelitian yg mendalam	<p>2</p> <p>1. Kegiatan Fisik Skala Kelurahan diswakelolaan masyarakat</p>	<p>3</p> <p>YA</p>	<p>4</p> <p>YA</p>	<p>5</p> <p>YA</p>	<p>6</p> <p>Pelaksanaan pembangunan (fisik) kurang koordinasi dengan pihak terkait dan kurang melalui penelitian mendalam (1)</p>
2. Kerja kontraktor (fisik) kualitasnya kurang baik	<p>2. Pembangunan fisik harus memperhatikan lingkungan hidup</p>	<p>YA</p>	<p>YA</p>	<p>YA</p>	<p>Kualitas kerja kontraktor belum sesuai standar, mekanisme penentuan kontraktor kurang selektif dan kurang transparan serta masih lemah pengawasan kegiatannya. (2)</p>
3. Rencana Tata Ruang Kota/Wilayah – RTRK/W belum disosialisasikan ke masyarakat (setiap kelurahan belum ada fotocopynya)	<p>3. Pembangunan tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga SDM</p>	<p>Masih dikerjakan kontraktor</p>	<p>TIDAK, Pemkot bertekad swakelolaan</p>	<p>TIDAK</p>	<p>Sosialisasi dan implementasi Perda RTRK/W belum optimal (3)</p>

**Strategi Program (SP)**

4.2.	1	2	3	4	5	6
4. Penataan kota belum seperti yang diharapkan masyarakat	4. Pembangunan fisik supaya memperhatikan masyarakat menengah ke bawah	YA	TIDAK, masuk isu no. 4	TIDAK	6	
		Belum sesuai harapan	TIDAK, Masuk isu no. 4	TIDAK		
		YA	YA	YA		No. 7 dan 8 Rumusan digabung :
		Belum sepenuhnya memperhatikan	YA	YA		Pemanfaatan pembangunan fisik belum diikuti penyediaan sumber daya manusianya (4)
		YA	YA	YA		Pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, pelestarian) kurang partisipatif (5)
		Belum dikembangkan	YA	YA		Wahana dialog publik kurang dikembangkan (6)
		YA	YA	YA		Kinerja legislatif belum seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya (7)

**Strategi Program (SP)**

1	2	3	4	5	6
4.2.					
4. Koordinasi dengan Pemkab. Madiun dalam mengatasi banjir di Kota yang diakibatkan oleh persoalan di wil. Kab. Madiun masih kurang		3 YA	4 YA	5 YA	6 Masih kurang adanya koordinasi yang intensif antar Pemkab / bakorwil Madiun dalam mengatasi banjir / genangan di kota yang diakibatkan oleh persoalan di wilayah Pemkab sekitar (8)
5. Litbangda perlu berdin sendiri		Kinerja belum maksimal	YA	YA	Kurang optimalnya kinerja Litbang (9)
6. Good and clean Governance ditegakkan		Komitmen pemerintahan masih lemah	YA	YA	Lemahnya komitmen terhadap penegakan pelaksanaan good and clean governance (10)
7. Penggalan PAD harus memperhatikan masyarakat menengah ke bawah		Perthatian belum maksimal	YA	YA	Penggalan PAD belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat menengah ke bawah (11)
1. Peringatan hari jadi kota tidak hura-hura		Perkesan hura –hura	YA	YA	Peringatan hari jadi kota masih bersifat hura – hura (12)
2. Digali budaya khas kota		Sudah dilakukan	TIDAK	TIDAK	

**Strategi Program (SP)**

4.2.	1	2	3	4	5	6
1. Keadilan dan kepastian hukum belum ditegakkan			YA	TIDAK, Masuk rumusan isu no. 10	TIDAK	
2. Keamanan perlu dimantapkan		Belum terjamin	YA	YA	YA	Kurang terjaminnya ketertarikan dan ketertiban (tramtib) (13)
3. KKN di semua pelayanan publik diberantas		Masih ada KKN	TIDAK, masuk isu no. 10	TIDAK	TIDAK	
4. Togel, miras, narkoba yang merusak moral anak diberantas		Pemberantasan belum optimal	YA	YA	YA	Belum optimal pemberantasan Togel, miras dan narkoba yang merusak moral masyarakat (14)
5. Anggaran untuk pembangunan mental spiritual ditingkatkan		Anggaran masih minim	YA	YA	YA	Masih minimnya anggaran di bidang pembangunan mental spiritual (15)
1. Program pengentasan kemiskinan harus riil		Belum optimal penanganannya	YA	YA	YA	Program pengentasan kemiskinan masih kurang berhasil (16)



**Strategi Program (SP)**

4.2.	1	2	3	4	5	6
	1. Puskesmas yang ada ditingkatkan	Pelayanan masih kurang	YA	YA	Masih kurang memadainya pelayanan kesehatan di Puskesmas (17)	
	2. Disetiap kelurahan harus ada Puskesmas Pembantu	Sudah ada	TIDAK	TIDAK		
	3. Pelayanan kesehatan yang murah	Sudah dirintis.	TIDAK	TIDAK		
1.	Pengguguran semakin banyak	YA	YA	YA	Jumlah pengangguran semakin banyak (18)	
	2. Digalakkan pendidikan wirausaha	Belum optimal	TIDAK, masuk isu no. 18	TIDAK		
	1. Pendidikan yang murah	Masih mahal	YA	YA	Rumusan gabungan	
	2. Perlu pendidikan D3 Akupuntur	Belum perlu	TIDAK	TIDAK		
	3. Perlu peningkatan mutu guru - dosen	Mutu kurang	YA	YA	No. 1, 3 & 4 digabung : Mahalnya biaya pendidikan belum diimbangi dengan mutunya (19)	
	4. Perlu peningkatan mutu lembaga pendidikan (TK-PT) swasta	Mutu kurang	YA	YA		

**Strategi Program (SP)**

1	2	3	4	5	6
4.2.					
1.					
	5. Perlu sosialisasi sistem penerimaan siswa baru	SUDAH	TIDAK	TIDAK	
	6. Segera disosialisasikan kurikulum berbasis kompetensi di masyarakat	Belum efektif	TIDAK	TIDAK	
	1. Pembinaan koperasi lebih efektif	Belum efektif	TIDAK, masuk isu no. 20	TIDAK	
	2. Koperasi agar berperan dalam meningkatkan ekonomi rakyat	Belum berperan	YA	YA	Harapan terhadap koperasi sebagai soko guru perekonomian masih sebatas slogan (20)
	1. Ada pembinaan UKM di setiap kelurahan	Belum nampak	YA	YA	Kurang diberdayakan nya potensi UKM di kelurahan (21)
	2. Perlu modal untuk UKM	YA	TIDAK, masuk isu no. 21	TIDAK	
	3. Perlu perlindungan untuk UKM	Belum optimal	TIDAK, masuk isu no. 21	TIDAK	
	4. Digali produk unggulan kota	Sudah dirintis	TIDAK, masuk isu no. 21	TIDAK	
	5. Perlu pusat perkulakan UKM	Sudah ada	TIDAK	TIDAK	

**Strategi Program (SP)**

4.2.	1	2	3	4	5	6
	1. Perlu kebijakan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Belum nampak hasilnya	YA	YA	Kurang berpihaknya kebijakan Pemkot terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan secara kongkrit (22)	
	2. Ekonomi kerakyatan ditingkatkan	Belum nampak	TIDAK, masuk isu no. 22	TIDAK		
	3. Adakan perluasan usaha yang menyerap tenaga kerja banyak (padat karya) berkesinambungan	Belum berhasil	TIDAK, masuk isu no. 22	TIDAK		

**Tabel 4.3. Isu Strategis GS – NGS yang Telah Disempurnakan Redaksinya**

NO	ISU UTAMA	SUB ISU	PENYEMPURNAAN RUMUSAN SUB ISU
1.		Pelaksanaan pembangunan (fisik) kurang koordinasi dengan pihak terkait dan kurang melalui penelitian mendalam	Pelaksanaan Pembangunan fisik, khususnya PLN, Jalan, PDAM, Telkom dan drainase kurang koordinasi dengan pihak terkait dan kurang melalui penelitian mendalam
1.	SARANA DAN PRASARANA	Kualitas kerja kontraktor belum sesuai standar, mekanisme penentuan kontraktor kurang selektif dan kurang transparan serta masih lemah pengawasan kegiatannya.	Kualitas kerja kontraktor belum sesuai standar, mekanisme penentuan kontraktor kurang selektif dan kurang transparan, serta masih lemah dalam pengawasan kegiatannya
3.		Pemanfaatan pembangunan fisik belum diikuti penyiapan sumber daya manusianya	Pemanfaatan pembangunan fisik belum diikuti penyiapan sumberdaya manusianya (SDM)
4.		Sosialisasi dan implementasi Perda RTRK/W belum optimal	Sosialisasi dan implementasi Perda RTRK/W belum optimal
5.		Belum optimal pemberantasan Togel, miras dan narkoba yang merusak moral masyarakat	Belum optimal pemberantasan togel, miras dan narkoba serta prostitusi yang merusak moral masyarakat
6.		Kurang berpihaknya kebijakan Pemkot terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan secara kongkrit	Kurang berpihaknya kebijakan pemerintah kota terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan secara kongkrit

**Strategi Program (SP)**

3.	<p><b>INSTITUSI</b></p>	<p>Pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, Pengawasan, pelestarian) kurang partisipatif</p>
7.	<p>Pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, pelestarian) kurang partisipatif</p>	<p>Pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, Pengawasan, pelestarian) kurang partisipatif</p>
8.	<p>Wahana dialog publik kurang dikembangkan</p>	<p>Wahana dialog publik kurang dikembangkan</p>
9.	<p>Kinerja legislatif belum seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya</p>	<p>Kinerja Legislatif belum seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya</p>
10.	<p>Masih kurang adanya koordinasi yang intensif antar Pemkab / bakorwil Madiun dalam mengatasi banjir / genangan di kota yang diakibatkan oleh persoalan di wilayah Pemkab sekitar</p>	<p>Masih kurang adanya koordinasi yang intensif antar Pemkab / Bakorwil Madiun dalam mengatasi banjir / genangan di kota yang diakibatkan oleh persoalan di wilayah Pemkab sekitar</p>
11.	<p>Kurang optimalnya kinerja Litbang</p>	<p>Kurang optimalnya peran litbang</p>
12.	<p>Lemahnya komitmen terhadap penegakan pelaksanaan good and clean governance</p>	<p>Lemahnya komitmen terhadap penegakan pelaksanaan good &amp; clean governance</p>
13.	<p>Penggalan PAD belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat menengah ke bawah</p>	<p>Penggalan PAD belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat menengah ke bawah</p>
14.	<p>Peringatan hari jadi kota masih bersifat hura-hura</p>	<p>Peringatan hari jadi kota masih bersifat hura-hura</p>
15.	<p>Masih minimnya anggaran di bidang pembangunan mental spiritual</p>	<p>Masih minimnya anggaran di bidang pembangunan mental spiritual</p>
4.	<p><b>ANGGARAN DAERAH</b></p>	

**Strategi Program (SP)**

5. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	16. Kurang terjaminnya ketentraman dan ketertiban (tramtib)	Kurang terjaminnya ketentraman dan ketertiban (tramtib)
6. KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	17. Program pengentasan kemiskinan masih kurang berhasil	Program pengentasan kemiskinan masih kurang berhasil
	18. Jumlah pengangguran semakin banyak	Jumlah pengangguran semakin banyak
7. KESEHATAN	19. Masih kurang memadainya pelayanan kesehatan di Puskesmas	Masih kurang memadainya pelayanan kesehatan di Puskesmas
8. PENDIDIKAN	20. Mahalnya biaya pendidikan belum diimbangi dengan mutunya	Mahalnya biaya pendidikan belum diimbangi dengan mutunya
9. KOPERASI DAN UKM	21. Harapan terhadap koperasi sebagai soko guru perekonomian masih sebatas slogan	Harapan terhadap koperasi sebagai soko guru perekonomian masih sebatas slogan
	22. Kurang diberdayakan nya potensi UKM di kelurahan	Kurang diberdayakannya potensi UKM di kelurahan

**Strategi Program (SP)**

**Tabel 4.5. Scoring Isu Strategis Kota Madiun**

NO	ISU STRATEGIS	KRITERIA								TOTAL NILAI
		I (B=4)		II (B=3)		III (B=2)		IV (B=1)		
		NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	
1.	Pelaksanaan Pembangunan fisik, khususnya PLN, jalan, PDAM, Telkom dan drainase kurang koordinasi dengan pihak terkait dan kurang melalui penelitian mendalam	90	360	70	210	50	100	50	50	720
2.	Kualitas kerja kontraktor belum sesuai standar, mekanisme penentuan kontraktor kurang selektif dan kurang transparan, serta masih lemah dalam pengawasan kegiatannya	95	380	50	150	70	140	95	95	765
3.	Pemanfaatan pembangunan fisik belum diikuti penyediaan sumberdaya manusianya (SDM)	88	352	75	225	90	180	55	55	812
4.	Sosialisasi dan implementasi Perda RTRK/W belum optimal	68	272	98	294	65	130	75	75	781
5.	Belum optimal pemberantasan togel, miras dan narkoba serta prostitusi yang merusak moral masyarakat	90	360	64	192	45	90	25	25	667
6.	Kurang berpihaknya kebijakan pemerintah kota terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan secara kongkrit	90	360	90	270	90	180	90	90	900
7.	Pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, Pengawasan, pelestarian) kurang partisipatif	95	380	98	294	95	190	90	90	954

**Strategi Program (SP)**

NO	ISU STRATEGIS	KRITERIA								TOTAL NILAI
		I (B=4)		II (B=3)		III (B=2)		IV (B=1)		
		NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	
8.	Wahana dialog publik kurang dikembangkan	70	280	88	264	90	180	60	60	<b>784</b>
9.	Kinerja Legislatif belum seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya	90	360	75	225	90	180	85	85	<b>850</b>
10.	Masih kurang adanya koordinasi yang intensif antar Pemkab / Bakorwil Madiun dalam mengatasi banjir / genangan di kota yang diakibatkan oleh persoalan di wilayah Pemkab sekitar	55	220	75	225	50	100	45	45	<b>590</b>
11.	Kurang optimalnya peran litbang	80	320	95	285	90	180	90	90	<b>885</b>
12.	Lemahnya komitmen terhadap penegakan pelaksanaan good & clean governance	98	392	98	294	95	190	95	95	<b>971</b>
13.	Penggalian PAD belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat menengah ke bawah	75	300	90	270	70	140	95	95	<b>785</b>
14.	Peringatan hari jadi kota masih bersifat hura hura	45	180	50	150	45	90	25	25	<b>445</b>
15.	Masih minimnya anggaran di bidang pembangunan mental spiritual	98	392	80	240	85	170	65	65	<b>867</b>



**Strategi Program (SP)**

NO	ISU STRATEGIS	KRITERIA								TOTAL NILAI
		I (B=4)		II (B=3)		III (B=2)		IV (B=1)		
		NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	
16.	Kurang terjaminnya ketentraman dan keteriban (tramtib)	98	392	90	270	75	150	80	80	<b>892</b>
17.	Program pengentasan kemiskinan masih kurang berhasil	98	392	98	294	98	196	98	98	<b>980</b>
18.	Jumlah pengangguran semakin banyak	96	384	96	288	96	192	96	96	<b>960</b>
19.	Masih kurang memadainya pelayanan kesehatan di Puskesmas	95	380	95	285	96	192	95	95	<b>952</b>
20.	Mahalnya biaya pendidikan belum diimbangi dengan mutunya	95	380	95	285	95	190	95	95	<b>950</b>
21.	Harapan terhadap koperasi sebagai soko guru perekonomian masih sebatas slogan	90	360	90	270	90	180	90	90	<b>900</b>
22.	Kurang diberdayakannya potensi UKM di kelurahan	93	372	94	282	95	190	96	96	<b>940</b>

**Strategi Program (SP)**

**Tabel 4.6. Scoring Isu Strategis Kota Madiun (Berdasarkan Ranking)**

NO	ISU STRATEGIS	KRITERIA				TOTAL NILAI				
		I (B=4)	II (B=3)	III (B=2)	IV (B=1)					
		NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	
1.	Program pengentasan kemiskinan masih kurang berhasil	98	392	98	294	98	196	98	98	<b>980</b>
2.	Lemahnya komitmen terhadap penegakan pelaksanaan good & clean governance	98	392	98	294	95	190	95	95	<b>971</b>
3.	Jumlah pengangguran semakin banyak	96	384	96	288	96	192	96	96	<b>960</b>
4.	Pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, Pengawasan, pelestarian) kurang partisipatif	95	380	98	294	95	190	90	90	<b>954</b>
5.	Masih kurang memadainya pelayanan kesehatan di Puskesmas	95	380	95	285	96	192	95	95	<b>952</b>
6.	Mahalnya biaya pendidikan belum diimbangi dengan mutunya	95	380	95	285	95	190	95	95	<b>950</b>
7.	Kurang diberdayakannya potensi UKM di kelurahan	93	372	94	282	95	190	96	96	<b>940</b>

**Strategi Program (SP)**

NO	ISI STRATEGIS	KRITERIA				TOTAL NILAI				
		I (B-1) NILAI TOTAL	II (B-2) NILAI TOTAL	III (B-3) NILAI TOTAL	IV (B-4) NILAI TOTAL					
8.	Harapan terhadap koperasi sebagai soko guru perekonomian masih sebatas slogan	90	360	90	270	90	180	90	90	<b>900</b>
9.	Kurang berpihaknya kebijakan pemerintah kota terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan secara kongkrit	90	360	90	270	90	180	90	90	<b>900</b>
10.	Kurang terjaminnya ketentraman dan ketertiban (tramtib)	98	392	90	270	75	150	80	80	<b>892</b>
11.	Kurang optimalnya peran litbang	80	320	95	285	90	180	90	90	<b>885</b>
12.	Masih minimnya anggaran di bidang pembangunan mental spiritual	98	392	80	240	85	170	65	65	<b>867</b>
13.	Kinerja Legislatif belum seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya	90	360	75	225	90	180	85	85	<b>850</b>
14.	Pemanfaatan pembangunan fisik belum diikuti penyiapan sumberdaya manusianya (SDM)	88	352	75	225	90	180	55	55	<b>812</b>
15.	Penggalan PAD belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat menengah ke bawah	75	300	90	270	70	140	95	95	<b>785</b>
16.	Wahana dialog publik kurang dikembangkan	70	280	88	264	90	180	60	60	<b>784</b>

**Strategi Program (SP)**

NO	ISU STRATEGIS	KRITERIA								TOTAL NILAI
		I (B=4)		II (B=3)		III (B=2)		IV (B=1)		
		NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	
17.	Sosialisasi dan implementasi Perda RTRK/W belum optimal	68	272	98	294	65	130	75	75	<b>781</b>
18.	Kualitas kerja kontraktor belum sesuai standar, mekanisme penentuan kontraktor kurang selektif dan kurang transparan, serta masih lemah dalam pengawasan kegiatannya	95	380	50	150	70	140	95	95	<b>765</b>
19.	Pelaksanaan Pembangunan fisik, khususnya PLN, jalan, PDAM, Telkom dan drainase kurang koordinasi dengan pihak terkait dan kurang melalui penelitian mendalam	90	360	70	210	50	100	50	50	<b>720</b>
20.	Belum optimal pemberantasan togel, miras dan narkoba serta prostitusi yang merusak moral masyarakat	90	360	64	192	45	90	25	25	<b>667</b>
21.	Masih kurang adanya koordinasi yang intensif antar Pemkab / Bakorwil Madiun dalam mengatasi banjir / genangan di kota yang diakibatkan oleh persoalan di wilayah Pemkab sekitar	55	220	75	225	50	100	45	45	<b>590</b>
22.	Peringatan hari jadi kota masih bersifat hura-hura	45	180	50	150	45	90	25	25	<b>445</b>

**Strategi Program (SP)**

**Tabel 4.7. Prioritas Isu Strategis Kota Madiun (Berdasarkan Ranking)**

NO	ISU STRATEGIS	KRITERIA								
		I (B=4)		II (B=3)		III (B=2)		IV (B=1)		TOTAL
		NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	NILAI	TOTAL	NILAI
1.	Program pengentasan kemiskinan masih kurang berhasil	98	392	98	294	98	196	98	98	<b>980</b>
2.	Lemahnya komitmen terhadap penegakan pelaksanaan good & clean governance	98	392	98	294	95	190	95	95	<b>971</b>
3.	Jumlah pengangguran semakin banyak	96	384	96	288	96	192	96	96	<b>960</b>
4.	Pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, pelestarian) kurang partisipatif	95	380	98	294	95	190	90	90	<b>954</b>
5.	Masih kurang memadainya pelayanan kesehatan di Puskesmas	95	380	95	285	96	192	95	95	<b>952</b>
6.	Mahalnya biaya pendidikan belum diimbangi dengan mutunya	95	380	95	285	95	190	95	95	<b>950</b>
7.	Kurang diberdayakannya potensi UKM di kelurahan	93	372	94	282	95	190	96	96	<b>940</b>

Tabel 4.8. Isu Strategis Kota Madiun

NO	ISU STRATEGIS
1.	Program pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran masih kurang berhasil.
2.	Lemahnya komitmen terhadap penegakan pelaksanaan <i>Good &amp; Clean Governance</i> .
3.	Masih kurang memadainya pelayanan kesehatan di Puskesmas.
4.	Mahalnya biaya pendidikan belum diimbangi dengan mutunya.
5.	Kurang diberdayakannya potensi UKM di kelurahan.

Tabel 4.9. Isu Strategis Kota Madiun Berdasarkan Prioritas

NO	ISU STRATEGIS
1.	Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal
2.	Pelayanan Kesehatan dasar masyarakat belum memadai
3.	Mahalnya biaya pendidikan perlu diimbangi dengan mutunya

Tabel 4.10. Pendekatan Prioritisasi Isu Strategis

ISU STRATEGIS	SCORE RATA-RATA			TOTAL	RANKING
	URGENSI	SERIOUS	GROWTH		
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL	4,7	4,0	4,5	13,2	I
KESEHATAN	3,1	3,4	3,3	10,4	III
PENDIDIKAN	4,2	4,2	4,2	12,6	II

Tabel 4.11. Isu Strategis Kota Madiun Prioritas Berdasarkan Ranking

NO	ISU STRATEGIS
1.	Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal
2.	Mahalnya biaya pendidikan perlu diimbangi dengan mutunya
3.	Pelayanan Kesehatan dasar masyarakat belum memadai

Tabel 4.12. Isu Strategis Kota Madiun (Final)

NO	ISU STRATEGIS
1.	Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal
2.	Mahalnya biaya pendidikan perlu diimbangi dengan mutunya
3.	Pelayanan kesehatan masyarakat belum memadai

**BAB V**

**AGENDA DAN PENTAHAPAN JANGKA MENENGAH**

**5.1. Analisa SWOT**

Analisa SWOT (Strenght = kekuatan, Weaknesses = kelemahan, Opportunities = peluang, Threats = tantangan) dilakukan terhadap isu strategis Kota Madiun yang ditetapkan. Namun sebelumnya ditentukan / dirumuskan terlebih dahulu tujuan dan sasaran dari isu strategis tersebut. Sedangkan uraiannya sebagai berikut :

**1. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal**

*Tujuan :*

- 1) Menjadikan UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi kota

*Sasaran :*

- 1) Terwujudnya pelaku ekonomi yang tangguh dalam menghadapi era AFTA
- 2) Terwujudnya sinergi stakeholders ekonomi dalam pengembangan ekonomi kota.



**2. Mahalnya biaya pendidikan perlu diimbangi dengan mutunya**

*Tujuan :*

- 1) Peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan mengutamakan upaya pencapaian target Wajar Dikdas.
- 2) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Terselenggaranya desentralisasi dan otonomi pendidikan yang didukung dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat.
- 4) Memberdayakan lembaga pendidikan luar sekolah.

*Sasaran :*

- 1) Meningkatkan APK SD/MI ; SLTP / MTs. ; SMU / MA / SMK.
- 2) Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah / masyarakat.
- 3) Memperluas jangkauan dan daya tampung SMU, SMK dan MA bagi seluruh masyarakat.
- 4) Meningkatnya kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung.
- 5) Meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja.

- 6) Meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik.
- 7) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan.
- 8) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- 9) Menurunkan angka buta aksara latin, angka buta Bahasa Indonesia dan buta Pengetahuan Dasar pada penduduk usia 10 – 44 tahun.
- 10) Menyediakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal termasuk anak usia dini, serta pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan kemampuan kewirausahaan.

### **3. Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat belum Memadai**

*Tujuan :*

- 1) Peningkatan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.
- 2) Peningkatan pelayanan gizi dan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan gizi.

- 3) Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang semakin merata dan terjangkau.
- 4) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat yang bermutu serta penanggulangan NAPZA.

*Sasaran :*

- 1) Tersedianya pelayanan kesehatan dasar masyarakat dan rujukan baik pemerintah maupun swasta yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan pra upaya.
- 2) Menurunnya angka kesakitan penyakit.
- 3) Menurunnya kejadian penyakit menular dan tidak menular.
- 4) Meningkatnya rasio tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dibanding jumlah penduduk.
- 5) Menurunnya prevalensi gizi buruk / kurang.
- 6) Tersedianya prasarana dan sarana kesehatan.
- 7) Terjaminnya mutu produk farmakes yang beredar.
- 8) Tekendalinya penyaluran NAPZA.
- 9) Terhindarinya masyarakat dari penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat dan narkoba.

**5.2. Agenda Kebijakan Strategi Pemkot Madiun Jangka Menengah**

Agenda Jangka Menengah / Strategi diperoleh dari hasil analisa SWOT terhadap ketiga isu Strategi Kota Madiun. Sedangkan hasilnya kita lihat pada Tabel 5.2.

**5.3. Pentahapan Agenda Kebijakan Strategis Pemkot Madiun Jangka Menengah**

Berdasarkan isu strategis Kota Madiun yang sudah dilakukan analisa SWOT dan menghasilkan Agenda Jangka Menengah / Strategi, selanjutnya disusun pentahapan pelaksanaan Agenda Jangka Menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana Tabel 5.3.

Tabel 5.1.a. Analisa SWOT : **PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL**

<p><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> <p><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p><b>S = STRENGTH (KEKUATAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi</li> <li>Tersedianya Prasarana dan Sarana industri, perdagangan dan jasa sesuai RTRW</li> </ol>	<p><b>W = WEAKNESSES (KELEMAHAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan UMKM (stakeholders) baik formal maupun informal kurang profesional</li> <li>Kurang maksimalnya perkembangan sentra UMKM</li> <li>Kurang berkembangnya produk unggulan</li> </ol>
<p><b>O = OPPORTUNITIES (PELUANG)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagai pusat SWP Jawa Timur bag. Barat</li> <li>Pengembangan pasar secara global menghadapi diberlakukannya AFTA</li> <li>Terbukanya bantuan Technical Assistance (TA) dan Dana dari Pihak ke tiga</li> </ol>	<p><b>STRATEGI S - O</b></p> <p>Optimalisasi keberadaan sektor industri, perdagangan dan jasa guna melayani kebutuhan masyarakat di daerah hinterland dan luar negeri</p>	<p><b>STRATEGI W - O</b></p> <p>Pemberdayaan UMKM di bidang Manajemen</p>
<p><b>T = THREATS (TANTANGAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Daerah hinterland sudah mengembangkan sektor industri, perdagangan dan jasa</li> <li>Adanya produk yang masuk kota akibat diberlakukannya pasar global (AFTA)</li> </ol>	<p><b>STRATEGI S - T</b></p> <p>Mempertuat daya saing produk yang bersifat komparasi dan kompetitif guna menghadapi produk luar (luar daerah / luar negeri)</p>	<p><b>STRATEGI W - T</b></p> <p>Peningkatan pengelolaan UMKM (stakeholders) sektor formal maupun informal</p>

**Strategi Program (SP)**

Tabel 5.1.b. Analisa SWOT : **PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

<p><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> <p><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p> <p><b>O = OPPORTUNITIES (PELUANG)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya minat masyarakat (daerah hinterland maupun masyarakat kota) untuk bersekolah di kota.</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan / pengembangan sekolah.</li> <li>3. Adanya kebijakan MPMBS.</li> </ol>	<p><b>S = STRENGTH (KEKUATAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sekolah cukup representatif.</li> <li>2. Sarana dan Prasarana sudah cukup memadai</li> <li>3. Dimilikinya UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS</li> </ol> <p><b>STRATEGI S - O</b></p> <p>Optimalisasi sarana dan prasarana untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu, khususnya bagi masyarakat kota Madiun dan daerah hinterland.</p>	<p><b>W = WEAKNESSES (KELEMAHAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang optimalnya penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK).</li> <li>2. Kurang optimalnya pengelolaan pendidikan luar sekolah.</li> <li>3. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan.</li> </ol> <p><b>STRATEGI W - O</b></p> <p>Optimalisasi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap.</p>
<p><b>T = THREATS (TANTANGAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan terhadap kualitas pendidikan semakin meningkat.</li> <li>2. Adanya globalisasi dunia pendidikan</li> <li>3. Madiun sebagai Kota Transit</li> </ol>	<p><b>STRATEGI S - T</b></p> <p>Pelaksanaan secara bertahap dan konsisten Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS guna peningkatan kualitas pendidikan, dalam konteks MPMBS.</p>	<p><b>STRATEGI W - T</b></p> <p>Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan, termasuk pendidikan luar sekolah bersama stakeholders pendidikan.</p>

Tabel 5.1.c. Analisis SWOT : **PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**

<p><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> <p><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p><b>S = STRENGTH (KEKUATAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah sakit di Kota Madiun menjadi rujukan rumah sakit daerah sekitar</li> <li>2. Bertambahnya sarana dan prasarana kesehatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.</li> <li>3. Rasio tenaga medis di atas standar Nasional.</li> </ol>	<p><b>W = WEAKNESSES (KELEMAHAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan tenaga medis, paramedis dan sarana di Puskesmas.</li> <li>2. Belum dimilikinya rumah sakit spesialis tertentu.</li> </ol>
<p><b>O = OPPORTUNITIES (PELUANG)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya teknologi peralatan kesehatan yang semakin baik.</li> <li>2. Adanya kesempatan memperoleh bantuan untuk pelayanan kesehatan dari lembaga donor.</li> <li>3. Tumbuhnya partisipasi masyarakat di bidang kesehatan.</li> <li>4. Pola hidup sehat masyarakat meningkat.</li> </ol>	<p><b>STRATEGI S - O</b></p> <p>Optimalisasi keberadaan rumah sakit, baik milik Pemerintah maupun swasta dan Puskesmas guna melayani kesehatan masyarakat kota dan daerah hinterland.</p> <p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.</p>	<p><b>STRATEGI W - O</b></p> <p>Peningkatan prasarana dan sarana medis agar tercipta kesehatan masyarakat.</p>
<p><b>T = THREATS (TANTANGAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya pelayanan kesehatan yang cenderung meningkat.</li> <li>2. Banyaknya jenis penyakit.</li> </ol>	<p><b>STRATEGI S - T</b></p> <p>Optimalisasi tenaga medis dan paramedis serta ciptakan lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kesehatan masyarakat.</p>	<p><b>STRATEGI W - T</b></p> <p>Optimalisasi sumberdaya Rumah Sakit untuk peningkatan mutu Rumah Sakit dan pengembangannya.</p>

Tabel 5.2.a. Agenda Jangka Menengah : **PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL**

NO	ISU UTAMA	SUB ISU / MASALAH	AGENDA 5 TAHUN / STRATEGI
1.	EKONOMI	<p>BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjadikan UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi kota</li> </ol> <p><b>Sasaran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya pelaku ekonomi yang tangguh dalam menghadapi era AFTA</li> <li>Terwujudnya sinergi stakeholders ekonomi dalam pengembangan ekonomi kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi keberadaan sektor industri, perdagangan dan jasa guna melayani kebutuhan masyarakat di daerah hinterland dan luar negeri.</li> <li>Memperkuat daya saing produk yang bersifat komparasi dan kompetitif guna menghadapi produk luar (luar daerah / luar negeri).</li> <li>Pemberdayaan UMKM di bidang manajemen.</li> <li>Peningkatan profesionalisme pengelolaan UMKM (Stakeholders) sektor formal maupun informal.</li> </ol>

Tabel 5.2.b. Agenda Jangka Menengah : **PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

NO	ISU UTAMA	SUB ISU / MASALAH	AGENDA 5 TAHUN / STRATEGI
2.	PENDIDIKAN	<p>MAHALNYA BIAYA PENDIDIKAN PERLU DIIMBANGI DENGAN MUTUNYA</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan mengutamakan upaya pencapaian target Wajar Dikdas.</li> <li>Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>Terselenggaranya desentralisasi dan otonomi pendidikan yang didukung dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat.</li> <li>Memberdayakan lembaga pendidikan luar sekolah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi sarana dan prasarana untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu, khususnya bagi masyarakat kota Madiun dan daerah hinterland.</li> <li>Pelaksanaan secara bertahap dan konsisten undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas guna peningkatan kualitas pendidikan, dalam konteks MPMBS.</li> </ol>



## Strategi Program (SP)

	<p><b>Sasaran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan APK SD/MI ; SLTP / MTs. ; SMU / MA / SMK.</li><li>2. Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah / masyarakat.</li><li>3. Memperluas jangkauan dan daya tampung SMU, SMK dan MA bagi seluruh masyarakat.</li><li>4. Meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung.</li><li>5. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja.</li><li>6. Meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik.</li><li>7. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan.</li><li>8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.</li><li>9. Menurunkan angka buta aksara latin, angka buta Bahasa Indonesia dan buta Pengetahuan Dasar pada penduduk usia 10 - 44 tahun.</li><li>10. Menyediakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal termasuk anak usia dini, serta pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan kemampuan kewirausahaan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Optimalisasi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap.</li><li>4. Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan, termasuk pendidikan luar sekolah bersama stakeholders pendidikan.</li></ol>
--	---	---

Tabel 5.2.c. Agenda Jangka Menengah : PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

NO	ISU UTAMA	SUB ISU / MASALAH	AGENDA 5 TAHUN / STRATEGI
3.	KESEHATAN	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BELUM MEMADAI <b>Tujuan :</b>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.</li> <li>2. Peningkatan pelayanan gizi dan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan gizi.</li> <li>3. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang semakin merata dan terjangkau.</li> <li>4. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat yang bermutu serta penanggulangan NAPZA.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi keberadaan rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta dan Puskesmas guna melayani kesehatan masyarakat kota dan daerah hinterland.</li> <li>2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.</li> <li>3. Peningkatan prasarana dan sarana medis agar tercipta kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Optimalisasi tenaga medis dan paramedis serta ciptakan lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kesehatan masyarakat.</li> <li>5. Mengembangkan Rumah Sakit Spesialis tertentu guna melayani kesehatan dasar masyarakat kota dan daerah hinterland.</li> </ol>
		<p><b>Sasaran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pelayanan kesehatan dasar masyarakat dan rujukan baik pemerintah maupun swasta yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan pra upaya.</li> <li>2. Menurunnya angka kesakitan penyakit.</li> <li>3. Menurunnya kejadian penyakit menular dan tidak menular.</li> <li>4. Meningkatnya rasio tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dibanding jumlah penduduk.</li> <li>5. Menurunnya prevalensi gizi buruk / kurang.</li> <li>6. Tersedianya prasarana dan sarana kesehatan.</li> <li>7. Terjaminnya mutu produk farmakes yang beredar.</li> <li>8. Tektendalinya penyaluran NAPZA.</li> <li>9. Terhindarnya masyarakat dari penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat dan narkoba.</li> </ol>	

Tabel 5.3.a. Pentahapan Pelaksanaan Agenda Jangka Menengah : **PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL**

NO	ISU STRATEGIS	AGENDA 5 TAHUN (STRATEGI)				
		I	II	III	IV	V
1.	<p><b>EKONOMI</b>  <b>BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL</b>  <b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjadikan UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi kota</li> </ol> <p><b>Sasaran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya pelaku ekonomi yang tangguh dalam menghadapi era AFTA</li> <li>Terwujudnya sinergi stakeholders ekonomi dalam pengembangan ekonomi kota.</li> </ol>					

- Optimalisasi keberadaan sektor industri, perdagangan dan jasa guna melayani kebutuhan masyarakat di daerah hinterland dan luar negeri.
- Memperkuat daya saing produk yang bersifat komparasi dan kompetitif guna menghadapi produk luar (luar daerah / luar negeri).
- Pemberdayaan UMKM di bidang manajemen.
- Peningkatan profesionalisme pengelolaan UMKM (stakeholders) sektor formal maupun informal.

Tabel 5.3.b. Pentahapan Pelaksanaan Agenda Jangka Menengah : **PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

NO	ISU STRATEGIS	AGENDA 5 TAHUN (STRATEGI)	TAHAPAN (TAHUN)				
			I	II	III	IV	V
2.	<p><b>PENDIDIKAN MAHALNYA BIAYA PENDIDIKAN PERLU DIJANGKI DENGAN MUTUNYA</b></p> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan mengutamakan upaya pencapaian target Wajar Dikdas.</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>3. Terselenggaranya desentralisasi dan otonomi pendidikan yang didukung dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat.</li> <li>4. Memberdayakan lembaga pendidikan luar sekolah.</li> </ol> <p><b>Sasaran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan APK SD/MI ; SLTP / MTs. ; SMU / MA / SMK.</li> <li>2. Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah / masyarakat.</li> <li>3. Mempertuas jangkauan dan daya tampung SMU, SMK dan MA bagi seluruh masyarakat.</li> <li>4. Meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja.</li> <li>6. Meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik.</li> <li>7. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan.</li> <li>8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.</li> <li>9. Menurunkan angka buta aksara latin, angka buta Bahasa Indonesia dan buta Pengetahuan Dasar pada penduduk usia 10 – 44 tahun.</li> <li>10. Menyediakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal termasuk anak usia dini, serta pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan kemampuan kewirausahaan.</li> </ol>						
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu, khususnya bagi masyarakat kota Madiun dan daerah hinterland.</li> <li>2. Pelaksanaan secara bertahap dan konsisten undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas guna peningkatan kualitas pendidikan, dalam konteks MPMBS.</li> <li>3. Optimalisasi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap.</li> <li>4. Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah bersama stakeholders pendidikan.</li> </ol>					

Tabel 5.3.c. Pentahapan Pelaksanaan Agenda Jangka Menengah : **PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**

NO	ISU STRATEGIS	AGENDA 5 TAHUN (STRATEGI)				
		II	III	IV	V	
3.	<p><b>KESEHATAN</b> PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BELUM MEMADAI</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.</li> <li>2. Peningkatan pelayanan gizi dan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan gizi.</li> <li>3. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang semakin merata dan terjangkau.</li> <li>4. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat yang bermutu serta penanggulangan NAPZA.</li> </ol> <p><b>Sasaran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pelayanan kesehatan dasar masyarakat dan rujukan baik pemerintah maupun swasta yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan pra upaya.</li> <li>2. Menurunnya angka kesakitan penyakit.</li> <li>3. Menurunnya kejadian penyakit menular dan tidak menular.</li> <li>4. Meningkatkan rasio tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dibanding jumlah penduduk.</li> <li>5. Menurunnya prevalensi gizi buruk / kurang.</li> <li>6. Tersedianya prasarana dan sarana kesehatan.</li> <li>7. Terjaminnya mutu produk farmakes yang beredar.</li> <li>8. Tekendalinya penyaluran NAPZA.</li> <li>9. Terhindarinya masyarakat dari penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat dan narkoba.</li> <li>10. Meningkatkan kesehatan lingkungan</li> </ol>	<p>1. Optimalisasi keberadaan rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta dan Puskesmas guna melayani kesehatan masyarakat kota dan daerah hinterland.</p> <p>2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.</p> <p>3. Peningkatan prasarana dan sarana medis agar tercipta kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Optimalisasi tenaga medis dan paramedis serta ciptakan lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kesehatan masyarakat.</p> <p>5. Mengembangkan Rumah Sakit Spesialis tertentu guna melayani kesehatan dasar masyarakat kota dan daerah hinterland.</p>				

**BAB VI**  
**PROGRAM STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA**  
**DAN ARAHAN LOKASI PROGRAM**

**6.1. Program Strategis**

Program Strategis dirumuskan setelah Agenda Jangka Menengah ditetapkan. Rumusan Agenda Jangka Menengah dan Program Strategis itu merupakan rumusan pokok – pokok Agenda dan Program Strategis Pembangunan Perkotaan di Kota Madiun.

**6.2. Indikator Kinerja**

Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembangunan yang bersemangat reformasi, maka berdasarkan Visi dan Misi serta Arahana Strategis, ditetapkan tentang Kinerja Pembangunan Strategis Jangka Menengah.

Seperti halnya dalam perumusan Visi dan Misi, maka perumusan Kinerja Strategis ini juga melalui pembahasan dengan stakeholders. Sehingga, program – program pembangunan yang nantinya akan dihasilkan benar – benar sudah mencerminkan prinsip aspirasi, partisipasi dan demokratisasi secara nyata.

Indikator Kinerja Program Strategis Jangka Menengah dibahas bersama antar stakeholders. Maka diharapkan hal itu akan menjadi suatu komitmen bersama yang perlu diwujudkan bersama. Rumusan Program strategis dengan Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 6.1.

**6.3. Arahkan Lokasi Program**

Program Strategis yang sudah dirumuskan, supaya lokasinya terfokus dan tidak mengalami hal – hal yang tidak diinginkan pada masa mendatang, maka harus memperhatikan aturan / Perda Rencana Tata Ruang Kota / Wilayah (RTRK/W) Kota Madiun. Sedangkan Program Strategis dengan Arahkan Lokasi, dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.1.a. Program Strategi dan Indikator Kinerja : **PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL**

NO	ISU STRATEGIS	AGENDA 5 TH / STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	<p><b>BEKONOMI</b></p> <p><b>BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL</b></p> <p><b>Tujuan :</b></p> <p>1. Menjadikan UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi kota.</p> <p><b>Sasaran :</b></p> <p>1. Terwujudnya pelaku ekonomi yang tangguh dalam menghadapi era AFTA</p> <p>2. Terwujudnya sinergi stakeholders ekonomi dalam pengembangan ekonomi kota</p>	<p>1. Optimalisasi keberadaan sektor industri, perdagangan dan jasa guna melayani kebutuhan masyarakat di daerah hinterland dan luar negeri.</p> <p>2. Memperkuat daya saing produk yang bersifat komparasi dan kompetitif guna menghadapi produk luar (luar daerah / luar negeri).</p> <p>3. Pemberdayaan UMKM di bidang manajemen.</p>	<p>1. Pengembangan infrastruktur perdagangan, industri</p> <p>2. Pengembangan pemasaran produk industri dan jasa</p> <p>3. Pengembangan inkubator bisnis dan teknologi (dikelola masyarakat dan dunia usaha).</p> <p>1. Inventarisasi dan penyempurnaan regulasi, birokrasi dan retribusi serta upaya penegakan hukum dan perlindungan usaha.</p> <p>2. Menggalakkan promosi investasi</p> <p>3. Peningkatan kualitas produksi dan diversifikasi usaha.</p> <p>1. Peningkatan akses kepada sumber produktif melalui fasilitasi pada lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan lainnya.</p>	<p>1. Tertatanya Pasar Kelurahan dengan pengelolaan secara terpadu.</p> <p>2.a. Teridentifikasinya produk unggulan</p> <p>2.b. Bertambahnya omzet dan daerah pemasaran</p> <p>3.a. Adanya Pusat Inkubator Bisnis dan Teknologi sesuai spesialisasinya</p> <p>3.b. Bertambahnya jumlah Inkubator Bisnis dan Teknologi</p> <p>1.a. Adanya Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu (KPMT) bidang usaha</p> <p>1.b. Adanya produk hukum untuk pengembangan UMKM</p> <p>2. Bertambahnya frekuensi penyelenggaraan dan keikutsertaan expo bisnis</p> <p>3. Adanya standarisasi produk dan tumbuhnya produk baru</p> <p>1.a. Tersedianya data UMKM, Lembaga Keuangan Mikro dan lembaga lain yang peduli UMKM</p> <p>1.b. UMKM yang mendapatkan pembiayaan meningkat</p>

6.1.a.



**Strategi Program (SP)**

NO	ISU STRATEGIS	AGENDA 5 TH / STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
		<p>4. Peningkatan profesionalisme pengelolaan UMKM (stakeholders) sektor formal maupun informal.</p>	<p>2. Penyelenggaraan Diklat bagi pelaku UMKM dan pengelola Paguyuban, sentra UMKM.</p> <p>3. Mengkaji daerah hinterland sebagai potensi pasar dan sumber daya.</p> <p>1. Penataan dan pengembangan sentra industri, perdagangan dan jasa.</p> <p>2. Penguatan forum stakeholders pengelolaan UMKM Kota.</p>	<p>2.a. Terbentuknya Paguyuban UMKM</p> <p>2.b. Teridentifikasi Sentra UMKM dan kepengurusannya</p> <p>2.c. Alumni diklat UMKM, pengurus Paguyuban UMKM dan sentra Bertambah.</p> <p>3. Tersedianya data pasar dan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan UMKM.</p> <p>1.a. Kontribusi terhadap PAD meningkat</p> <p>1.b. Jumlah tenaga kerja yang terserap bertambah</p> <p>2.a. Pengurus terdiri unsur yang terkait</p> <p>2.b. Mempunyai visi-misi yang jelas</p> <p>2.c. Adanya database anggota Forum stakeholders pengelolaan UMKM</p>

Tabel 6.1.b. Program Strategis dan Indikator Kinerja : <b>PENGEMBANGAN PENDIDIKAN</b>		PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
NO	ISU STRATEGIS	AGENDA 5 TH / STRATEGI	
2.	<p><b>PENDIDIKAN</b></p> <p>MAHALNYA BIAYA PENDIDIKAN PERLU DIIMBANGI DENGAN MUTUNYA</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan mengutamakan upaya pencapaian target Wajar Dikdas.</li> <li>Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>Terselenggaranya desentralisasi dan otonomi pendidikan yang didukung dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat.</li> <li>Memberdayakan lembaga pendidikan luar sekolah.</li> </ol> <p><b>Sasaran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan APK SD/MI ; SLTP / MTs. ; SMU / MA / SMK.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi sarana dan prasarana untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu, khususnya bagi masyarakat kota Madiun dan daerah hinterland.</li> <li>Pelaksanaan secara bertahap dan konsisten undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas guna peningkatan kualitas pendidikan, dalam konteks MPMBS.</li> </ol>	<p>1. Revitalisasi, rehabilitasi dan pengembangan fasilitas pendidikan.</p> <p>2. Penyusunan Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pendidikan.</p> <p>1. a. Meningkatnya prosentase sekolah yang memiliki perpustakaan.</p> <p>1. b. Prosentase sekolah yang memiliki laboratorium meningkat dibanding tahun lalu.</p> <p>1. c. Meningkatnya prosentase prasarana pendidikan yang representatif disbanding tahun lalu.</p> <p>2. Tersusunnya Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pendidikan.</p> <p>1. Jumlah sekolah yang telah menyusun rencana kerja pengembangan pendidikan.</p> <p>2. Jumlah sekolah yang melaksanakan MPMBS meningkat.</p> <p>3. Jumlah sekolah yang diregroping dan dimanfaatkan.</p> <p>4. Terintegrasinya sumber pembiayaan antara Pemerintah dan masyarakat secara transparan.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi, rehabilitasi dan pengembangan fasilitas pendidikan.</li> <li>2. Penyusunan Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pendidikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Meningkatnya prosentase sekolah yang memiliki perpustakaan.</li> <li>1. b. Prosentase sekolah yang memiliki laboratorium meningkat dibanding tahun lalu.</li> <li>1. c. Meningkatnya prosentase prasarana pendidikan yang representatif disbanding tahun lalu.</li> <li>2. Tersusunnya Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pendidikan.</li> <li>1. Jumlah sekolah yang telah menyusun rencana kerja pengembangan pendidikan.</li> <li>2. Jumlah sekolah yang melaksanakan MPMBS meningkat.</li> <li>3. Jumlah sekolah yang diregroping dan dimanfaatkan.</li> <li>4. Terintegrasinya sumber pembiayaan antara Pemerintah dan masyarakat secara transparan.</li> </ol>

**Strategi Program (SP)**

	<p>2. Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah / masyarakat.</p> <p>3. Memperluas jangkauan dan daya tampung SMU, SMK dan MA bagi seluruh masyarakat.</p>		<p>5. Pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu dan anak berprestasi.</p> <p>6. Terwujudnya PTN di Kota Madiun.</p>	<p>5.a. Rasio siswa yang menerima beasiswa.</p> <p>5.b. Rasio anak kurang mampu yang mendapatkan keringanan / pembebasan dana iuran / pengembangan sekolah melalui komite sekolah</p> <p>6. Terpenuhinya persyaratan pendirian PTN.</p>
6.1.b.				
NO	<p><b>ISU STRATEGIS</b></p> <p>4. Meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja.</p> <p>6. Meningkatkan keadaan dalam pembiayaan dengan dana publik.</p> <p>7. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan.</p>	<p><b>AGENDA 5 TH / STRATEGI</b></p> <p>3. Optimalisasi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap.</p> <p>4. Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan, termasuk pendidikan luar sekolah bersama stakeholders pendidikan.</p>	<p><b>PROGRAM STRATEGIS</b></p> <p>1. Peningkatan mutu dan kualifikasi guru melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>2. Rekrutmen guru sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.</p> <p>4. Mendorong peningkatan mutu produk pendidikan melalui KBK.</p> <p>1. Penyelenggaraan model pendidikan luar sekolah melalui <i>link and match</i> ketenagakerjaan.</p> <p>2. Pengembangan Kejar Paket A, B, C dan KBU.</p>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>1. Ratio guru yang memiliki kualifikasi sesuai standart meningkat.</p> <p>2. Ratio guru secara kuantitas memenuhi standart.</p> <p>3. Terselenggaranya sekolah khusus yang menampung anak-anak cerdas.</p> <p>4.a. Hasil NUN/ evaluasi belajar meningkat</p> <p>4.b. Meningkatnya jumlah sekolah yang berbasis kompetensi.</p> <p>1. Tersusunnya model pengembangan belajar PLS seperti : kecakapan hidup, magang / kursus, bimbingan belajar.</p> <p>2. Jumlah Kejar Paket A, B, C dan KBU.</p>

	<p>8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>9. Menurunkan angka buta aksara latin, angka buta Bahasa Indonesia dan buta Pengetahuan Dasar pada penduduk usia 10 - 44 tahun.</p> <p>10. Menyediakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal termasuk anak usia dini, serta pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan kemampuan kewirausahaan.</p>		
--	--	--	--

**Tabel 6.1.c. Program Strategis dan Indikator Kinerja : PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**

NO	ISU STRATEGIS	AGENDA 5 TH / STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR
3.	<p><b>KESEHATAN</b></p> <p><b>PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BELUM MEMADAI</b></p> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.</li> <li>Peningkatan pelayanan gizi dan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan gizi.</li> <li>Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang semakin merata dan terjangkau.</li> <li>Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat yang bermutu serta penanggulangan NAPZA.</li> </ol> <p><b>Sasaran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya pelayanan kesehatan dasar masyarakat dan rujukan baik pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi keberadaan rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta dan Puskesmas guna melayani kesehatan masyarakat kota dan daerah hinterland.</li> <li>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.</li> <li>Peningkatan prasarana dan sarana medis agar tercipta kesehatan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas tenaga pelayanan.</li> <li>Pengembangan sistem model pelayanan kesehatan yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>Terkumpulnya dana sosial khusus dikelola untuk kesehatan masyarakat.</li> <li>Peningkatan prasarana dan sarana kesehatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya SPM bidang kesehatan.</li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kinerja Rumah Sakit dan Puskesmas.</li> <li>Meningkatnya Rumah Sakit yang terakreditasi.</li> </ol> </li> <li>Adanya keanggotaan dengan iuran tertentu diluar kegiatan yang sudah ada (kegiatan alternatif) bagi keluarga non miskin.</li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya prasarana dan sarana kesehatan yang sesuai standar akreditasi kesehatan.</li> <li>Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan.</li> <li>Pengembangan prasarana dan sarana kesehatan.</li> <li>Meningkatnya laboratorium kesehatan.</li> <li>Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pelayanan kesehatan.</li> </ol> </li> </ol>

**Strategi Program (SP)**

	<p>maupun swasta yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan pra upaya.</p>			
6.1.c.				
NO	ISU STRATEGIS	AGENDA 5 TH / STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
2.	<p>Menurunnya angka kesakitan penyakit.</p>	<p>4. Optimalisasi tenaga medis dan paramedis serta ciptakan lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kesehatan masyarakat.</p>	<p>1. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.</p>	<p>1.a. Meningkatnya derajat kesehatan anak dan ibu hamil.                      b. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan kesehatan penunjang.                      c. Meningkatnya cakupan pelayanan bagi keluarga miskin baik di Puskesmas dan di Rumah Sakit.                      d. Penanggulangan gizi buruk balita, kekurangan gizi, menanggulangi kurang energi kronik (KEK) pada WUS.                      e. Meningkatnya pelayanan rujukan dari sarana pelayanan kesehatan dasar Rumah Sakit.                      f. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tingkat capaian 95%.                      g. Keluarga miskin yang memiliki kartu sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan mencapai 95%.                      h. Meningkatnya jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan.</p>
3.	<p>Menurunnya kejadian penyakit menular dan tidak menular.</p>			
4.	<p>Meningkatnya rasio tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dibanding jumlah penduduk.</p>			
5.	<p>Menurunnya prevalensi gizi buruk / kurang.</p>			
6.	<p>Tersedianya prasarana dan sarana kesehatan.</p>			
7.	<p>Terjaminnya mutu produk farmakes yang beredar.</p>			
8.	<p>Terkendalinya penyaluran NAPZA.</p>			
9.	<p>Terhindarnya masyarakat dari penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat dan narkoba.</p>			
10.	<p>Meningkatnya kesehatan lingkungan</p>			

**Strategi Program (SP)**

6.1.c.				<p>Meningkatnya pemberantasan penyakit menular dan tidak menular.                      Menurunnya beberapa angka kesakitan.                      Cakupan imunisasi 95%.                      Adanya pengembangan pembiayaan pra upaya.                      Adanya peningkatan penyuluhan kesehatan.                      Terjaminnya imunisasi yang aman, merata, sesuai standar.</p>
NO	ISU STRATEGIS	AGENDA 5 TH / STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR
			<p>2. Peningkatan peran serta masyarakat guna menciptakan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat.</p>	<p>2.a. Meningkatnya hygiene dan sanitasi keluarga, masyarakat dan tempat umum.                      b. Meningkatnya mutu lingkungan perumahan dan pemukiman (kualitas air, penanganan dampak pencemaran).                      c. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan kerja.                      d. Meningkatnya kepedulian terhadap perilaku bersih                      e. Meningkatnya upaya anti NAPZA.                      f. Meningkatnya sistem jaringan dukungan masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya</p>

**Strategi Program (SP)**

			<p>masyarakat dalam bidang kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g. Meningkatkan KB dan kesehatan reproduktif dalam mendukung keluarga.</li> <li>h. Meningkatkan keluarga yang menggunakan jamban keluarga pada tingkat capaian 95%.</li> <li>i. Keluarga yang menggunakan air bersih mencapai 100%.</li> <li>j. Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 90%.</li> <li>k. Sekolah yang memenuhi syarat kesehatan meningkat.</li> <li>l. Meningkatkan penduduk yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.</li> <li>m. Meningkatkan Posyandu Mandiri.</li> <li>n. Terperuhnya pelayanan spesifik (unggulan) di Rumah Sakit Spesialis</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Rumah Sakit Unggulan / Spesialis dan peningkatan fungsi rumah sakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Mengembangkan Rumah Sakit Spesialis tertentu guna melayani kesehatan dasar masyarakat kota dan daerah hinterland.</li> </ul>



Tabel 6.2.a. Program Strategi dan Arahkan Lokasi : **PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL**

NO	ISU STRATEGIS	AGENDA 5 TH / STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	ARAHAN LOKASI
1.	<p><b>EKONOMI</b> BELUM OPTIMALNYA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL</p> <p><b>Tujuan :</b> 1. Menjadikan UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi kota</p> <p><b>Sasaran :</b> 1. Terwujudnya pelaku ekonomi yang tangguh dalam menghadapi era AFTA 2. Terwujudnya sinergi stakeholders ekonomi dalam pengembangan ekonomi kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi keberadaan sektor industri, perdagangan dan jasa guna melayani kebutuhan masyarakat di daerah hinterland dan luar negeri.</li> <li>2. Memperkuat daya saing produk yang bersifat komparasi dan kompetitif guna menghadapi produk luar (luar daerah / luar negeri).</li> <li>3. Pemberdayaan UMKM di bidang manajemen.</li> <li>4. Peningkatan profesionalisme pengelolaan UMKM (stakeholders) sektor formal maupun informal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan infrastruktur perdagangan, industri</li> <li>2. Pengembangan pemasaran produk industri dan jasa</li> <li>3. Pengembangan inkubator bisnis dan teknologi (dikelola masyarakat dan dunia usaha).</li> <li>1. Inventarisasi dan penyempurnaan regulasi, birokrasi dan retribusi serta upaya penegakan hukum dan perlindungan usaha.</li> <li>2. Menggalakan promosi investasi</li> <li>3. Peningkatan kualitas produksi dan diversifikasi usaha.</li> <li>1. Peningkatan akses kepada sumber produktif melalui fasilitasi pada lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan lainnya.</li> <li>2. Penyelenggaraan Diklat bagi pelaku UMKM dan pengelola Paguyuban, sentra UMKM.</li> <li>3. Mengkaji daerah hinterland sebagai potensi pasar dan sumber daya.</li> <li>1. Penataan dan pengembangan sentra industri, perdagangan dan jasa.</li> <li>2. Penguatan forum stakeholders pengelolaan UMKM Kota.</li> </ol>	<p>Pasar Kel., Home Industri Kel. Kota, daerah hinterland, luar negeri Kota Kota Kota, daerah hinterland, luar negeri Kota Kota, daerah hinterland, luar negeri Kota Kota Kota</p>

Tabel 6.2.b. Program Strategi dan Arahannya : **PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

NO	ISU STRATEGIS	AGENDA 5 TH / STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	ARAHAN LOKASI
2.	<p data-bbox="284 1461 314 1914"><b>PENDIDIKAN</b></p> <p data-bbox="314 1461 344 1914"><b>MAHALNYA BIAYA PENDIDIKAN PERLU DIIMBANGI DENGAN MUTUNYA</b></p> <p data-bbox="344 1461 374 1914"><i>Tujuan :</i></p> <ol data-bbox="374 1461 715 1914" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="374 1461 495 1914">1. Peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan mengutamakan upaya pencapaian target Wajib Dikdas.</li> <li data-bbox="495 1461 616 1914">2. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li data-bbox="616 1461 737 1914">3. Terselenggaranya desentralisasi dan otonomi pendidikan yang didukung dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat.</li> <li data-bbox="737 1461 858 1914">4. Memberdayakan lembaga pendidikan luar sekolah.</li> </ol> <p data-bbox="858 1461 889 1914"><i>Sasaran :</i></p> <ol data-bbox="889 1461 1342 1914" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="889 1461 1010 1914">1. Meningkatkan APK SD/MI ; SLTP / MTs. ; SMU / MA / SMK.</li> <li data-bbox="1010 1461 1342 1914">2. Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah / masyarakat.</li> </ol>	<ol data-bbox="284 1019 715 1461" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="284 1019 715 1461">1. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu, khususnya bagi masyarakat kota Madiun dan daerah hinterland.</li> <li data-bbox="715 1019 1017 1461">2. Pelaksanaan secara bertahap dan konsisten undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas guna peningkatan kualitas pendidikan, dalam konteks MPMBS.</li> </ol>	<ol data-bbox="284 491 715 1019" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="284 491 344 1019">1. Revitalisasi, rehabilitasi dan pengembangan fasilitas pendidikan.</li> <li data-bbox="344 491 715 1019">2. Penyusunan Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pendidikan.</li> </ol>	<p data-bbox="284 25 344 491">Pekot ; seluruh sekolah</p> <p data-bbox="344 25 405 491">Pekot</p> <p data-bbox="405 25 465 491">Kota</p> <p data-bbox="465 25 526 491">Seluruh sekolah</p> <p data-bbox="526 25 586 491">Seluruh sekolah</p> <p data-bbox="586 25 647 491">Kota</p> <p data-bbox="647 25 707 491">Kota</p>

**Strategi Program (SP)**

	<p>3. Memperluas jangkauan dan daya tampung SMU, SMK dan MA bagi seluruh masyarakat.</p>	<p>6. Terwujudnya PTN di Kota Madiun</p>	<p>Kota (Kel. Ngegong, Kel. Winongo Kec. Manguharjo)</p>
<p>6.2.b.</p>	<p>ISU STRATEGIS</p>	<p>AGENDA 5 TH / STRATEGI</p>	<p>PROGRAM STRATEGIS</p>
<p>NO</p>	<p>4. Meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah sebagai landasan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kebutuhan dunia kerja.</p> <p>6. Meningkatkan keadilan dalam pembiayaan dengan dana publik.</p> <p>7. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pendidikan.</p> <p>8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>9. Menurunkan angka buta aksara latin, angka buta Bahasa Indonesia dan buta Pengetahuan Dasar pada penduduk usia 10 – 44 tahun.</p>	<p>3. Optimalisasi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap.</p>	<p>1. Peningkatan mutu dan kualifikasi guru melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>2. Rekrutmen guru sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.</p> <p>4. Mendorong peningkatan mutu produk pendidikan melalui KBK.</p>
		<p>4. Peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan, termasuk pendidikan luar sekolah bersama stakeholders pendidikan.</p>	<p>1. Penyelenggaraan model pendidikan luar sekolah melalui <i>link and match</i> ketenagakerjaan.</p> <p>2. Pengembangan Kejar Paket A, B, C dan KBU.</p>
			<p>ARAHAN LOKASI</p> <p>Pemkot ; seluruh sekolah</p> <p>Kota</p> <p>Kota</p> <p>Seluruh sekolah</p> <p>Pemkot ; seluruh sekolah</p> <p>Pemkot ; kelurahan - kelurahan</p>

	<p>10. Menyediakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal termasuk anak usia dini, serta pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan kemampuan kewirausahaan.</p>			
--	---	--	--	--

Tabel 6.2.c. Program Strategis dan Arah-an Lokasi : **PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**

NO	ISU STRATEGIS	AGENDA 5 TH / STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	ARAHAN LOKASI
3.	<p><b>KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BELUM MEMADAI</b></p> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.</li> <li>2. Peningkatan pelayanan gizi dan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan gizi.</li> <li>3. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang semakin merata dan terjangkau.</li> <li>4. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat yang bermutu serta penanggulangan NAPZA.</li> </ol> <p><b>Sasaran :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pelayanan kesehatan dasar masyarakat dan rujukan baik pemerintah maupun swasta yang didukung oleh peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan pra upaya.</li> <li>2. Menurunnya angka kesakitan penyakit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi keberadaan rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta dan Puskesmas guna melayani kesehatan masyarakat kota dan daerah hinterland.</li> <li>2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.</li> <li>3. Peningkatan prasarana dan sarana medis agar tercipta kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Optimalisasi tenaga medis dan paramedis serta ciptakan lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kesehatan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas tenaga pelayanan.</li> <li>2. Pengembangan sistem model pelayanan kesehatan yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Terkumpulnya dana sosial khusus dikelola untuk kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Peningkatan prasarana dan sarana kesehatan.</li> <li>5. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.</li> <li>6. Peningkatan peran serta masyarakat guna menciptakan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat.</li> </ol>	<p>Pemkot ; Rumah Sakit ; Puskesmas</p> <p>Kota ; Rumah Sakit ; Puskesmas</p> <p>Rumah Sakit ; Puskesmas</p> <p>Kota ; Rumah Sakit ; Puskesmas</p> <p>Kota ; hinterland</p> <p>Kota</p>

## 6.2.c.

NO	ISU STRATEGIS	AGENDA 5 TH / STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	ARAHAN LOKASI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya kejadian penyakit menular dari tidak menular.</li> <li>2. Meningkatnya rasio tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dibanding jumlah penduduk.</li> <li>3. Menurunnya prevalensi gizi buruk / kurang.</li> <li>4. Tersedianya prasarana dan sarana kesehatan.</li> <li>5. Terjaminnya mutu produk farmakes yang beredar.</li> <li>6. Terkendalinya penyaluran NAPZA.</li> <li>7. Terhindarinya masyarakat dari penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat dan narkoba.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mengembangkan Rumah Sakit Spesialis tertentu guna melayani kesehatan dasar masyarakat kota dan daerah hinterland.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pengembangan Rumah sakit Unggulan / Spesialis</li> </ol>	<p>Kota (Kel. Sogaten, Kec. Manguharjo)</p>

**BAB VII**

**PENUTUP**

Demikian Laporan Penyusunan Strategi Program (SP), Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) Kota Madiun TA. 2004.

Strategi Program (SP) merupakan salah satu aspek dari PDPP yang menjadi payung atau acuan bagi aspek – aspek lainnya. Setelah penyusunan SP ini, akan dilanjutkan penyusunan empat dokumen yang lain, yaitu :

1. Program Investasi (PI)
2. Program Pembiayaan (PP)
3. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Partisipatif
4. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK)

Sedangkan dua dokumen yang lain, yaitu :

1. Program Pengembangan Institusional (P2I)
2. Corporate Planning untuk Perusahaan Daerah (BUMD)

Inshaallah akan disusun pada TA. 2005 mendatang.

**RENCANA DAN REALISASI  
PENDAPATAN PER POS DALAM 5(LIMA) TAHUN**

1 No	2 POS/KEGIATAN	3 RENCANA	4 REALISASI
	<b>TAHUN 1999/2000</b>		
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang lalu	1.084.739.000,00	1.084.738.667,15
2	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	4.439.648.000,00	4.884.345.499,84
	-Pajak Daerah	1.667.538.000,00	1.758.318.327,75
	-Restribusi Daerah	2.434.580.000,00	2.478.331.600,00
	-Bagian Laba Usaha Daerah	27.500.000,00	22.291.415,79
	-Lain-lain Pendapatan	310.030.000,00	625.404.156,30
3	<u>Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi Yang Lebih Tinggi</u>	48.843.256.000,00	42.863.806.175,75
	-Bagi Hasil Pajak	2.907.165.000,00	4.622.000.088,80
	-Bagi Hasil Bukan Pajak	27.417.000,00	53.152.504,95
	-Subsidi Daerah Otonom	27.393.758.000,00	26.361.969.394,00
	-Bantuan Pembangunan	18.514.916.000,00	11.826.684.188,00
4	<u>Pinjaman Pemerintah Daerah</u>	990.000.000,00	990.000.000,00
	-Pinjaman Dari Pemerintah	-	-
	-Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	990.000.000,00	990.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>55.357.643.000,00</b>	<b>49.822.890.342,74</b>



**RENCANA DAN REALISASI  
PENDAPATAN PER POS DALAM 5(LIMA) TAHUN**

No	POS/KEGIATAN	RENCANA	REALISASI
1	2	3	4
	<b>TAHUN 2000</b>		
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	3.093.312.000,00	3.093.312.327,80
2	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	4.267.351.000,00	4.733.882.086,50
	-Pajak Daerah	1.386.328.000,00	1.664.096.490,50
	-Restribusi Daerah	2.061.555.000,00	2.098.591.350,00
	-Bagian Laba Usaha Daerah	83.000.000,00	25.000.000,00
	-Lain-lain Pendapatan	736.468.000,00	946.194.246,00
3	<u>Pendapatan Yang Berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi Yang Lebih Tinggi</u>	41.011.743.000,00	39.678.394.402,72
	-Bagi Hasil Pajak	3.399.591.000,00	4.782.464.541,81
	-Bagi Hasil Bukan Pajak	32.000.000,00	39.729.885,91
	-Subsidi Daerah Otonom	25.860.876.000,00	23.415.440.923,00
	-Bantuan Pembangunan	11.719.276.000,00	11.440.759.052,00
4	<u>Pinjaman Pemerintah Daerah</u>		
	-Pinjaman Dari Pemerintah	-	-
	-Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>48.372.406.000,00</b>	<b>47.505.588.817,02</b>

**RENCANA DAN REALISASI  
PENDAPATAN PER POS DALAM 5(LIMA) TAHUN**

No	POS/KEGIATAN	RENCANA	REALISASI
1	2	3	4
	<b>TAHUN 2001</b>		
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang lalu	<b>3.480.042.000,00</b>	<b>3.480.042.147,15</b>
2	Pendapatan Asli Daerah	<b>6.262.631.000,00</b>	<b>9.917.969.243,18</b>
	-Pajak Daerah	2.016.804.000,00	2.570.988.673,50
	-Restribusi Daerah	2.309.362.000,00	2.503.464.480,00
	-Bagian Laba Usaha Daerah	35.000.000,00	70.347.235,52
	-Lain-lain Pendapatan	1.901.465.000,00	4.773.168.854,16
3	<u>Dana Perimbangan</u>	<b>213.212.622.000,00</b>	<b>218.559.398.162,00</b>
	-Bagi Hasil Pajak	5.880.622.000,00	10.058.251.512,00
	-Bagi Hasil Bukan Pajak	12.000.000,00	1.181.434.890,00
	-Dana Alokasi Umum	207.320.000.000,00	207.319.711.760,00
	-Dana Alokasi Khusus	-	-
	-Dana Darurat	-	-
4	<u>Pinjaman Pemerintah Daerah</u>		
	-Pinjaman Dalam Negeri	-	-
	-Pinjaman Luar Negeri	-	-
5	<u>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</u>	<b>2.027.500.000,00</b>	<b>2.958.758.333,42</b>
	Penerimaan dari Propinsi	2.027.500.000,00	2.958.758.333,42
	Penerimaan dari Kabupaten/Kota	-	-
	Penerimaan Lain-lainnya	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>224.982.795.000,00</b>	<b>234.916.167.885,75</b>

**RENCANA DAN REALISASI  
PENDAPATAN PER POS DALAM 5(I IMA) TAHUN**

No	POS/KEGIATAN	RENCANA	REALISASI
1	2	3	4
	<b>TAHUN 2002</b>		
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang lalu	95.778.272.000,00	95.778.272.025,40
2	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	11.635.171.000,00	16.554.183.628,59
	-Pajak Daerah	3.253.028.000,00	3.703.648.638,50
	-Restribusi Daerah	2.595.391.000,00	2.799.212.865,40
	-Bagian Laba Usaha Daerah	203.059.000,00	364.612.075,53
	-Lain-lain Pendapatan	5.583.693.000,00	9.686.710.049,16
3	<u>Dana Perimbangan</u>	226.443.318.000,00	227.157.044.346,42
	-Bagi Hasil Pajak	17.062.445.000,00	17.722.027.146,00
	-Bagi Hasil Bukan Pajak	2.060.873.000,00	1.570.310.950,42
	-Dana Alokasi Umum	207.320.000.000,00	207.864.706.250,00
	-Dana Alokasi Khusus	-	-
	-Dana Darurat	-	-
4	<u>Pinjaman Pemerintah Daerah</u>		
	-Pinjaman Dalam Negeri	-	-
	-Pinjaman Luar Negeri	-	-
5	<u>Lain-lain Pendapatan Yang syah</u>	1.000.000.000,00	2.061.846.731,99
	Penerimaan dari Propinsi	1.000.000.000,00	2.061.846.731,99
	Penerimaan dari Kabupaten/Kota	-	-
	Penerimaan Lain-lainnya	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>334.856.761.000,00</b>	<b>341.551.346.732,40</b>

**RENCANA DAN REALISASI  
PENDAPATAN PER POS DALAM 5(LIMA) TAHUN**

No	POS/KEGIATAN	RENCANA	REALISASI
1	2	3	4
	<b>TAHUN 2003</b>		
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang lalu	<b>122.291.964.000,00</b>	<b>122.291.964.284,00</b>
2	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	<b>16.952.532.000,00</b>	<b>19.471.735.342,00</b>
	-Pajak Daerah	4.132.221.000,00	4.490.954.287,00
	-Restribusi Daerah	3.627.938.000,00	4.014.745.792,00
	-Bagian Laba Usaha Daerah	761.924.000,00	730.072.520,00
	-Lain-lain Pendapatan	8.430.449.000,00	10.235.962.743,00
3	<u>Dana Perimbangan</u>	<b>225.583.309.000,00</b>	<b>235.307.944.111,00</b>
	-Bagi Hasil Pajak	8.531.450.000,00	17.456.061.253,00
	-Bagi Hasil Bukan Pajak	316.000.000,00	1.116.028.258,00
	-Dana Alokasi Umum	216.735.859.000,00	216.735.854.600,00
	-Dana Alokasi Khusus	-	-
	-Dana Darurat	-	-
4	<u>Pinjaman Pemerintah Daerah</u>		
	-Pinjaman Dalam Negeri	-	-
	-Pinjaman Luar Negeri	-	-
5	<u>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</u>	<b>7.144.250.000,00</b>	<b>9.697.361.662,00</b>
	-Penerimaan dari Pemerintah Pusat	-	-
	-Penerimaan dari Propinsi	7.144.250.000,00	9.697.361.662,00
	-Penerimaan dari Kabupaten/Kota	-	-
	-Penerimaan Lain-lainnya	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>371.972.055.000,00</b>	<b>386.769.005.399,00</b>

**BELANJA RUTIN DALAM 5(LIMA)TAHUN**

No	POS/Kegiatan	TAHUN 1999/2000		Tahun 2000	
		Rencana 3	Realisasi 4	Rencana 5	Realisasi 6
1	Belanja Pegawai	26.696.000.00.00	25.642.393.595.00	25.383.417.000.00	22.886.201.441.00
2	Belanja Barang	2.282.941.000.00	2.209.828.720.90	2.667.209.000.00	2.600.070.545.00
3	Belanja Pemeliharaan	244.087.000.00	239.668.103.00	341.228.000.00	334.831.274.00
4	Belanja Perjalanan Dinas	184.392.000.00	171.956.600.00	151.958.000.00	149.446.000.00
5	Belanja lain-lain	3.171.487.000.00	3.349.294.384.11	3.609.941.000.00	3.490.686.550.00
6	Anggaran Hutang dan Bunga	597.720.000.00	511.137.293.62	936.821.000.00	888.553.258.79
7	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	423.780.000.00	345.200.000.00	65.573.000.00	65.572.500.00
8	Pengeluaran yg Tidak Termasuk Bagian Lain	542.466.000.00	499.775.063.50	806.073.000.00	660.555.082.00
9	Pengeluaran yg Tidak	214.960.000.00	0,00	209.008.000.00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>34.359.509.000.00</b>	<b>32.969.253.764,13</b>	<b>34.171.228.000,00</b>	<b>31.075.916.650,79</b>

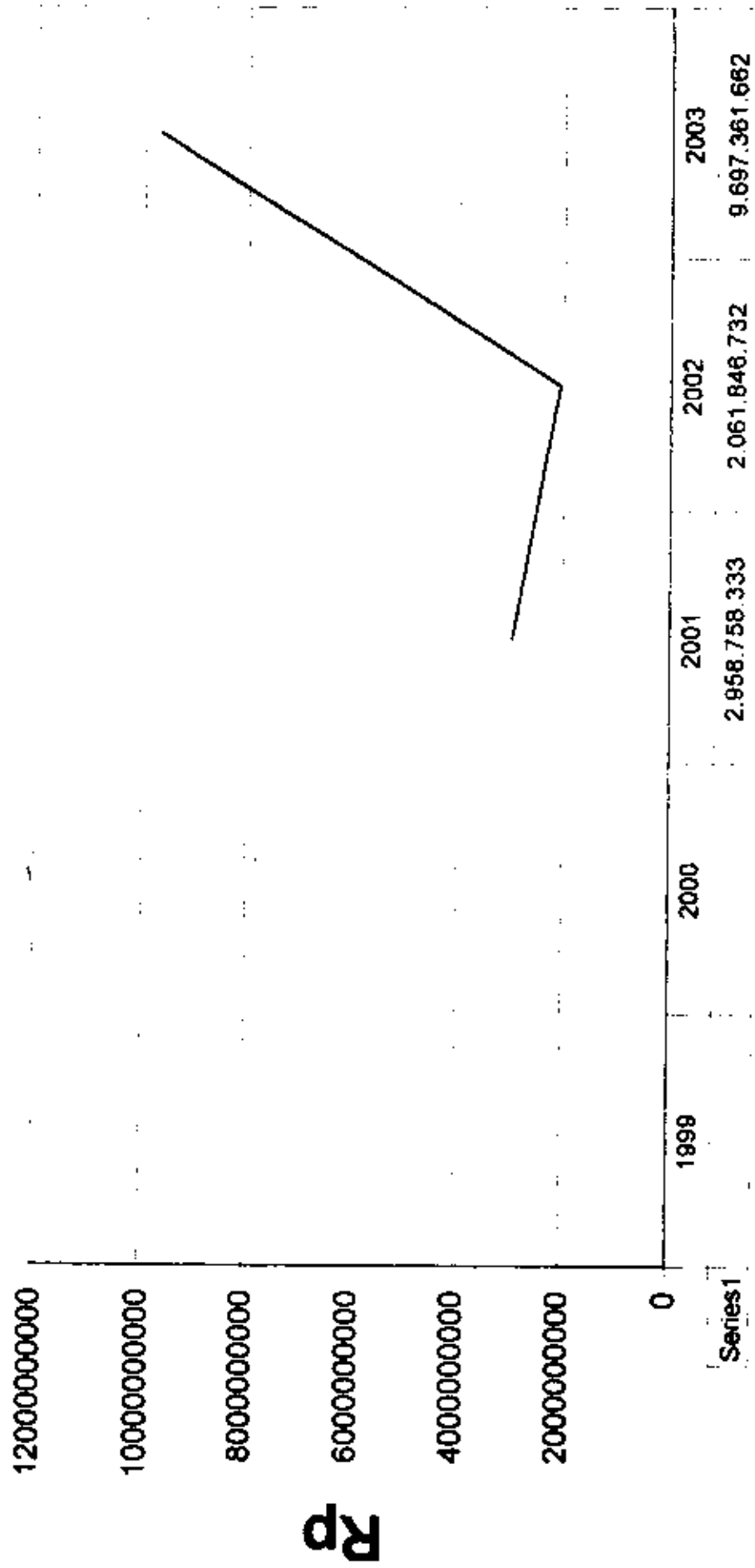
**BELANJA RUTIN DALAM 5(LIMA)TAHUN**

No	POS/Kegiatan	Tahun 2001		Tahun 2002	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	105.983.723.000,00	78.522.931.270,00	88.695.935.000,00	76.070.449.135,00
2	Belanja Barang	12.734.176.000,00	8.833.856.449,05	23.449.253.000,00	22.677.200.347,40
3	Belanja Pemeliharaan	760.536.000,00	727.749.237,00	1.255.867.000,00	1.245.554.856,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	497.208.000,00	464.792.250,00	635.708.000,00	606.744.382,00
5	Belanja lain-lain	6.761.927.000,00	6.381.149.724,75	9.657.715.000,00	9.208.274.088,95
6	Anggaran Hutang dan Bunga	10.528.376.000,00	9.379.378.769,75	0,00	0,00
7	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pengeluaran yg Tidak Termasuk Bagian Lain	749.470.000,00	679.506.250,00	1.187.005.000,00	1.162.799.400,00
9	Pengeluaran yg Tidak	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	14.395.425.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>143.067.916.000,00</b>	<b>107.989.363.950,55</b>	<b>139.276.908.000,00</b>	<b>110.971.022.209,35</b>

**BELANJA RUTIN DALAM 5(LIMA)TAHUN**

No	POS/Kegiatan	Tahun 2003	
		Rencana	Realisasi
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	123.161.932.000,00	107.210.989.643,00
2	Belanja Barang	14.930.153.000,00	13.626.905.632,00
3	Belanja Pemeliharaan	2.156.494.000,00	2.834.257.590,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	804.833.000,00	667.124.200,00
5	Belanja lain-lain	16.911.470.000,00	7.885.367.990,00
6	Anggaran Hutang dan Bunga	0,00	0,00
7	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan	0,00	0,00
8	Pengeluaran yg Tidak Termasuk Bagian Lain	1.786.300.000,00	1.782.996.155,00
9	Pengeluaran yg Tidak	51.700.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>159.802.882.000,00</b>	<b>134.007.641.210,00</b>

Penerimaan dana dari Propinsi





BELANJA PEMBANGUNAN DALAM 5 (LIMA) TAHUN

No	POS/Kegiatan	TAHUN 1999/2000		Tahun 2000		Tahun 2001		Tahun 2002		Tahun 2003	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Sektor Industri	-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	235.815.000,00	235.815.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.138.000.000,00	368.000.000,00
2	Sektor pertanian & Kehutanan	52.805.000,00	52.790.000,00	45.464.000,00	45.464.000,00	349.966.000,00	349.966.000,00	1.418.095.000,00	418.094.800,00	300.000.000,00	299.798.000,00
3	Sektor Sumber daya air & Irigasi	-	-	-	-	160.000.000,00	160.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00
4	Sektor Tenaga Kerja	-	-	-	-	39.909.984.000,00	39.909.984.000,00	52.574.946.000,00	52.574.946.000,00	18.452.890.000,00	18.180.173.297,00
5	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah & Koperasi	1.907.776.000,00	1.306.352.455,00	858.874.000,00	620.795.440,00	4.699.748.340,80	4.699.748.340,80	64.771.824.000,00	26.469.782.223,00	69.275.569.000,00	66.696.207.748,00
6	Sektor Transportasi	4.700.365.000,00	767.092.636,00	5.427.267.000,00	5.348.659.856,06	8.574.297.000,00	8.574.297.000,00	-	-	-	-
7	Sektor Pertambangan & Energi	-	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	3.055.000.000,00	1.450.489.100,00	1.614.309.000,00	1.598.847.900,00
8	Sektor Pariwisata, Pos & Telekomunikasi Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	500.000.000,00	49.974.450,00	3.213.170.000,00	2.226.864.870,00	3.739.751.000,00	3.165.926.325,00	1.694.005.000,00	1.691.843.450,00
9	Sektor Pembangunan Daerah & Pemukiman	-	-	-	-	1.459.761.000,00	389.845.900,00	962.377.000,00	939.130.700,00	520.000.000,00	516.534.655,00
10	Sektor Lingkungan Hidup & Tata Ruang	156.915.000,00	156.915.000,00	-	-	7.911.090.000,00	1.005.923.200,00	23.900.848.000,00	7.076.369.500,00	43.787.421.000,00	43.099.879.624,00
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Keperawatan Terhadap Tahun YME, Pemuda & Olahraga	1.973.332.000,00	1.623.119.865,00	956.149.000,00	949.588.000,00	7.911.090.000,00	1.005.923.200,00	23.900.848.000,00	7.076.369.500,00	43.787.421.000,00	43.099.879.624,00
12	Sektor Kependudukan & Keluarga Sejahtera	-	-	-	-	1.081.000.000,00	-	1.081.000.000,00	1.081.000.000,00	110.000.000,00	80.000.000,00
13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak & Wanita	2.417.675.000,00	1.090.909.257,00	2.630.438.000,00	2.619.627.511,00	2.788.500.000,00	539.510.319,00	10.000.669.000,00	2.835.720.935,00	9.982.358.000,00	9.639.542.280,00
14	Sektor Pemukiman dan Perumahan	5.979.239.000,00	5.173.169.408,00	889.755.000,00	732.062.843,00	2.292.762.000,00	2.280.867.080,00	7.820.000.000,00	7.438.868.330,00	10.536.900.000,00	9.984.903.000,00
15	Sektor Agama	200.000.000,00	194.748.000,00	-	-	1.254.000.000,00	849.071.000,00	2.129.229.000,00	1.739.365.909,00	5.898.905.000,00	5.840.039.091,00
16	Sektor Ilmu Pengetahuan & Teknologi	125.000.000,00	119.256.575,00	59.000.000,00	58.754.800,00	361.000.000,00	333.947.080,00	728.923.000,00	354.474.750,00	1.868.933.000,00	1.859.904.773,00
17	Sektor Hukum	15.000.000,00	15.000.000,00	75.000.000,00	71.429.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	228.000.000,00	221.152.400,00	221.000.000,00	221.000.000,00
18	Sektor Aparatur Pemerintah & Pengawasan	3.375.197.000,00	3.086.141.034,00	3.184.231.000,00	2.434.178.349,00	12.350.315.000,00	10.102.082.350,00	21.646.376.000,00	18.287.184.069,00	45.644.363.000,00	43.001.397.512,00
19	Sektor Politik, Penerangan & Komunikasi & Media Massa	10.574.000,00	10.574.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	485.000.000,00	479.424.250,00	377.000.000,00	372.925.000,00	469.500.000,00	469.500.000,00
20	Sektor Keamanan & Ketertiban Umum	59.256.000,00	59.256.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	55.000.000,00	43.897.500,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-
21	Sektor Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	-	-	-	-	475.000.000,00	473.361.000,00	-	-	-	-
	Jumlah	20.998.134.000,00	13.760.324.250,00	14.201.178.000,00	12.945.534.249,06	81.914.879.000,00	31.148.531.909,80	195.579.853.000,00	108.288.360.239,00	212.169.173.000,00	204.179.851.330,00